



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Laporan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi Laporan Keuangan disajikan agar pengguna mengetahui mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Posisi keuangan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama TA 2022.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 8);
- t. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 25);
- u. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 277 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 277);
- v. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 278).

Berdasarkan perundang-undangan di atas Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 berupa Laporan Keuangan TA 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan penyusunan keuangan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan
- 2.4. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambatan Pencapaian Kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program

- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program
- 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambatan Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi



- 5.1. Entitas Pelaporan
- 5.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan

- 6.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 6.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP.SAL)
- 6.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 6.4. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional (LO)
- 6.5. Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 6.6. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6.7. Hal – Hal Lain terkait Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022.
- 6.8. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro daerah disajikan untuk mengetahui dan memahami perekonomian Kabupaten Kuningan yang menjadi reflektor kinerja pembangunan. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan Tahun 2020 s.d. 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Relatif Terjaganya Stabilitas Ekonomi Dengan Baik

Salah satu variabel penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah adalah menggunakan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Untuk mengukur besarnya LPE dapat diukur dari perkembangan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Selain itu, PDRB juga menginformasikan struktur perekonomian daerah, yaitu kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran daya beli masyarakat atau rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan perkapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah dapat diamati dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Kebutuhan yang diikuti daya beli, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total *output* produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 s.d. 2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2020	21,996*	14,495*
2021	22,805**	14,812**
2022	24,682***	15,426***

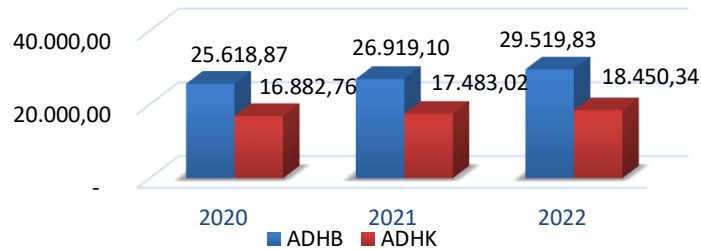
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Ket : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara



Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 ditampilkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 1
Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 s.d. 2022



Untuk melihat perkembangan perekonomian di Kabupaten Kuningan kurun waktu Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 disajikan pada Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan, sebagai berikut:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 s.d. 2021

Tahun	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2020	22,00	-4,99%	0,11%
2021	22,81	3,68%	3,56%
2022	24,68	8,21%	5,53%

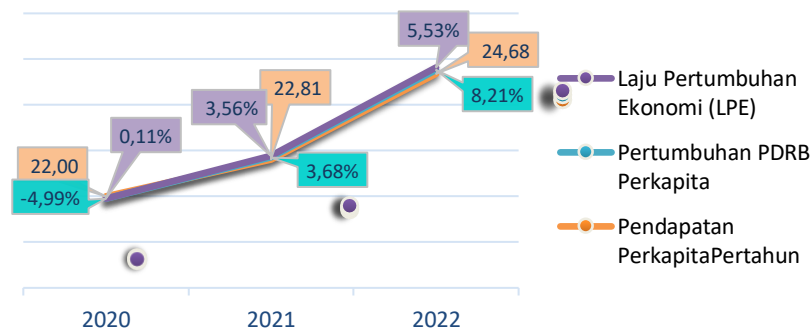
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Ket : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

LPE Kabupaten Kuningan Tahun 2021 adalah urutan ke-5 tertinggi se-Jawa Barat. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kualitas sumber daya alam yang dikelola dengan baik, dan ditunjang dengan status Kabupaten Kuningan yang dijadikan sebagai Kabupaten Konservasi. Namun nilai PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Kuningan masih rendah yaitu berada di urutan ke 8.

LPE Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 ditampilkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 s.d. 2022





2.1.2 Kemampuan Ekonomi Untuk Memperluas Lapangan Pekerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah kelompok penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2022 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan telah mencapai 61,80%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, yang pada Tahun 2021 TPAK penduduk Kabupaten Kuningan sekitar 63,82%.

Untuk melihat Pengangguran yaitu orang yang masuk Angkatan Kerja (15 s.d. 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya digunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Tahun 2022 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 9,81 persen, mengalami Penurunan sebesar 1,87 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2021. Semakin turun prosentase TPT mengindikasikan semakin baik keadaan ketenagakerjaan seiring dengan penguatan ekonomi.

Dari sisi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 88.32 persen pada Tahun 2021 menjadi 90.19 persen Tahun 2022. Hal ini menunjukkan penyerapan Angkatan Kerja yang mengalami kenaikan sebesar 1.87 persen.

Tabel 3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja,
Bekerja, Mencari Kerja,TPAK, TPT, dan TKK
di Kabupaten Kuningan,
Tahun 2020 – 2022

Indikator	2020			2021			2022		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas	419.144	422.605	841.749	423.406	427.146	850.552	427.511	431.450	858.961
Angkatan Kerja	330.660	191.017	521.677	348.835	193.947	542.782	346.836	183.989	530.825
Bekerja	292.807	170.357	463.164	309.240	170.165	479.405	308.114	170.636	478.750
Mencari Kerja	37.853	20.660	58.513	39.595	23.782	63.377	38.722	13.353	52.075
Bukan Angkatan Kerja	88.484	231.588	320.072	74.571	233.199	307.770	80.675	247.461	328.136
Sekolah	30.595	24.816	55.411	26.952	26.631	53.583	31.222	26.974	58.196
Mengurus RT	21.695	183.534	205.229	7.335	185.758	193.093	11.901	204.497	216.398
Lainnya	36.194	23.238	59.432	40.284	20.810	61.094	37.552	15.990	53.542
TPAK			61,98			63,82			61,80
TPT	11,45	10,82	11,22	10,14	9,27	11,68	7,29	2,52	9,81
TKK	88,55	89,18	88,78			88,32	92,71	97,48	90,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kuningan

Tren meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.

Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan



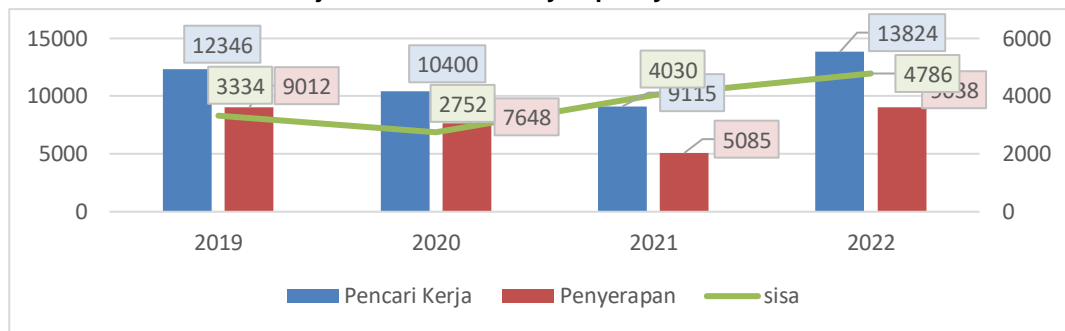
kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Tabel 4
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya
Tahun 2019 s.d. 2022

Tahun	Pencari Kerja			Penyerapan			Sisa		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2019	6.309	6.037	12.346	4.277	4.735	9.012	2.032	1.302	3.334
2020	5.349	5.051	10.400	2.922	4.726	7.648	2.427	325	2.752
2021	4.682	4.433	9.115	2.851	2.234	5.085	1.831	2.199	4.030
2022	6.784	7.040	13.824	3.941	5.097	9.038	2.843	1.943	4.786
Jumlah	23.124	22.561	45.685	13.991	16.792	30.783	9.133	5.769	14.902

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Kuningan

Grafik 3
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya Tahun 2019 s.d. 2022



2.1.3 Tingkat Perubahan Harga (Inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan. Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen dari daerah pemasok pangan, tidak lancarnya distribusi pangan sehingga meningkatkan biaya perjalanan serta biaya risiko spekulasi pasar. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Pada Desember 2022, Terdapat tujuh Kota di Jawa Barat terjadi Inflasi *year on year* (yoy) sebesar 6.04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115.11, Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 7.45 persen dengan IHK sebesar 115.43 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4.86 persen dengan IHK sebesar 110.32.

Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi Kabupaten sekitar biasanya menggunakan data inflasi Kota Cirebon. Pada Tahun 2022, Inflasi Kota Cirebon adalah 4.86 persen. Angka inflasi tersebut berada di bawah Inflasi Jawa Barat dan Nasional pada tahun yang sama yaitu masing-masing 6.04 persen dan 5.51 persen.



Tabel 5
Perbandingan Perkembangan Inflasi Tahun 2019 s.d. 2022

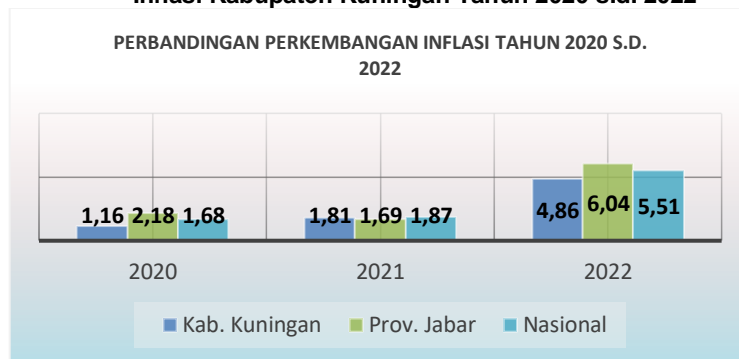
Tahun	Kab. Kuningan	Prov. Jabar	Nasional
2020	1,16	2,18	1,68
2021*	1.81	1.69	1.87
2022**	4.86	6.04	5.51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

* Angka Sementara

Perbandingan perkembangan inflasi Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan nasional dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 4
Inflasi Kabupaten Kuningan Tahun 2020 s.d. 2022

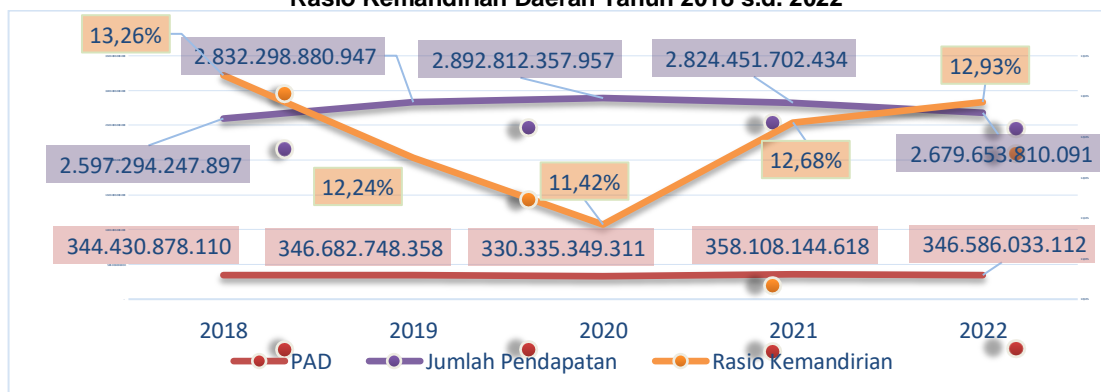


Berdasarkan Grafik 4 diatas terlihat bahwa Inflasi di Kabupaten Kuningan kurun waktu 2020 s.d. 2022 relatif rendah dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Tabel 6
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2018	344.430.878.110,00	2.597.294.247.897,00	13,26%
2019	346.682.748.358,00	2.832.298.880.947,00	12,24%
2020	330.335.349.311,00	2.892.812.357.957,00	11,42%
2021	358.108.144.618,00	2.824.451.702.434,00	12,68%
2022	346.586.033.112,00	2.679.653.810.091,00	12,93%

Grafik 5
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2018 s.d. 2022



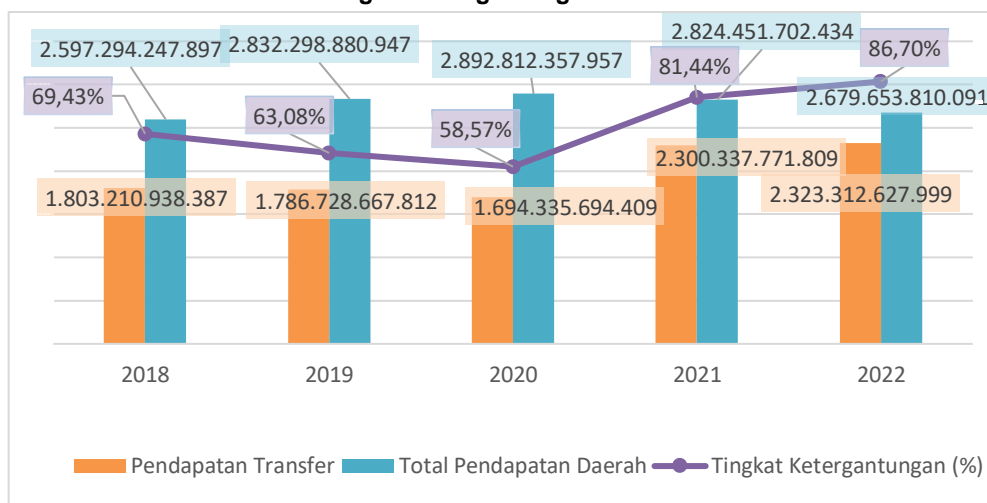


Sedangkan untuk melihat secara rinci Tingkat Ketergantungan Daerah ditampilkan pada Tabel 7 dan Grafik 6 berikut ini.

Tabel 7
Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Tingkat Ketergantungan (%)
2018	1.803.210.938.387,00	2.597.294.247.897,00	69,43%
2019	1.786.728.667.812,00	2.832.298.880.947,00	63,08%
2020	1.694.335.694.409,00	2.892.812.357.957,00	58,57%
2021	2.300.337.771.809,00	2.824.451.702.434,00	81,44%
2022	2.323.312.627.999,00	2.679.653.810.091,00	86,70%

Grafik 6
Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2018 s.d. 2022



2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi dana perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, maka diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Langkah-langkah yang ditempuh untuk optimalisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-langkah prioritas sebagai berikut:



- 1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan Pendapatan Daerah;
 - 2) Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan Pendapatan;
 - 4) Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - 5) Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah maupun pengelolaan Aset Daerah;
 - 6) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - 7) Peningkatan penegakan peraturan daerah yang mengatur Pendapatan Daerah.
- b. Mendorong upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, serta Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan; dan
 - d. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang disebut sebagai *mandatory spending*.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

No	Uraian <i>Mandatory Spending</i>	Total APBD/APBD diluar Gaji/DTU/Dana Perimbangan (Rp)	% Alokasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
				(Rp)	(Rp)	
1	Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada Tahun 2022 Anggaran Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar 35,57% melebihi alokasi belanja wajib Pendidikan	3.022.516.285.984,00	35,57	1.075.023.983.586,00	985.990.090.550,00	91,72
2	Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Sebesar 20,84% dari Total APBD 2022 di luar gaji telah dianggarkan untuk kegiatan di Bidang Kesehatan	2.242.835.831.237,00	20,84	467.319.714.799,00	355.332.677.757,00	76,04
3	Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 telah menganggarkan 50,05% dari Dana Transfer Umum.	889.305.092.633,00	50,05	445.115.990.397,00	314.603.743.542,00	70,68



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian <i>Mandatory Spending</i>	Total APBD/APBD diluar Gaji/DTU/Dana Perimbangan (Rp)	% Alokasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
				(Rp)	(Rp)	
4	Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Untuk TA 2022 Alokasi Dana Desa Dianggarkan sebesar Rp125.640.000.000,00 atau sebesar 10,37% dari Dana Perimbangan yang dianggarkan akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.	1.211.069.683.680,00	10,37	125.640.000.000,00	125.603.352.750,00	99,97

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah :



- a. Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan kepada kepentingan publik.
- b. Pengalokasian belanja diupayakan agar adanya pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.
- c. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang.
- d. Alokasi belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat secara sinergis.
- e. Pengalokasian anggaran belanja langsung urusan (Program dan Kegiatan) efektif untuk memenuhi kebutuhan publik.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah apabila diperlukan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-TA berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui kebijakan penggunaannya yaitu:

- a. Penyertaan modal kepada PDAM Kuningan;
- b. Pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah aset daerah.

Dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan dua aplikasi pengelolaan keuangan daerah, serta beberapa aplikasi pendukung. Aplikasi tersebut ada yang bersifat wajib digunakan maupun yang bersifat pendamping.

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersifat wajib digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini digunakan dengan tujuan penggunaan satu aplikasi secara nasional yakni mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini wajib digunakan mulai dari Tahun 2021. Namun sejak awal penggunaan sampai dengan saat ini, aplikasi SIPD masih memerlukan penyempurnaan. Sehingga



penggunaan aplikasi SIPD tersebut menjadi tidak optimal dan malah menjadi salah satu penghambat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pada awal penggunaan SIPD, yaitu pada triwulan ke-4 Tahun 2020, untuk proses penginputan data perencanaan dan penganggaran TA 2021. Namun banyak kendala yang dihadapi antara lain, keterbatasan sosialisasi penggunaan SIPD yang tidak mendatangkan langsung tenaga ahli penyedia aplikasi. Selain itu belum lengkapnya kode kegiatan dan kode akun belanja yang menyebabkan banyaknya penganggaran belanja yang kurang sesuai dengan peruntukan belanja dimaksud, serta tidak adanya *helpdesk* dari pihak penyedia aplikasi. Sehingga hal tersebut membuat kurang lancarnya dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD TA 2021.

Kemudian pada awal pelaksanaan APBD TA 2021 yakni pada tahap penatausahaan SIPD tidak dapat digunakan dikarenakan untuk menu penatausahaan terdapat kekeliruan system (*error*). Salah satunya adalah tidak dapat menerbitkan SPP, SPM dan SP2D. Hal ini menyebabkan tertundanya pembayaran gaji bulan januari selama beberapa hari. Selain itu masih banyak menu lainnya pada aplikasi SIPD yang belum berfungsi. Sehingga atas keluhan tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan kebijakan bahwa aplikasi SIPD tidak digunakan sebagai aplikasi pengelolaan keuangan utama, tetapi bersifat perekaman. Atas dasar hal tersebut, maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan memutuskan menggunakan aplikasi lain untuk proses pengelolaan keuangan daerah yakni aplikasi SIPKD90. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIPKD yang telah digunakan sebelumnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, sehingga dinamakan SIPKD90.

Selanjutnya pada TA 2022, aplikasi SIPD yang disediakan oleh Kemendagri telah mengalami perbaikan menu dan dapat digunakan sebagai aplikasi utama. Namun meski demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti SIPD masih belum bisa menghasilkan SPJ Fungsional dan masih belum berfungsinya menu pelaporan. Sehingga pada TA 2022 SIPD digunakan hanya sampai dengan proses penatausahaan yakni sampai dengan terbitnya SP2D. Sedangkan untuk proses selanjutnya samapai dengan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan aplikasi SIPKD90.

Kelemahan lain dari aplikasi SIPD yakni belum bisa terintegrasi dengan aplikasi lain utamanya dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan. Sedangkan SIKD merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian Keuangan untuk menerima laporan realisasi bulanan dari pemerintah daerah yang dapat berimplikasi terhadap penyaluran DAU. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan aplikasi SIPKD90 untuk mengirimkan laporan realisasi bulanan secara terintegrasi ke SIKD.

Sampai dengan akhir Tahun 2022 dan sampai saat laporan keuangan TA 2022 dibuat, aplikasi SIPD belum dapat berfungsi secara utuh. Aplikasi SIPD hanya bisa menghasilkan output berupa SP2D, dan hal tersebut juga masih banyak hambatan-hambatan lain seperti jaringan *error* sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan SP2D. Untuk menu pelaporan sudah tersedia, tetapi nilai rerealisasinya



belum sesuai dengan input nilai belanja (SPJ). Selain itu belum adanya sosialisasi penggunaan menu pelaporan.

Aplikasi lain yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kuningan berkaitan dengan proses pengelolaan Keuangan daerah selain SIPKD90 antara lain Atisisbada yakni aplikasi pengelolaan aset, Simpad yaitu aplikasi Pendapatan, dan aplikasi retribusi, aplikasi barjas dan aplikasi lainnya.

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan

Kebijakan keuangan daerah dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk TA 2022 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 tanggal 29 Desember 2021, dan yang ke dua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 tanggal 20 Oktober 2022.

APBD TA 2022 telah dilakukan perubahan penjabaran sebanyak empat kali, yaitu dengan :

- a. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 pada tanggal 23 Maret 2022. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Kuningan mendapat penambahan pagu anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp103.799.094.289,00 dengan alokasi sebagai berikut:
 - a) Belanja Operasional mendapat penambahan Rp68.793.318.211,00;
 - b) Belanja Modal mendapat penambahan Rp30.681.789.000,00; dan
 - c) Belanja Tidak Terduga mendapat penambahan Rp4.323.987.078,00.
- b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 pada tanggal 20 April 2022. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan untuk mengalokasikan Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50% dari Belanja TPP per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 kepada Aparatur Negara Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari APBN.
- c. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 243 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 pada tanggal 23 Juni 2022. Hal ini dilakukan karena dalam rangka penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi. Alokasi perubahan APBD tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 pada Belanja Tidak Terduga.
- d. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 299 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 pada tanggal 8 September



2022. Hal ini dilakukan karena adanya penambahan penerimaan Batuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Daerah mendapat penambahan Rp11.516.301.632,00
- 2) Belanja Daerah mendapat penambahan Rp11.516.301.632,00
 - a) Belanja Operasional mendapat penambahan Rp4.630.088.575,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp2.203.207.984.441,00 menjadi 2.207.838.073.016,00; dan
 - b) Belanja Modal mendapat penambahan Rp6.886.213.057,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp338.027.577.090,00 menjadi Rp334.913.790.147,00.

Tabel 8
Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2022

Uraian	Perubahan APBD TA 2022 (Rp)				Bertambah/Berkurang	
	I	II	III	IV	(Rp.)	(%)
I. Pendapatan Daerah	2.788.706.485.727	2.788.706.485.727	2.788.706.485.727	2.978.249.493.326	189.543.007.599	6%
1.1 PAD	406.691.817.027	406.691.817.027	406.691.817.027	551.997.494.428	145.305.677.401	26%
1.2 Pendapatan Transfer	2.372.263.326.200	2.372.263.326.200	2.372.263.326.200	2.416.500.656.398	44.237.330.198	2%
1.3 Lain-lainnya Pendapatan yg Sah	9.751.342.500	9.751.342.500	9.751.342.500	9.751.342.500	0	0%
II. Belanja Daerah	2.766.706.485.727	2.766.706.485.727	2.766.706.485.727	3.022.516.285.984	255.809.800.257	8%
2.1 Belanja Operasi	1.979.251.303.141	1.981.249.019.141	1.981.749.019.141	2.230.207.984.441	248.458.965.300	11%
2.2 Belanja Modal	331.074.104.308	331.076.388.308	331.076.388.308	344.913.790.147	13.837.401.839	4%
2.3 Belanja Tidak Terduga	15.359.416.678	13.359.416.678	12.859.416.678	12.859.416.678	0	0%
2.4 Belanja Transfer	441.021.661.600	441.021.661.600	441.021.661.600	456.905.006.143	15.883.344.543	3%
Surplus/defisit	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	(44.266.792.658)	(66.266.792.658)	150%
III. Pembiayaan						
3.1 Penerimaan	0	0	0	65.266.792.658	65.266.792.658	100%
3.2 Pengeluaran	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	21.000.000.000	(1.000.000.000)	-5%
SILPA	(22.000.000.000)	(22.000.000.000)	(22.000.000.000)	44.266.792.658	66.266.792.658	150%

2.4 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Tahun 2022 merupakan tahun keempat implemetasi RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang mempunyai Visi “*Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*”. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah adalah upaya mewujudkan transparansi kebijakan pemerintah, menerapkan azas partisipasif dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sehingga akan mendukung pencapaian *Good Governance*. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan lima Misi, sebagai berikut:

- a. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI;
- b. Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu SAJATI Dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan;
- c. Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Nu SAJATI;



- d. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Rakyat; dan
- e. Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur untuk Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Lingkungan yang Lestari.

Upaya pencapaian Visi-Misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2022 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan 2021. Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2022 yaitu **“Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Desa”**, Tema pembangunan ini akan fokus kepada **Peningkatan Sektor Unggulan pada Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**. Pada Tahun 2022 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan enam program unggulan bupati yaitu:

- a. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan;
- b. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur;
- c. Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha;
- d. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama;
- e. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas; dan
- f. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL KABUPATEN KUNINGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada TA 2022, anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp2.978.249.493.326,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp551.997.494.428,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.416.500.656.398,00 dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp9.751.342.500,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp44.266.792.658,00) yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan selama Tahun 2022 dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			(Rp)	(%)
I. Pendapatan Daerah	2.978.249.493.326,00	2.679.667.713.075,66	(298.581.780.250,34)	89,97
1.1 PAD	551.997.494.42,00	346.599.936.096,66	(205.397.558.331,34)	62,79
1.2 Pendapatan Transfer	2.416.500.656.398,00	2.323.312.627.999,00	(93.188.028.399,00)	82,01
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yg Sah	9.751.342.500,00	9.755.148.980,00	3.806.480,00	100,04
II. Belanja Daerah	3.022.516.285.984,00	2.708.515.650.597,00	(314.000.635.388,00)	89,61
2.1 Belanja Operasi	2.207.838.073.016,00	2.010.061.509.032,00	(197.776.563.984,00)	91,04
2.2 Belanja Modal	344.913.790.147,00	229.856.933.449,00	(115.056.856.698,00)	66,64
2.3 Belanja Tidak Terduga	12.859.416.678,00	11.870.504.527,00	(1.078.912.151,00)	91,61
2.4 Belanja Transfer	456.905.006.143,00	456.726.703.588,00	(178.302.555,00)	99,96
Surplus/defisit	(44.266.792.658,00)	(28.847.937.520,34)	15.418.855.137,66	65,17
III. Pembiayaan	44.266.792.658,00	44.766.793.268,47	500.000.610,47	101,13
3.1 Penerimaan	65.266.792.658,00	65.266.792.658,47	0,47	100,00
3.2 Pengeluaran	21.000.000.000,00	20.499.999.390,00	(500.000.610,00)	97,62
SiLPA	-	15.918.855.748,13	15.918.855.748,13	

Tabel 9 diatas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.679.667.713.075,66 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp2.978.249.493.326,00 atau 89,97%. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Penerimaan PAD dari Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat dari Tabel 10 berikut.



Tabel 10
Perkembangan PAD TA 2018 s.d. 2022

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2018	344.430.878.110,00	(16,72%)	303.218.052.849,00	(21,18%)
2019	346.682.748.358,00	0,65%	346.682.748.358,00	14,33%
2020	330.335.349.311,00	(4,72%)	298.726.080.629,00	(13,83%)
2021	358.108.144.618,00	8,41%	343.864.589.959,00	15,11%
2022	551.997.494.428,00	54,14%	346.599.936.096,66	0,79%

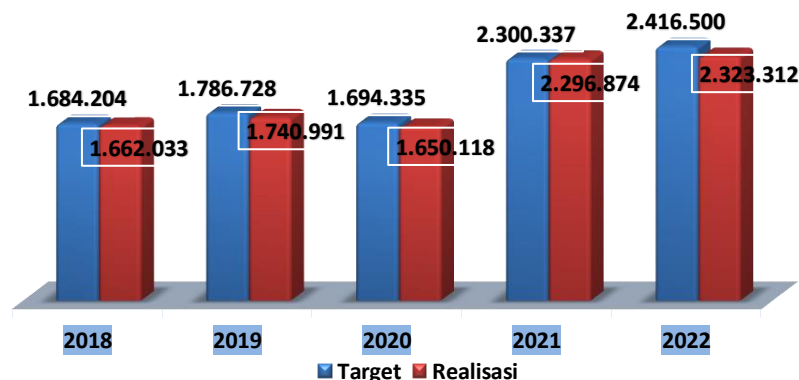
Dilihat dari Tabel 10 di atas, dari TA 2018 sampai dengan TA 2019 target PAD mengalami kenaikan. TA 2020 target mengalami penurunan. TA 2021 dan TA 2022 target PAD kembali mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi target anggaran yaitu: a) Dari TA 2018 dengan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.251.870.248,00 atau 0,65%. b) TA 2019 dengan TA 2020 mengalami penurunan yaitu Rp(16.347.399.047,00) atau (4,72)%. c) TA 2020 dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.772.795.307,00 atau 8,41%. d) TA 2021 dengan TA 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar Rp193.889.349.810 atau 54,14%.

Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp2.323.312.627.999,00 atau 96,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.416.500.656.398,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 11 dan Grafik 7 berikut.

Tabel 11
Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2018 – 2022

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2018	1.684.204.759.000,00	(1,97%)	1.662.033.402.705,00	(3,48%)
2019	1.786.728.667.812,00	6,09%	1.740.991.070.659,00	4,75%
2020	1.694.335.694.409,00	(5,17%)	1.650.118.409.167,00	(5,22%)
2021	2.300.337.771.809,00	35,77%	2.296.874.103.593,00	39,19%
2022	2.416.500.656.398,00	5,05%	2.323.312.627.999,00	1,15%

Grafik 7
Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2018 – 2022





Dilihat dari Tabel 11 dan Grafik 7 di atas, dari TA 2018 sampai dengan TA 2019 target Pendapatan Transfer mengalami kenaikan target. TA 2020 target mengalami penurunan dan TA 2021 target Pendapatan Transfer kembali mengalami kenaikan yang cukup besar. Begitu pula di sisi realisasi yang mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, yaitu: a). TA 2018 dengan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp102.703.908.812,00 atau 6,09%. b). TA 2019 dengan TA 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(92.392973403,00) atau (5,17)%. c). TA 2020 dengan TA 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp606.002.077.400,00 atau 35,77%. d). TA 2021 dengan TA 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp116.162.884.589 atau 5,05%. Selain itu, dilihat dari sisi realisasi kenaikan yang terjadi pada TA 2021 dengan TA 2022 sebesar Rp26.438.524.406,00 atau 1,15%.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp9.751.342.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp9.755.148.980,00 atau 100,04%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

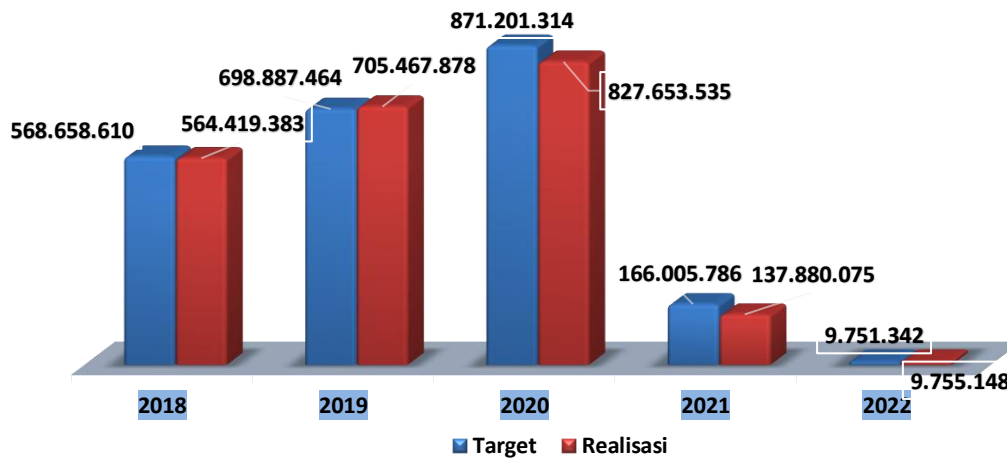
Adapun Tabel Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 12
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2018 - 2022

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2018	568.658.610.787,00	10,30%	564.419.383.249,00	10,58%
2019	698.887.464.777,00	22,90%	705.467.878.355,00	24,99%
2020	871.201.314.237,00	24,66%	827.653.535.245,00	17,32%
2021	166.005.786.007,00	(80,95)%	137.880.075.200,00	(83,34)%
2022	9.751.342.500,00	(94,12)%	9.755.148.890,00	(92,92)%



Grafik 8
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
TA 2018 - 2022



Berdasarkan Tabel 12 dan Grafik 8 diatas untuk perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk TA 2022 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021, yaitu berkurang sebesar Rp156.254.443.507,00 atau (94,12)%. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan uraian sesuai dengan peraturan yang terbaru, pada Tahun 2022 Lain-Lain Pendapatan yang Sah hanya Pendapatan Hibah .

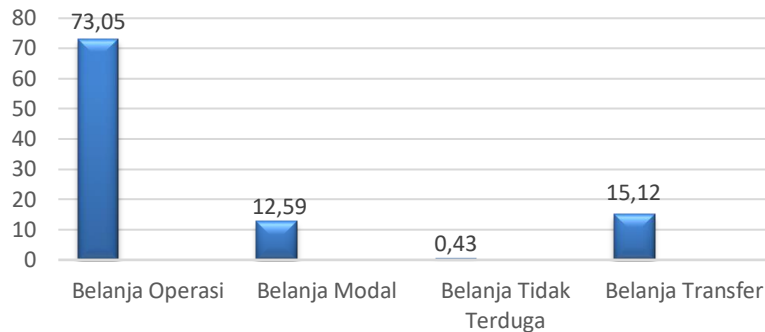
Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2022 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp3.022.516.285.984,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.708.515.650.596,00 atau 89,61%, sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Daerah sebesar Rp(314.000.635.388,00) atau (10,39)%.

Tabel 13
Proporsi Belanja Daerah

Uraian		Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja Daerah		3.022.516.285.984,00	100,00%
I.	Belanja Operasi	2.207.838.073.016,00	73,05%
II.	Belanja Modal	344.913.790.147,00	12,59%
III.	Belanja Tidak Terduga	12.859.416.678,00	0,43%
IV.	Belanja Transfer	456.905.006.143,00	15,12%



Grafik 9
Proporsi Belanja Daerah



Berdasarkan Tabel 13 dan Grafik 9 di atas tampak bahwa Belanja Operasi mendapat alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, yaitu sebesar 73,05% dari total APBD Tahun Anggaran 2022.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.207.838.073.016,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp2.010.061.509.032,00 atau 91,04%. Anggaran Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.223.313.064.002,00	1.146.569.988.635,00	93,73
2	Belanja Barang dan Jasa	894.406.251.764,00	787.351.371.791,00	88,03
3	Belanja Subsidi	1.444.650.000,00	1.408.740.156,00	97,51
4	Belanja Hibah	72.122.915.250,00	66.576.805.450,00	92,31
5	Belanja Bantuan Sosial	16.551.192.000,00	8.154.603.000,00	49,27
	Jumlah	2.207.838.073.016,00	2.010.061.509.032,00	91,04

Belanja Modal diperuntukan membiayai pelaksanaan kegiatan dan program pada TA 2022. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp344.913.790.147,00 dan realisasi sebesar Rp229.856.933.449,00 atau 66,64%, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	33.878.900.000,00	26.751.824.467,00	78,96
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.190.912.610,00	49.977.556.706,00	60,08
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.815.171.178,00	66.623.156.876,00	84,53
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.151.608.654,00	79.711.956.467,00	66,34
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.877.197.705,00	6.792.438.933,00	23,52
	Jumlah	344.913.790.147,00	229.856.933.449,00	66,64

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp12.859.416.678,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp11.870.504.527,00 atau 92,31%.



Tabel 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	12.859.416.678,00	11.870.504.527,00	92,31
	Jumlah	12.859.416.678,00	11.870.504.527,00	92,31

Belanja Transfer diperuntukan membiayai pelaksanaan kegiatan dan program pada TA 2022. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp456.905.006.143,00 dan realisasi sebesar Rp456.726.703.588,00 atau 99,96%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	16.063.298.143,00	15.921.642.838,00	99,12
2	Belanja Bantuan Keuangan	440.841.708.000,00	440.805.060.750,00	99,99
	Jumlah	456.905.006.143,00	456.726.703.588,00	99,96

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp65.266.792.658,00 dapat direalisasikan sebesar Rp65.266.792.658,47 atau 100%. Sedangkan, anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp21.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp20.499.999.390,00 atau 97,62%.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2022, yaitu:

- Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan, dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya; dan
- Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan, faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dalam menyusun analisis beban kerja dan target SKPD;
- Kualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur belum memadai;
- Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal; dan
- Belum optimalnya pengelolaan aset.



BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, kegiatan merupakan representasi dan peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada TA 2022, alokasi Belanja Daerah tersebar untuk menunjang pelaksanaan urusan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.022.516.285.984,00 dan realisasi sebesar Rp2.708.515.650.596,00. Tabel 18 dibawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan, yaitu:

Tabel 18
Alokasi Belanja Daerah Per Urusan TA 2022

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah(Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
I	PELAYANAN UMUM	788.658.313.006	776.555.234.155	(12.103.078.851)	98,47
1	Kearsipan	4.623.552.965	4.547.232.357	(76.320.608)	98,35
2	Komunikasi Dan Informatika	12.419.747.702	11.283.673.411	(1.136.074.291)	90,85
3	Perencanaan Pembangunan	11.358.511.864	11.219.260.061	(139.251.803)	98,77
4	Keuangan	513.576.737.321	510.877.427.544	(2.699.309.777)	99,47
5	Kepegawaian	13.693.226.799	12.755.509.276	(937.717.523)	93,15
6	Sekretariat Daerah	67.997.105.438	63.975.763.436	(4.021.245.597)	94,09
7	Sekretariat DPRD	63.649.472.747	63.054.314.134	(595.158.613)	99,06
8	Inspektorat	15.160.738.020	14.964.261.826	(196.476.194)	98,70
9	Kewilayahan	86.179.220.150	83.877.695.705	(2.301.524.445)	97,33
II	KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN	34.776.214.925	34.595.054.256	(181.160.669)	99,48
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Ketenteraman, Ketertiban	13.025.183.769	12.879.611.422	(145.572.347)	98,88
2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.751.031.156	21.715.442.834	(35.588.322)	99,84
III	EKONOMI	138.280.383.498	127.163.988.411	(11.116.395.087)	91,96
1	Perhubungan	29.904.118.936	27.275.859.841	(2.628.259.095)	91,21
2	Tenaga Kerja	10.455.480.659	10.252.657.987	(202.822.672)	98,06
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.431.807.696	16.891.674.372	(2.340.133.324)	87,30



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah(Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
4	Penanaman Modal	8.161.278.900	8.028.294.461	(132.984.439)	98,37
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.334.939.744	21.732.717.453	(1.602.222.291)	93,13
6	Pertanian	31.248.526.000	27.866.908.761	(3.381.617.239)	89,18
7	Kelautan dan Perikanan	11.034.231.563	10.638.194.540	(396.037.023)	96,41
8	Perdagangan	4.605.000.000	4.173.688.996	(431.311.004)	90,63
9	Perindustrian	1.005.000.000	1.003.992.000	(1.008.000)	99,90
10	Transmigrasi	100.000.000	100.000.000	-	100,00
IV	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	57.444.314.443	49.440.947.307	(8.003.367.136)	86,07
1	Lingkungan Hidup	20.829.324.443	20.353.447.240	(475.877.203)	97,72
2	Pertanahan	36.614.990.000	29.087.500.067	(7.527.489.933)	79,44
V	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	283.725.864.934	211.304.349.943	(72.421.514.991)	74,47
1	Pekerjaan Umum	223.164.629.046	165.227.461.190	(57.937.167.856)	74,04
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.561.235.888	46.076.888.753	(14.484.347.135)	76,08
VI	KESEHATAN	543.354.263.948	427.318.582.535	(116.035.681.413)	78,64
1	Kesehatan	517.209.205.670	404.811.615.137	(112.397.590.533)	78,27
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.145.058.278	22.506.967.397	(3.638.090.881)	86,08
VII	PARIWISATA	12.895.000.150	11.607.964.266	(1.287.035.884)	90,02
1	Kebudayaan	2.820.000.000	2.745.473.550	(74.526.450)	97,36
2	Pariwisata	10.075.000.150	8.862.490.716	(1.212.509.434)	87,97
VIII	PENDIDIKAN	1.101.392.821.028	1.011.174.587.252	(90.218.233.776)	91,81
1	Pendidikan	1.072.203.983.586	983.244.617.000	(88.959.366.586)	91,70
2	Kepemudaan dan Olah Raga	28.197.362.442	27.011.164.312	(1.186.198.130)	95,79
3	Perpustakaan	991.475.000	918.805.940	(72.669.060)	92,67
IX	PERLINDUNGAN SOSIAL	60.449.110.052	57.871.683.877	(2.577.426.175)	95,74
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.045.573.511	9.408.075.040	(637.498.471)	93,65
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.150.000.000	1.150.000.000	0	100,00
3	Sosial	10.681.224.155	10.583.662.367	(97.561.788)	99,09
4	Pangan	33.141.250.444	31.584.484.337	(1.556.766.107)	95,30
5	BPBD	5.431.061.942	5.145.462.133	(285.599.809)	94,74
	JUMLAH	3.022.516.285.984	2.708.515.650.597	(314.000.635.387)	89,61



Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, sekolah, dan puskesmas), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya mebeulair dan alat kantor (termasuk sekolah), penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum, dan rehabilitasi taman.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terhadap beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. Penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja; dan
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten.

Disamping adanya faktor-faktor pendukung, tentunya terdapat juga faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja program, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas belum maksimal;
- c. Kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; dan
- d. Lemahnya tingkat koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait.



BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas akuntansi menjadi laporan keuangan daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

5.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, basis akuntansi adalah basis akrual.

Basis Akruwal artinya pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sedangkan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Artinya pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

A. PENDAPATAN

1) Pendapatan – LO

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan Pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat *variabel* terhadap Pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO untuk PPKD dan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO Non Operasional berasal dari surplus dari kegiatan non operasional seperti penjualan asset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang dan kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan-LO Luar Biasa adalah pendapatan yang bukan berasal dari tugas pokok dan fungsi atau operasi biasa, tidak diperkirakan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh dari entitas bersangkutan.

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(2) Pendapatan Transfer

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan-LO saat diterimanya kas pada RKUD.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan Pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi enam, yaitu :

(1) Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

(2) Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap



nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.

- (3) Kelompok Pendapatan Retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan Retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima baik dengan SK Retribusi (*official assessment*) maupun tidak (*realized*).
- (4) Kelompok Pendapatan Retribusi yang didahului oleh penerbitan SK Retribusi Daerah (SKR Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi yang bersangkutan. Pendapatan Retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.
- (5) Kelompok hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai Pendapatan. Pengakuan Pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- (6) Kelompok Pendapatan yang tidak melalui Transfer langsung ke RKUD yang terdiri atas:
 - (a) Dana Kapitasi JKN diakui berdasarkan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (b) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diakui berdasarkan Surat Pengesahan Telah Menerima Hibah (SPTMH) dari Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi pendapatan hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (c) Pendapatan Bunga/Jasa Giro dari pengelolaan Dana BOS diakui setelah diterima di RKUD.
 - (d) Dana BLUD diakui Pendapatan-LO BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (e) Penerimaan lainnya yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD diakui berdasarkan SP2B dari BUD yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.

2) Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Pendapatan diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan telah diterima di RKUD;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Diantaranya Dana Kapitasi, Dana BOS dan penerimaan lainnya yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD diakui pada saat terbit SP2B dari BUD dan/atau SPB bagi Kepala Satuan Pendidikan Negeri. Sementara untuk Pendapatan LRA BLUD diakui berdasarkan SP2BP.
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA:

- a) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu Pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan Belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan tersebut.
- c) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

B. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

1) Pengakuan Beban pada PPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan Biaya Denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) Beban Hibah



Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD dan/atau BAST karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir TA terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

a) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti Honorarium Non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti Beban Gaji dan Tunjangan.

Beban Pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, Beban Pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).



Beban Pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal bukti pembayaran honor) telah disahkan Pengguna Anggaran.

b) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau BAST ditandatangani. Dalam hal, pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Pengakuan beban atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS, dan Dana Hibah lainnya yang tidak melalui pengelolaan APBD adalah pada saat inventarisasi beban tersebut dan pada tanggal pelaporan, yaitu ketika diterbitkan :

- (1) SP2B atas penggunaan Dana JKN;
- (2) SPB atas penggunaan Dana BOS; dan/atau
- (3) SP2BP atas penggunaan Dana BLUD.

c) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan dicatat sebagai pemakaian persediaan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam metode periodik, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan menggunakan jumlah satuan kuantitas akhir dengan pendekatan ke bawah (sesuai yang diatur dalam standar harga/biaya per jenis persediaan) dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan yaitu harga pembelian terakhir.

C. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

1) **Pengakuan Belanja**

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, dan atau pada saat diterbitkan SP2D;
- b) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.



- c) Pengakuan Belanja atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS, dan Dana Hibah lainnya yang tidak melalui pengelolaan APBD adalah pada saat inventarisasi belanja tersebut dan pada tanggal pelaporan, yaitu ketika diterbitkan SP2B dan/atau SPB oleh BUD, termasuk dokumen pertanggungjawaban BLUD untuk pengakuan belanja BLUD.
- 2) Pengukuran Belanja
 - a) Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - b) Pengukuran Beban dan Belanja atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS dan transaksi penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD berdasarkan jumlah uang yang keluar dari rekening entitas penerima dana yang tertera di SP2B serta dokumen pertanggungjawaban BLUD untuk pengukuran beban dan belanja atas penggunaan Dana BLUD.

Belanja, baik berupa barang dan/atau jasa dinilai sebesar nilai tercatat pada tanggal transaksi dan disajikan pada laporan realisasi anggaran serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja atas Dana BLUD, Dana JKN, Dana BOS dan transaksi penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD masuk kedalam masing-masing kategori Belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal.

D. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah daerah, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

1) Pengakuan Transfer

Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari RKUD.

2) Pengukuran Transfer

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

F. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar yaitu:



1) Aset lancar

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Sedangkan Aset Nonlancar mencakup Aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintahan Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a) Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya. Termasuk dalam kategori kas adalah Setara Kas yang merupakan investasi yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari tiga bulan tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki tiga bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

c) Piutang

Piutang diakui saat:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- (1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- (2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Klasifikasi piutang terdiri atas:

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (4) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (5) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (6) Piutang Dana Alokasi Umum;
- (7) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD;
- (8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- (9) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; dan
- (10) Piutang Lainnya.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang Berdasarkan Pungutan



- (2) Piutang Berdasarkan Perikatan
- (3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai Penyisihan Piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

Berikut adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya:

Kualifikasi	Pajak Daerah		Piutang Retribusi	Selain Pajak dan Retribusi
	Self Assessment	Official Assessment		
Kualitas Lancar	umur piutang \leq 1 tahun	umur piutang \leq 1 tahun	umur piutang 0 - 1 bulan	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
Kualitas Kurang Lancar	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 3 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Diragukan	umur piutang $>$ 2 - 5 tahun	umur piutang $>$ 2 - 5 tahun	umur piutang 3 - 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Macet	umur piutang $>$ 5 tahun	umur piutang $>$ 5 tahun	umur piutang $>$ 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Besarnya persentase Penyisihan Piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 16
Persentase Piutang Tertagih

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Penyisihan Piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.



Tabel 17
Kebijakan Persentasi Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	0.5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	0.5%	10%	50%	100%
3	Piutang Lainnya	0.5%	10%	50%	100%

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Penghapusan Piutang dikenal dengan dua cara yaitu Penghapusan Bersyarat dan Penghapusan Mutlak. Penghapusan secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*). Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

d) Akuntansi Beban Dibayar di muka

Beban dan/atau Belanja diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan Beban dan/atau Belanja, dimana pengakuan Beban dan/atau Belanja dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan Beban dan/atau Belanja dapat dilakukan pada saat Barang atau Jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat Barang atau Jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban dan/atau Belanja. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

e) Persediaan

Persediaan mencakup:

- (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tidak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



- (2) barang dana jasa yang akan diserahkan/dijual ke masyarakat/pihak lain. Penilaian persediaan menggunakan metoda harga pembelian terakhir.

Pengakuan:

Persediaan diakui

- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Dalam metode periodik, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk memiliki secara tidak berkelanjutan. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Investasi non permanen pemerintah daerah dicatat dalam neraca menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penyertaan Modal Pemerintah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca menggunakan metode biaya dan metode ekuitas.

c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap dicatat dengan nilai historis.

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



- (2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut:

Tabel 18
Besaran Biaya Perolehan Aset

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, kegiatan detail engineering desain (DED)
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

d) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

e) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat.

f) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

3) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam



waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat. Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b) Kewajiban Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
- c) Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d) Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian.
- e) *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
- f) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga merupakan kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

- a) Kewajiban Kepada Pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.



BAB VI PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada Laporan Keuangan didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2022.

6.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

6.1.1 PENDAPATAN – LRA

Pada TA 2022 Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD-P sebesar Rp2.978.249.493.326,00 dan direalisasi sebesar Rp2.679.667.713.075,66, atau hanya mencapai 89,97% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Lebih (Kurang) (Rp)	
			Rp	%	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	551.997.494.428,00	346.599.936.096,66	62,79	(205.397.558.331,34)	(37,21)
2	Pendapatan Transfer	2.416.500.656.398,00	2.323.312.627.999,00	96,14	(93.188.028.399,00)	(3,86)
3	Pendapatan Lain-lain	9.751.342.500,00	9.755.148.980,00	100,04	3.806.480,00	0,04
	Jumlah Pendapatan	2.978.249.493.326,00	2.679.667.713.075,66	89,97	(298.581.780.250,34)	(10,03)

Adapun perbandingan Pendapatan TA 2022 dengan TA 2021 terlihat dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	346.599.936.096,66	343.864.589.959,00	2.735.346.137,66	0,80
2	Pendapatan Transfer	2.323.312.627.999,00	2.296.874.103.593,00	26.438.524.406,00	1,15
3	Pendapatan Lain-lain	9.755.148.980,00	137.880.075.200,00	(128.124.926.220,00)	(92,92)
	Jumlah Pendapatan	2.679.667.713.075,66	2.778.618.768.752,00	(98.951.055.676,34)	(3,56)

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp2.679.667.713.075,66, lebih kecil sebesar Rp98.951.055.676,34 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.778.618.768.752,00.

6.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2022 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Lebih (Kurang)	
			Rp	%	Rp	%
1	Pajak Daerah–LRA	131.304.000.000,00	107.678.513.745,00	82,01	(23.625.486.255,00)	(17,99)
2	Retribusi Daerah– LRA	175.799.157.404,00	77.253.777.415,66	43,94	(98.545.379.988,34)	(56,06)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	6.363.701.269,00	7.138.783.168,00	112,18	775.081.899,00	12,18



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Lebih (Kurang)	
			Rp	%	Rp	%
	dipisahkan – LRA					
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	238.530.635.755,00	154.528.861.768,00	64,78	(84.001.773.987,00)	(35,22)
	Jumlah PAD :	551.997.494.428,00	346.599.936.096,66	62,79	(205.397.558.331,34)	(37,21)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dianggarkan dalam APBD-P sebesar Rp551.997.494.428,00, dengan realisasi sebesar Rp346.599.936.096,66 atau hanya mencapai 62,79% dari anggaran. Berdasarkan rincian PAD, hanya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang bisa mencapai target lebih dari 100%.

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1	Pajak Daerah	107.678.513.745,00	92.331.986.827,00	15.346.526.918,00	16,62
2	Retribusi Daerah	77.253.777.415,66	68.297.563.893,00	8.956.213.522,66	13,11
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7.138.783.168,00	5.907.864.248,00	1.230.918.920,00	20,84
4	Lain-lain PAD Yang Sah	154.528.861.768,00	177.327.174.991,00	(22.798.313.223,00)	(12,86)
	Jumlah PAD	346.599.936.096,66	343.864.589.959,00	2.735.346.137,66	0,80

Namun bila dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2021, maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.735.346.137,66 atau sebesar 0,80%. Kenaikan tertinggi yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar 20,84%.

6.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Hotel – LRA	4.136.000.000,00	4.243.232.654,00	102,59	3.314.063.046,00
2	Pajak Restoran – LRA	9.950.000.000,00	11.397.453.588,00	114,55	10.071.424.622,00
3	Pajak Hiburan – LRA	1.400.000.000,00	1.489.411.240,00	106,39	845.337.660,00
4	Pajak Reklame – LRA	3.250.000.000,00	3.317.865.342,00	102,09	3.412.040.902,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	26.850.000.000,00	28.227.793.411,00	105,13	22.705.802.401,00
6	Pajak Parkir – LRA	418.000.000,00	429.620.274,00	102,78	349.076.257,00
7	Pajak Air Tanah – LRA	800.000.000,00	179.534.344,00	22,44	502.500.385,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	31.000.000.000,00	2.338.240.000,00	7,54	3.251.264.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan– LRA	34.900.000.000,00	35.092.436.321,00	100,55	32.236.992.364,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	18.600.000.000,00	20.962.926.571,00	112,70	15.643.485.190,00
	Jumlah	131.304.000.000,00	107.678.513.745,00	82,01	92.331.986.827,00

Berdasarkan tabel rincian diatas, Pajak Daerah dianggarkan APBD-P sebesar Rp131.304.000.000, dengan realisasi sebesar Rp107.678.513.745,00 atau 82,01%.



Hampir seluruh akun pajak melampaui target pendapatan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi Pajak Restoran sebesar 114,55% atau melebihi target sebesar Rp1.447.453.588,00. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi terbesar peningkatan realisasi Pajak Daerah adalah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp35.092.436.321,00.

Dari seluruh akun Pajak Daerah, terdapat dua akun yang tidak mencapai target APBD-P TA 2022, yaitu Pajak Air Tanah sebesar 22,44% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 7,54%. Penurunan Pajak Air Tanah disebabkan sedikitnya pembuatan sumur artesis. Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurun disebabkan berkurangnya titik galian pasir di wilayah Kabupaten Kuningan. Tidak tercapainya akun pajak ini pun menyebabkan rata-rata keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah hanya mencapai 82,01%.

Apabila dibandingkan dengan TA 2021, Pajak Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp15.346.526.918,00 (Rp107.678.513.745,00 - Rp92.331.986.827,00) atau 16,62%. Kenaikan tertinggi dialami oleh Pajak Hiburan sebesar 76,19% atau Rp644.073.580,00 (Rp1.489.411.240,00 - Rp845.337.660,00) dari realisasi TA 2021. Peningkatan pendapatan Pajak Daerah menunjukkan mulai adanya peningkatan perekonomian di Kabupaten Kuningan pasca pandemi Covid-19.

6.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah di setorkan ke Kas Daerah selama TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Umum	90.463.293.301,00	54.603.473.381,66	60,36	59.759.070.407,00
2	Retribusi Jasa Usaha	80.152.077.605,00	17.987.373.496,00	22,44	5.893.237.686,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.183.786.498,00	4.662.930.538,00	89,95	2.645.255.800,00
	Jumlah	175.799.157.404,00	77.253.777.415,66	43,94	68.297.563.893,00

Dari tiga jenis retribusi, hanya retribusi Perizinan Tertentu yang memperoleh capaian target tertinggi yaitu 89,95% atau senilai Rp4.662.930.538,00 dari APBD-P. Namun nilai tersebut belum dapat mendongkrak nilai pencapaian retribusi secara keseluruhan. Hal tersebut karena dua jenis retribusi lainnya memiliki target APBD-P cukup tinggi, namun pencapaian realisasinya masih sangat rendah. Retribusi Jasa Umum capaian sebesar 60,34% dari APBD-P. Penyebabnya adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya mencapai 20,37% dari APBD-P. Realisasi retribusi yang terendah adalah Retribusi Jasa Usaha, yang hanya mencapai sebesar 22,53% dari APBD-P. Penyebabnya dua retribusi dalam kategori Retribusi Jasa Usaha capaian masih dibawah 30%, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 21,96% dari APBD-P dan Retribusi Terminal yang mencapai 29,54% dari APBD-P.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Rp	%	Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	86.720.224.655,00	51.735.470.931,66	59,66	56.606.460.907,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	661.525.734,00	491.105.000,00	74,24	401.859.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	835.090.312,00	170.125.000,00	20,37	502.090.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	514.940.100,00	490.223.450,00	95,20	467.858.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	671.000.000,00	629.505.000,00	93,82	652.270.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.312.500,00	13.350.000,00	100,28	10.590.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.021.680.000,00	102,17	1.062.584.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	39.325.000,00	44.104.000,00	112,15	54.028.000,00
9	Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.875.000,00	7.910.000,00	100,44	1.330.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.762.387.700,00	17.300.096.496,00	21,96	5.463.729.886,00
11	Retribusi Terminal	396.025.000,00	116.985.000,00	29,54	120.300.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	301.500.000,00	-	-	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.285.037,00	28.894.000,00	68,33	27.921.500,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	585.270.044,00	504.051.000,00	86,12	238.975.300,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	64.609.824,00	37.347.000,00	57,80	42.311.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000.000,00	4.599.195.038,00	91,98	2.578.423.300,00
17	Retribusi Izin Trayek	183.786.498,00	63.735.500,00	34,68	66.832.500,00
	Jumlah	175.799.157.404,00	77.253.777.415,66	43,94	68.297.563.893,00

Dari 17 jenis retribusi yang dikelola pada TA 2022, terdapat empat jenis retribusi melebihi 100% capaian dari APBD-P. Adapun pelampauan realisasi tertinggi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 112,15%. Sedangkan pencapaian terendah dari anggaran adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 20,37%. Namun secara nilai, pendapatan retribusi tertinggi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp51.735.470.931,66, dengan persentase capaian 59,66%.

6.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 berasal dari Pendapatan Deviden dari BUMD, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Bank Kuningan	1.465.837.305,00	1.798.805.815,00	122,72	1.210.963.389,00
2	PDAM Tirta Kamuning	2.147.863.964,00	2.303.036.047,00	107,22	1.939.865.548,00
3	Bank Jabar	2.750.000.000,00	3.036.941.306,00	110,43	2.757.035.311,00
	Jumlah	6.363.701.269,00	7.138.783.168,00	112,18	5.907.864.248,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 seluruhnya mencapai anggaran APBD-P. Secara nilai, pencapaian target



tertinggi yaitu dari penerimaan deviden dari Bank Jabar. Selain ketiga BUMD tersebut, terdapat dua BUMD lainnya yaitu PDAU Darma Putra Kerta Raharja dan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kuningan yang belum memberikan kontribusi pada TA 2022. PDAU Darma Putra Kerta Raharja pada TA 2021 mengalami restrukturisasi internal. Pada TA 2022, PDAU Darma Putra Kerta Raharja sudah beroperasi kembali, namun belum dapat memberikan kontribusi. PT LKM Kuningan sejak TA 2020 mengalami kerugian akibat adanya kredit macet sebagai dampak pandemi Covid-19.

6.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada TA 2022, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan	969.277.912,00	321.358.287,00	33,15	297.213.100,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	13.350.000.000,00	6.703.873.334,00	50,22	4.088.559.686,00
2	Penerimaan Jasa Giro	35.000.000.000,00	1.907.392.832,00	5,45	3.115.908.758,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.466.250,00	236.124.800,00	1.753,46	3.543.024.480,00
4	Pendapatan Denda Pajak	76.049.637,00	205.807.320,00	270,62	365.578.532,00
5	Pendapatan Denda Retribusi	13.241.750,00	23.790.167,00	179,66	10.559.288,00
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (BLUD)	147.118.107.767,00	109.526.163.026,00	74,45	128.427.713.548,00
7	Dana Kapitasi FKTP JKN	40.381.742.439,00	33.849.425.649,00	83,82	37.478.617.599,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.608.750.000,00	1.754.926.353,00	109,09	-
	Jumlah	238.530.635.755,00	154.528.861.768,00	64,78	177.327.174.991,00

Pada TA 2022, Pencapaian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah mencapai 64,78% atau senilai Rp154.528.861.768,00 dari APBD-P. Penyebab utama kecilnya capaian adalah Penerimaan jasa Giro yang ditergetkan dalam APBD-P sebesar Rp35.000.000.000,00. namun realisasi hanya sebesar Rp1.907.392.832,00 atau 5,54% dari APBD-P. Hal ini dikarenakan dana yang ada pada rekening di Kas Daerah maupun rekening di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak mengalami pengendapan. Sehingga dengan arus kas yang tinggi tersebut tidak memberikan Jasa Giro atas rekening.

Capaian persentase realisasi Lain-Lain PAD yang Sah terbesar adalah pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, yaitu 1.753,46% dari APBD-P. Dilihat dari nilai realisasi, Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dalam hal ini adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan memberikan kontribusi sebesar Rp109.526.163.026,00. Apabila dibandingkan dengan capaian TA 2021, Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.798.313.223,00 (Rp154.528.861.768,00 - Rp177.327.174.991,00) atau (12,86%) dari APBD-P.



6.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer pada TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Rp	%	Rp
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.162.201.846.287,00	2.072.355.555.913,00	95,84	2.024.757.150.132,00
2	Transfer Pemerintah Daerah	254.298.810.111,00	250.957.072.086,00	98,69	272.116.953.461,00
	Jumlah	2.416.500.656.398,00	2.323.312.627.999,00	96,14	2.296.874.103.593,00

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer mencapai target APBD-P sebesar 96,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021, maka terjadi kenaikan sebesar Rp26.438.524.406,00 (Rp2.296.874.103.593,00 - Rp2.323.312.627.999,00) atau 1,15%. Kenaikan tersebut diperoleh dari kenaikan Pendapatan Transfer Pusat.

6.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
I	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	98.952.746.680,00	83.910.077.498,00	84,80	103.481.878.167,00
	PBB	10.786.294.298,00	7.855.720.733,00	72,83	10.978.148.084,00
	PPh orang pribadi	37.951.556.538,00	32.197.016.415,00	84,84	38.121.638.107,00
	DBHCHT	6.562.883.047,00	6.237.564.434,00	95,04	6.382.095.882,00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	371.598.364,00	325.471.212,00	87,59	370.004.585,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100	1.674.500.150,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	12.461.302.271,00	13.278.723.953,00	106,56	3.490.313.900,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	-	-	-	192.486.100,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	27.463.183.647,00	20.613.333.652,00	75,06	41.471.203.341,00
	SDA Mineral dan Batubara – Royalti	1.397.617.515,00	1.443.936.099,00	103,31	801.488.018,00
2	Dana Alokasi Umum	1.112.116.937.000,00	1.107.697.897.206,00	99,60	1.111.944.421.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	146.756.320.607,00	132.248.120.897,00	90,11	141.047.318.368,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	489.174.134.000,00	433.297.752.312,00	88,58	337.434.683.597,00
	Dana Perimbangan	1.847.000.138.287,00	1.757.153.847.913,00	95,14	1.693.908.301.132,00
II	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	25.819.515.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
2	Dana Desa	315.201.708.000,00	315.201.708.000,00	100,00	305.029.334.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	315.201.708.000,00	315.201.708.000,00	100,00	330.848.849.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 95,14% dari APBD-P. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada TA 2021, terjadi kenaikan sebesar Rp37.426.031.781,00 atau 2,18%. Untuk TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tertinggi yaitu dari DBH Bukan Pajak/SDA Pertambangan Minyak Bumi yang mencapai realisasi sebesar 106,56% dari APBD-P.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan termasuk pendapatan yang disalurkan tidak melalui Kas Daerah, yaitu DAK Non Fisik BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Dana tersebut disalurkan langsung ke SD dan SMP serta kelompok belajar. Pada TA 2021, pendapatan ini anggaran pada Lain-Lain Pendapatan yang sah. Sedangkan untuk TA 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021, pendapatan tersebut dianggarkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berupa DAK Non Fisik.

Selain itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan lainnya yang tidak melalui Kas Daerah adalah Dana Desa. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang langsung diterima pada rekening Kas Desa.

6.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Untuk realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
I	Bagi Hasil Pajak	145.885.226.479,00	143.009.228.224,00	98,03	124.614.494.617,00
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	35.350.712.040,00	37.823.680.243,00	107,00	32.088.612.000,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.883.814.540,00	17.397.949.020,00	92,13	16.637.635.020,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.286.033.380,00	28.584.071.117,00	94,38	24.246.485.150,00
4	Dana Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.345.915.550,00	1.259.849.650,00	93,61	1.034.389.950,00
5	Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	60.018.750.969,00	57.943.678.194,00	96,54	50.607.372.497,00
6	Kurang/Lebih Salur Pajak Daerah Per 31 Desember 2016	-	-	-	-
II	Bantuan Keuangan				
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	108.413.583.632,00	107.947.843.862,00	99,57	147.502.458.844,00
	Jumlah	254.298.810.111,00	250.957.072.086,00	98,69	272.116.953.461,00



Pada TA 2022, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 98,03% dari APBD-P. Realisasi tertinggi yaitu Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp37.823.680.243,00 atau sebesar 107,00% APBD-P.

6.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Pendapatan Hibah	9.751.342.500,00	9.755.148.980,00	100,04	9.205.007.200,00	550.141.780,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	128.675.068.000,00	(128.675.068.000,00)
	Jumlah	9.751.342.500,00	9.755.148.980,00	100,04	137.880.075.200,00	(128.124.926.220,00)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp9.755.148.980,00, atau 100,04% dari APBD-P. Jika dibandingkan dengan TA 2021 terdapat penurunan sebesar (Rp128.124.926.220,00). Penyebabnya adalah sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021, Pendapatan Hibah BOS pada TA 2022 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berupa DAK Non Fisik.

6.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Hibah Air minum Perkotaan dan Perdesaan	5.700.000.000,00	5.166.000.000,00	90,63	5.266.778.850,00	(100.778.850,00)
2	Hibah Sanitasi	-	-	-	822.000.000,00	(822.000.000,00)
3	Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP)	4.051.342.500,00	4.589.148.980,00	113,27	3.116.228.350,00	1.472.920.630,00
	Jumlah	9.751.342.500,00	9.755.148.980,00	100,04	9.205.007.200,00	550.141.780,00

Pendapatan Hibah TA 2022 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp9.755.148.980,00 atau 100,04% dari APBD-P. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Hibah Air minum Perkotaan dan Perdesaan, Hibah Sanitasi dan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

6.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 tidak terdapat penganggaran maupun realisasi. Berbeda



dengan TA 2021 yang terdapat realisasi berupa Dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
	Dana BOS				128.675.068.000,00
1	BOS Reguler Tahun 2021	-	-	-	127.895.068.000,00
2	Dana BOS Afirmasi/ Kinerja Satdik SD & SMP Negeri	-	-	-	780.000.000,00
	Jumlah	-	-	-	128.675.068.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 adalah nihil, dikarenakan Dana BOS dianggarkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berupa DAK Non Fisik.

6.1.2 BELANJA DAERAH

TA 2022, Belanja Daerah dalam APBD-P dialokasikan sebesar Rp3.022.516.285.984,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.708.515.650.596,00 atau 89,61% dari APBD-P. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Operasi	2.207.838.073.016,00	2.010.061.509.032,00	91,04	1.951.840.892.690,00
2	Belanja Modal	344.913.790.147,00	229.856.933.449,00	66,64	320.727.654.179,53
3	Belanja Tak Terduga	12.859.416.678,00	11.870.504.527,00	92,31	25.272.600.802,00
4	Belanja Transfer	456.905.006.143,00	456.726.703.588,00	99,96	444.313.049.684,00
	Jumlah	3.022.516.285.984,00	2.708.515.650.596,00	89,61	2.742.154.197.355,53

Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer seluruhnya berada dibawah alokasi anggaran yang disediakan, dan realisasi tertinggi adalah Belanja Transfer yaitu sebesar 99,96% dari APBD-P.

6.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (TA)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.223.313.064.002,00	1.146.569.988.635,00	93,73	1.152.944.764.985,00
2	Belanja Barang dan Jasa	894.406.251.764,00	787.351.371.791,00	88,03	729.215.570.980,00
3	Belanja Subsidi	1.444.650.000,00	1.408.740.156,00	97,51	-
4	Belanja Hibah	72.122.915.250,00	66.576.805.450,00	92,31	59.840.624.500,00
5	Belanja Bantuan Sosial	16.551.192.000,00	8.154.603.000,00	49,27	9.839.932.225,00
	Jumlah	2.207.838.073.016,00	2.010.061.509.032,00	91,04	1.951.840.892.690,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp2.010.061.509.032,00 atau 91,04% APBD-P. Apabila dibandingkan dengan Belanja Operasi TA 2021 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rp1.951.840.892.690,00 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran sebesar Rp58.220.616.342,00 atau 2,98% dari APBD-P. Berikut penjelasan ringkas mengenai Belanja Operasi TA 2022:

6.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.146.569.988.635,00 atau 93,73% atau 0,89% dari APBD-P. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	779.680.454.747,00	768.880.426.518,00	98,61	747.318.404.775,00	21.562.021.743,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	130.973.975.475,00	129.158.370.461,00	98,61	102.384.351.095,00	26.774.019.366,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	271.841.581.322,00	210.623.187.049,00	77,48	273.746.613.643,00	(63.123.426.594,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.964.421.742,00	32.611.601.021,00	98,93	24.718.450.841,00	7.893.150.180,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	557.539.716,00	549.298.198,00	98,52	415.428.155,00	133.870.043,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ KWH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	-
7	Belanja Pegawai BLUD	6.695.091.000,00	4.147.105.388,00	61,94	3.761.516.476,00	385.588.912,00
	Jumlah	1.223.313.064.002,00	1.146.569.988.635,00	93,73	1.152.944.764.985,00	(6.374.776.350,00)

Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp6.374.776.350,00) bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2021. Realisasi belanja pegawai LRA per SKPD disajikan pada lampiran 1.

6.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk TA 2022 direalisasi sebesar Rp787.351.371.791,00 atau 88,03% dari APBD-P.

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Barang	292.240.095.605,00	256.698.547.752,00	87,84	202.644.614.446,00
2	Belanja Jasa	272.084.745.938,00	221.838.509.019,00	81,53	216.305.728.979,00
3	Belanja Pemeliharaan	11.528.093.000,00	10.015.401.643,00	86,88	8.974.886.280,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	68.484.441.040,00	64.990.197.476,00	94,90	48.462.416.792,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.612.350.000,00	4.401.400.000,00	95,43	8.291.437.437,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.439.352.000,00	115.201.551.998,00	134,83	112.047.760.681,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	160.017.174.181,00	114.205.763.903,00	71,37	132.488.726.365,00
	Jumlah	894.406.251.764,00	787.351.371.791,00	88,03	729.215.570.980,00



Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada *Lampiran 2 s.d.5* .

6.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada TA 2022 sebesar Rp1.408.740.156,00. Belanja Subsidi TA 2022 merupakan Belanja Subsidi berupa voucher pembelian Bahan Bakar Minyak untuk supir angkutan umum, dalam rangka penanggulangan inflasi karena kenaikan BBM. Belanja Subsidi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Subsidi	1.444.650.000,00	1.408.740.156,00	97,51	0,00
	Jumlah	1.444.650.000,00	1.408.740.156,00	97,51	0,00

6.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp72.122.915.250,00 realisasi sebesar Rp66.576.805.450,00 atau 92,31%. Belanja Hibah ini yaitu untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
I	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.575.020.000,00	65.028.910.200,00	92,14	58.827.457.500,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.051.820.000,00	50.741.146.200,00	95,64	29.251.006.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.535.000.000,00	10.425.000.000,00	77,02	24.605.400.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.463.200.000,00	3.462.764.000,00	99,99	4.871.051.500,00
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	525.000.000,00	400.000.000,00	76,19	100.000.000,00
II	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.547.895.250,00	1.547.895.250,00	100,00	1.013.167.000,00
	Jumlah	72.122.915.250,00	66.576.805.450,00	92,31	59.840.624.500,00

Rincian atas Belanja Hibah dan penerima hibah dapat dilihat pada *lampiran 6.a dan Lampiran 6.b*.

6.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dialokasikan sebesar Rp16.551.192.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.154.603.000,00 atau 49,27% dari APBD-P. Namun



jika dibandingkan dengan TA 2021, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan realisasi sebesar (Rp1.685.329.225,00). Realisasi belanja ini diperuntukan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Bantuan Sosial kepada Individu	13.579.892.000,00	5.185.802.000,00	38,19	5.023.596.225,00	162.205.775,00
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	3.667.200.000,00	(3.617.200.000,00)
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	496.300.000,00	494.801.000,00	99,70	862.801.000,00	(368.000.000,00)
4	Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.425.000.000,00	2.424.000.000,00	99,96	286.335.000,00	2.137.665.000,00
Jumlah		16.551.192.000,00	8.154.603.000,00	49,27	9.839.932.225,00	(1.685.329.225,00)

Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang maupun barang. Untuk Bantuan Sosial berupa uang ditujukan kepada kelompok masyarakat atau pun individu untuk biaya pengobatan, kegiatan pembinaan mental dan spiritual serta bantuan stimulan rumah tidak layak huni. Sementara Bantuan Sosial berupa barang diantaranya berupa bahan material untuk rumah korban bencana, bahan pangan, bibit ternak dan tanaman, alat bantu bagi penyandang disabilitas dan sebagainya. Untuk rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada lampiran 7.

6.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Tanah	33.878.900.000,00	26.751.824.467,00	78,96	7.612.718.068,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.190.912.610,00	49.977.556.706,00	60,08	104.329.063.606,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.815.171.178,00	66.623.156.876,00	84,53	88.667.096.662,53
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	120.151.608.654,00	79.711.956.467,00	66,34	119.717.944.843,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.877.197.705,00	6.792.438.933,00	23,52	400.831.000,00
Jumlah		344.913.790.147,00	229.856.933.449,00	66,64	320.727.654.179,53

Pada TA 2022, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp344.913.790.147,00 dan direalisasikan sebesar Rp229.902.220.412,00,00 atau 66,64%. Jika dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp90.870.720.730,53) (Rp229.856.933.449,00-Rp320.727.654.179,53) atau 28,33%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Realisasi Belanja Modal Per SKPD sebesar Rp229.856.933.449,00 pada Lampiran 8.



6.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Tanah				
-	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	33.878.900.000,00	26.751.824.467,00	78,96	7.612.718.068,00
	Jumlah	33.878.900.000,00	26.751.824.467,00	78,96	7.612.718.068,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp33.878.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.751.824.467,00 atau 78,96%. Realisasi belanja modal tanah ini digunakan untuk pengadaan jalan lingkar. Jika dibandingkan dengan belanja modal tanah tahun anggaran 2021, belanja modal tanah ini mengalami peningkatan sebesar Rp19.139.106.399,00 (Rp26.751.824.467,00-Rp7.612.718.068,00) atau 251,4%

6.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp83.190.912.610,00 dan terealisasi sebesar Rp49.977.556.706,00 atau hanya sebesar 60,08%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	922.096.000,00	874.452.350,00	94,83	1.528.345.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.368.794.880,00	4.038.272.880,00	92,43	171.986.600,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	64.280.000,00	64.280.000,00	100,00	59.267.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	50.226.000,00	50.226.000,00	100,00	3.182.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.093.349.000,00	4.805.933.630,00	94,36	26.177.322.050,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	668.590.100,00	655.113.400,00	97,98	570.712.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.281.102.230,00	12.115.802.903,00	74,42	19.358.235.947,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.653.082.500,00	651.742.500,00	9,80	19.609.275.550,00
9	Belanja Modal Komputer	6.235.817.000,00	6.038.941.177,00	96,84	15.556.942.464,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	233.310.000,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	42.790.150,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	6.057.200,00
13	Belanja Modal Alat Peraga	7.560.000.000,00	7.560.000.000,00	100,00	366.410.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	470.600.000,00	289.466.050,00	61,51	364.861.400,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	24.667.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.479.784.000,00	7.705.167.296,00	27,05	16.724.767.694,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.337.190.900,00	5.122.158.520,00	80,83	3.530.931.051,00
	Jumlah	83.190.912.610,00	49.977.556.706,00	60,08	104.329.063.606,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 52% atau (Rp54.351.506.900,00), yaitu Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.977.556.706,00 dikurangi Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp104.329.063.606,00.

6.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp66.623.156.876,00 atau 84,53% dari anggaran sebesar Rp78.815.171.178,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	73.857.697.178,00	64.235.321.076,00	86,97	86.165.669.662,53
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.263.074.000,00	2.188.294.000,00	67,06	1.927.935.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.694.400.000,00	199.541.800,00	11,78	573.492.000,00
	Jumlah	78.815.171.178,00	66.623.156.876,00	84,53	88.667.096.662,53

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 24,86% atau sebesar (Rp22.043.939.786,53) yaitu dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp66.623.156.876,00 dikurangi realisasi Tahun 2021 sebesar Rp88.667.096.662,53.

6.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.617.576.654,00	55.087.467.100,00	60,13	81.539.285.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	13.056.850.000,00	10.491.101.000,00	80,35	13.735.983.843,00
3	Belanja Modal Instalasi	3.233.000.000,00	3.194.714.300,00	98,82	11.116.106.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	12.244.182.000,00	10.938.674.067,00	89,34	13.326.570.000,00
	Jumlah	120.151.608.654,00	79.711.956.467,00	66,34	119.717.944.843,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp120.151.608.654,00 dengan realisasi sebesar Rp79.711.956.467,00 atau sebesar 66,34%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp40.005.988.376,00) atau senilai (33,41%), yakni realisasi



tahun 2022 sebesar Rp79.711.956.467,00 dikurangi realisasi tahun 2021 sebesar Rp119.717.944.843,00.

6.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.792.438.933,00 atau 23,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp28.877.197.705,00 Belanja tersebut ditujukan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	48.250.000,00	48.203.000,00	99,90	50.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	211.200.000,00	210.853.500,00	99,84	19.000.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	207.300.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	137.963.705,00	55.684.000,00	40,36	124.531.000,00
5	Belanja Modal Jaringan	28.479.784.000,00	6.477.698.433,00	22,74	-
	Jumlah	28.877.197.705,00	6.792.438.933,00	23,52	400.831.000,00

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.391.607.933,00 (Rp6.792.438.933,00 - Rp400.831.000,00).

6.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga diperuntukan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada TA 2022 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp12.859.416.678,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.870.504.527,00 atau 92,31%.

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2022	12.859.416.678,00	5.765.999.832,00	44,84	14.991.329.102,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Non Covid-19		6.097.944.200,00	47,42	7.933.230.700,00
3	Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021		6.560.495,00	0,05	-
4	Belanja Tidak Terduga untuk Pemulihan Ekonomi yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021		-	-	2.348.041.000,00
	Jumlah	12.859.416.678,00	11.870.504.527,00	92,31	25.272.600.802,00



6.1.2.4 Belanja Transfer

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp456.905.006.143,00 dan direalisasikan sebesar Rp456.726.703.588,00 atau 99,96%. Rincian Belanja Transfer TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
a	BAGI HASIL	16.063.298.143,00	15.921.642.838,00	99,12	13.580.038.690,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.830.212.020,00	6.769.979.323,00	99,12	8.306.378.422,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	9.233.086.123,00	9.151.663.515,00	99,12	5.273.660.268,00
b	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	440.841.708.000,00	440.805.060.750,00	99,99	430.733.010.994,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	440.841.708.000,00	440.805.060.750,00	99,99	430.733.010.994,00
	JUMLAH	456.905.006.143,00	456.726.703.588,00	99,99	444.313.049.684,00

6.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil TA 2022 dianggarkan sebesar Rp16.063.298.143,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.921.642.838,00 atau 99,12% dari APBD-P, Rincian Belanja Bagi Hasil untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	6.830.212.020,00	6.769.979.323,00	99,12	8.306.378.422,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	9.233.086.123,00	9.151.663.515,00	99,12	5.273.660.268,00
	Jumlah	16.063.298.143,00	15.921.642.838,00	99,12	13.580.038.690,00

6.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp440.841.708.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp440.805.060.750,00 atau 99,98%. Rincian Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	315.201.708.000,00	315.201.708.000,00	100	430.238.010.994,00



No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.640.000.000,00	125.603.352.750,00	99,97	495.000.000,00
	Jumlah	440.841.708.000,00	440.805.060.750,00	99,97	430.733.010.994,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dapat dilihat pada *lampiran 9*.

6.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan baik Penerimaan maupun Pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan TA 2022 terdiri dari:

6.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp65.266.792.658,00 dan direalisasikan sebesar Rp65.266.792.658,47 atau 100%.

6.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada TA 2022, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp21.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.499.999.390,00 atau 97,62%. Pengeluaran tersebut digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan yang diperuntukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021 (Rp)
			Rp	%	
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	6.000.000.000,00	5.499.999.390,00	91,67	3.500.000.000,00
	<i>PT Bank BJB</i>	<i>2.500.000.000,00</i>	<i>2.499.999.390,00</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
	<i>PAM Tirtakamuning</i>	<i>3.000.000.000,00</i>	<i>3.000.000.000,00</i>	<i>100</i>	<i>3.000.000.000,00</i>
	<i>PT. Lembaga Keuangan Mikro</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500.000,00</i>
	Jumlah	21.000.000.000,00	20.499.999.390,00	97,62	3.500.000.000,00

6.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran TA 2022.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	SiLPA	-	15.918.855.748,13	-	65.266.792.658,47

SILPA tahun 2022 adalah sebesar Rp15.918.855.748,13. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2021, maka terjadi penurunan SiLPA di TA 2022 sebesar Rp49.347.936.910,34 (Rp15.918.855.748,13 -Rp65.266.792.658,47) atau 75,61%. SiLPA TA 2022 terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	566.130.021,00
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	28.180.384,66
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	24.545.838,00
d.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	Rp	1.792.619.266,47
e.	Kas di Bendahara BLUD	Rp	13.477.341.729,00
f.	Kas di Bendahara BOS	Rp	27.478.806,00
g.	Kas di Bendahara Kas Lainnya (Jasa Giro)	Rp	2.559.703,00
Jumlah		Rp	15.918.855.748,13

a. Rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp566.130.021,00 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	Retribusi Daerah	523.880.243,00	-	(523.880.243,00)
2	Jasa Giro	42.249.778,00	-	(42.249.778,00)
3	Penerimaan DBH Pusat	-	198.810.274,00	198.810.274,00
4	DAK Non Fisik	-	29.327.368.408,00	29.327.368.408,00
5	Penerimaan DBH provinsi	-	4.135.304.907,00	4.135.304.907,00
6	Bantuan Keuangan Provinsi	-	6.560.495,00	6.560.495,00
Jumlah		566.130.021,00	33.668.044.084,00	33.101.914.063,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp28.180.384,66 terdiri dari:

1.	RSUD Linggajati	Rp	7.171.400,00
2.	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Rp	6.706.000,00
3.	Dinas Perhubungan	Rp	400.000,00
4.	Dinas Kesehatan	Rp	13.902.984,66
Jumlah		Rp	28.180.384,66

c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.545.838,00 terdiri dari:

1.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	24.515.000,00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Rp	59,00
3.	Sekretariat DPRD	Rp	779,00
4.	Kecamatan Subang	Rp	30.000,00
Jumlah		Rp	24.545.838,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Selain dari SILPA yang telah dijelaskan di atas, seharusnya terdapat sisa dana dari Pendapatan Transfer yang merupakan belanja wajib. Sisa dana tersebut pada tahun anggaran 2022 digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang didanai dari PAD karena tidak tercapainya target PAD. Rincian sisa dana tersebut sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 DES 2021 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2022 (Rp)
1	PENDAPATAN TRANSFER	33.668.044.084,00	2.076.390.708.159,00	2.023.153.199.783,00	86.905.552.460,00
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	29.526.178.682,00	1.539.415.179.625,00	1.506.718.820.961,00	62.222.537.346,00
	DANA PERIMBANGAN	29.526.178.682,00	1.539.415.179.625,00	1.506.718.820.961,00	62.222.537.346,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	75.284.891.957,00	61.293.837.952,00	13.991.054.005,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		5.852.349.453,00	3.345.820.566,00	2.506.528.887,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB		5.461.743.763,00	5.458.540.915,00	3.202.848,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		7.219.434.296,00	7.145.261.825,00	74.172.471,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		20.520.370.000,00	15.054.393.098,00	5.465.976.902,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		7.834.690.000,00	5.515.007.600,00	2.319.682.400,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		7.858.932.000,00	7.473.974.150,00	384.957.850,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		6.004.091.000,00	6.004.091.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		7.712.363.000,00	7.335.899.800,00	376.463.200,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		4.756.660.695,00	1.896.591.248,00	2.860.069.447,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	29.327.368.408,00	272.522.312.964,00	253.618.198.031,00	48.231.483.341,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.122.451.480,00	225.952.530.620,00	200.928.748.780,00	40.146.233.320,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	162.750.000,00	3.285.750.000,00	3.348.000.000,00	100.500.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.910.836.706,00	1.349.989.000,00	10.939.742.206,00	321.083.500,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		335.185.000,00	327.910.000,00	7.275.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		28.428.524.648,00	23.346.136.490,00	5.082.388.158,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		395.524.418,00	62.500.000,00	333.024.418,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.651.610.722,00	10.845.093.278,00	10.294.495.055,00	2.202.208.945,00
	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal		360.216.000,00	360.216.000,00	-
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.900.000,00	468.700.000,00	434.830.000,00	38.770.000,00
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4.141.865.402,00	536.975.528.534,00	516.434.378.822,00	24.683.015.114,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	6.560.495,00	107.947.843.862,00	83.271.389.243,00	24.683.015.114,00
	JUMLAH	33.668.044.084,00	2.076.390.708.159,00	2.023.153.199.783,00	86.905.552.460,00

Pendapatan transfer yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibayar dari PAD telah dianggarkan kembali di tahun 2023 dan telah



dibayarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan dana-dana tersebut.

Rincian dana transfer sebesar Rp86.905.552.460,00 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
		(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.010.731.528,00
2	Belanja Barang dan Jasa	27.656.681.761,00
3	Subsidi	1.306.000.000,00
4	Hibah	3.338.062.500,00
5	Bansos	130.317.000,00
6	Modal	30.271.921.171,00
7	Transfer	19.191.838.500,00
8	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal)	3.000.000.000,00
Jumlah		86.905.552.460,00

Rincian penggunaan sisa dana tersebut sebagaimana lampiran 10.

6.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP.SAL)

Dalam LPSAL TA 2022 terdapat kenaikan Saldo Anggaran Lebih bila dibandingkan dengan TA 2021. Penyajian LPSAL TA 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
3	Sub Total (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
5	Sub Total (3+4)	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-Lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47

6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya TA 2021 sebesar Rp65.266.792.658,47 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Kas di Kas Daerah	33.668.044.084,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UYHD)	71.906.591,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	10.706.520,00
d.	Kas di Bendahara BOS (Sisa UYHD)	119.632.185,00
e.	Kas di Bendahara BLUD	27.625.748.314,00
f.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN (Sisa UYHD)	3.711.993.026,47
g.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN (Jasa Giro)	58.761.938,00
	Jumlah	Rp65.266.792.658,47



6.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih TA 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan APBD TA 2022, yaitu sebesar Rp65.266.792.658,47.

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
3	Sub Total (1-2)	-	-

6.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan APBD TA 2022 menghasilkan SiLPA sebesar Rp15.918.855.748,13 yang berasal dari:

a.	Pendapatan	Rp	2.679.667.713.075,66
b.	Belanja dan Transfer	Rp	2.708.515.650.596,00
c.	Surplus (Defisit) (a-b)	Rp	(28.847.937.520,34)
d.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.266.792.658,47
e.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.499.999.390,00
f.	Pembiayaan Netto (d-e)	Rp	44.766.793.268,47
g.	SiLPA (c+f)	Rp	15.918.855.748,13

6.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp15.918.855.748,13 yang diperoleh dari:

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	65.266.792.658,47	32.302.221.262,00
3	Sub Total (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
5	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+4)	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47

Adapun rincian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk TA 2022 sebesar Rp15.918.855.748,13 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Kas di Kas Daerah	566.130.021,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)	24.545.838,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.180.384,66
d.	Kas di Bendahara BOS (UYHD)	27.478.806,00
e.	Kas di Bendahara BLUD	13.477.341.729,00
f.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN (UYHD)	1.792.619.266,47
g.	Kas Lainnya (Jasa Giro)	2.559.703,00
	Jumlah	15.918.855.748,13



6.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Gambaran Neraca Kabupaten Kuningan Per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Akun	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	ASET				
1.1	Aset Lancar	72.115.093.408,34	118.980.815.484,18	(46.865.722.075,84)	(39,39)
1.2	Investasi Jangka Panjang	95.915.104.233,68	100.695.095.907,38	(4.779.991.673,70)	(4,75)
1.3	Aset Tetap	2.702.590.287.639,78	2.540.241.244.997,11	162.349.042.642,67	6,39
1.4	Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	100,00
1.5	Aset Lainnya	42.349.640.092,28	40.765.763.632,48	1.583.876.459,80	3,89
	Jumlah Aset	2.927.970.125.374,08	2.800.682.920.021,15	127.287.205.352,93	4,54
2	KEWAJIBAN				
	Kewajiban Jangka Pendek	270.571.782.849,16	78.561.438.465,25	192.010.344.383,91	244,41
	Jumlah Kewajiban	270.571.782.849,16	78.561.438.465,25	192.010.344.383,91	244,41
3	Ekuitas	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,98)	(2,38)
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.927.970.125.374,08	2.800.682.920.021,15	127.287.205.352,93	4,54

6.3.1 ASET

Total Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan Per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.927.970.125.374,08. Rincian Aset adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Lancar	72.115.093.408,34	118.980.815.484,18	(46.865.722.075,84)	(39,39)
2	Investasi Jangka Panjang	95.915.104.233,68	100.695.095.907,38	(4.779.991.673,70)	(4,75)
3	Aset Tetap	2.702.590.287.639,78	2.540.241.244.997,11	162.349.042.642,67	6,39
4	Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	100,00
5	Aset Lainnya	42.349.640.092,28	40.765.763.632,48	1.583.876.459,80	3,89
	Jumlah Aset	2.927.970.125.374,08	2.800.682.920.021,15	127.287.205.352,93	4,54

Berdasarkan tabel di atas, nilai aset tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp127.287.205.352,93. atau 4,54%, jika dibandingkan dengan Aset Tahun 2021 senilai Rp2.800.682.920.021,15. Berikut penjelasan setiap akun Aset.

6.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.115.093.408,34. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp46.865.722.075,84) bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.980.815.484,18. Rincian Aset Lancar terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Kas dan Setara Kas	16.278.489.290,13	65.322.987.384,47	(49.044.498.094,34)	(75,08)
2	Piutang Pendapatan	37.442.840.272,74	37.026.542.237,09	416.298.035,65	1,12
3	Penyisihan Piutang	(14.252.149.670,66)	(12.526.965.390,14)	(1.725.184.280,53)	13,77
4	Beban dibayar dimuka	365.348.351,65	-	365.348.351,65	100,00
5	Persediaan	32.280.565.164,48	29.158.251.252,75	3.122.313.911,73	10,71
	Jumlah Aset Lancar	72.115.093.408,34	118.980.815.484,18	(46.865.722.075,84)	(39,39)



6.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2022 sebesar
Rp16.278.489.290,13 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Kas di Kas Daerah	566.130.021,00	33.668.044.084,00	(33.101.914.063,00)	(98,32)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	28.180.384,66	10.706.520,00	17.473.864,66	163,21
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.545.838,00	71.906.591,00	(47.360.753,00)	(65,86)
4	Kas di BLUD	13.477.341.729,00	27.625.748.314,00	(14.148.406.585,00)	(51,21)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.792.681.766,47	3.711.993.026,47	(1.919.311.260,00)	(51,71)
6	Kas di Bendahara BOS	27.478.806,00	119.632.185,00	(92.153.379,00)	(77,03)
7	Kas Lainnya	362.130.745,00	114.956.664,00	247.174.081,00	215,02
	Jumlah Aset Lancar	16.278.489.290,13	65.322.987.384,47	(49.044.498.094,34)	(75,08)

6.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah pada Per 31 Desember 2022 sebesar Rp566.130.021,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai kas di Kas Daerah sebesar (Rp33.101.914.063,00). Rincian dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
A	Kas di Kas Daerah Terdiri dari:			
	Kas di Rek BJB:			
	- Retribusi Daerah	523.880.243,00	-	523.880.243,00
	- Jasa Giro	42.249.778,00	-	42.249.778,00
	- Penerimaan DBH Pusat		198.810.274,00	(198.810.274,00)
	- DAK Non Fisik		29.327.368.408,00	(29.327.368.408,00)
	- Penerimaan DBH provinsi		4.135.304.907,00	(4.135.304.907,00)
	- Bantuan Keuangan Provinsi		6.560.495,00	(6.560.495,00)
	Jumlah	566.130.021,00	33.668.044.084,00	(33.101.914.063,00)

Kas di Kas Daerah disimpan di rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan di PT. Bank BJB Kantor Cabang Kuningan yang merupakan Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan nomor Rekening 150010012255.

Selain dari SILPA yang telah dijelaskan di atas, seharusnya terdapat sisa dana dari Pendapatan Transfer yang merupakan belanja wajib. Sisa dana tersebut pada tahun anggaran 2022 digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang didanai dari PAD karena tidak tercapainya target PAD. Rincian sisa dana tersebut sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	URAIAN	PER 31 DES 2021 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2022 (Rp)
1	PENDAPATAN TRANSFER	33.668.044.084,00	2.076.390.708.159,00	2.023.153.199.783,00	86.905.552.460,00
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	29.526.178.682,00	1.539.415.179.625,00	1.506.718.820.961,00	62.222.537.346,00
	DANA PERIMBANGAN	29.526.178.682,00	1.539.415.179.625,00	1.506.718.820.961,00	62.222.537.346,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	75.284.891.957,00	61.293.837.952,00	13.991.054.005,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		5.852.349.453,00	3.345.820.566,00	2.506.528.887,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB		5.461.743.763,00	5.458.540.915,00	3.202.848,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		7.219.434.296,00	7.145.261.825,00	74.172.471,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		20.520.370.000,00	15.054.393.098,00	5.465.976.902,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		7.834.690.000,00	5.515.007.600,00	2.319.682.400,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		7.858.932.000,00	7.473.974.150,00	384.957.850,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		6.004.091.000,00	6.004.091.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		7.712.363.000,00	7.335.899.800,00	376.463.200,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		4.756.660.695,00	1.896.591.248,00	2.860.069.447,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	29.327.368.408,00	272.522.312.964,00	253.618.198.031,00	48.231.483.341,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.122.451.480,00	225.952.530.620,00	200.928.748.780,00	40.146.233.320,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	162.750.000,00	3.285.750.000,00	3.348.000.000,00	100.500.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.910.836.706,00	1.349.989.000,00	10.939.742.206,00	321.083.500,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		335.185.000,00	327.910.000,00	7.275.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		28.428.524.648,00	23.346.136.490,00	5.082.388.158,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		395.524.418,00	62.500.000,00	333.024.418,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.651.610.722,00	10.845.093.278,00	10.294.495.055,00	2.202.208.945,00
	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal		360.216.000,00	360.216.000,00	-
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.900.000,00	468.700.000,00	434.830.000,00	38.770.000,00
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	4.141.865.402,00	536.975.528.534,00	516.434.378.822,00	24.683.015.114,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	6.560.495,00	107.947.843.862,00	83.271.389.243,00	24.683.015.114,00
	JUMLAH	33.668.044.084,00	2.076.390.708.159,00	2.023.153.199.783,00	86.905.552.460,00

Pendapatan transfer yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibayar dari PAD telah dianggarkan kembali di tahun 2023 dan telah dibayarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan dana-dana tersebut.



6.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.180.384,66.

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	28.180.384,66	10.706.520,00	17.473.864,66	163,21

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp17.473.864,66 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Yang diperoleh dari nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp28.180.384,66 dikurangi kas Tahun 2021 sebesar Rp10.706.520,00.

Rincian kas di bendahara penerimaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Bank (Rp)	Tunai (Rp)	Jumlah (Rp)	KETERANGAN
					Tanggal Setor
1	RSUD LINGGAJATI (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	7.171.400,00	-	7.171.400,00	2 dan 3 Januari 2023
2	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga)	-	6.706.000,00	6.706.000,00	3 Januari 2023.
3	DINAS PERHUBUNGAN (Retribusi Terminal)	-	400.000,00	400.000,00	2 Januari 2023
4	DINAS KESEHATAN (Retribusi Pelayanan Kesehatan) Kas di Rek FKTP	13.902.984,66	-	13.902.984,66	-
Jumlah		21.074.384,66	7.106.000,00	28.180.384,66	

6.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.545.838,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
B	Kas di Bendahara Pengeluaran				
	Kas Belanja	24.545.838,00	71.906.591,00	(47.360.753,00)	65,86

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2021, nilai kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp47.360.753,00) atau 65,86%. Penurunan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut menunjukkan semakin baiknya pengelolaan kas di bendahara pengeluaran. Meskipun masih terdapat kas di bendahara yang disebabkan pada tanggal 30 Desember 2022 masih terdapat transaksi belanja yang meyebabkan keterlambatan penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran.



Adapun rincian kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp24.545.838,00 per SKPD adalah sebagai berikut :

No.	SKPD	JUMLAH (Rp)	TANGGAL SETOR KE KAS DAERAH
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.515.000,00	30 Januari 2023
2	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	59,00	5 Januari 2023
3	SEKRETARIAT DPRD	779,00	10 Januari 2023
4	KECAMATAN SUBANG	30.000,00	4 Januari 2023
	Jumlah	24.545.838,00	

6.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.477.341.729,00. Rincian dari kas di BLUD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di BLUD Per 31 Desember 2021	27.625.748.314,00
2	Pendapatan BLUD Tahun 2022	109.526.163.026,00
3	Belanja BLUD Tahun 2022	123.674.569.611,00
4	Kas di BLUD per 31 Desember 2022 (1+2-3)	13.477.341.729,00

Rincian Kas di BLUD tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai dibendahara penerimaan yang dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Pemegang Rekening	Saldo RC Per 31 Des 2022 (Rp)
1	BJB	0150010015883	KASIER PENERIMAAN RSUD 45 KUNINGAN	13.465.950.529,00
2	BJB	0026603153001	KAS BANTU PENERIMAAN RSUD 45 KNG	-
3	BRI	013301002059301	RSUD 45 KUNINGAN	-
4	BJB	0150010012800	PENGELUARAN RSUD 45	-
5	-	-	Tunai di Bendahara Penerimaan	11.391.200,00
		Jumlah		13.477.341.729,00

6.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.792.619.266,47 yang terdapat pada beberapa rekening di 37 Puskesmas. Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2021	3.711.993.026,47
Pendapatan Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2022	33.849.425.649,00
Belanja Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2022	35.768.799.409,00
Kas Lain di Bendahara FKTP	62.500,00
Saldo Kas JKN per 31 Desember 2022	1.792.681.766,47



Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per UPTD Puskesmas dijelaskan pada lampiran 11.

6.3.1.1.1.6 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.478.806,00. Rincian mengenai Dana BOS tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021	Realisasi Penerimaan Dana BOS 2022	Jumlah Belanja BOS 2022	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	BOS SD REGULER	78.332.299,00	86.408.861.104,00	86.473.238.521,00	13.954.882,00
2	BOS SMP REGULER	41.299.886,00	39.483.403.244,00	39.511.179.206,00	13.523.924,00
	JUMLAH BOS REGULER	119.632.185,00	125.892.264.348,00	125.984.417.727,00	27.478.806,00
3	BOS SD KINERJA	-	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00	-
4	BOS SMP KINERJA	-	840.000.000,00	840.000.000,00	-
	JUMLAH BOS KINERJA	-	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-
	JUMLAH BOS 2022	119.632.185,00	129.292.264.348,00	129.384.417.727,00	27.478.806,00

Berdasarkan tabel tersebut, Kas di Bendahara BOS sebesar Rp27.478.806,00 yang terdiri dari:

- Sisa Dana BOS SD sebesar Rp13.954.882,00
- Sisa Dana BOS SMP sebesar Rp13.523.924,00

Penerimaan Dana BOS tambahan selama TA 2022 yaitu BOS Kinerja sebesar Rp2.560.000.000,00 yang diterima 32 SD masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 Begitu pula dengan satuan kerja SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Terdapat 7 SMP yang menerima BOS Kinerja sebesar Rp840.000.000,00 masing-masing Rp120.000.000,00.

Adapun Sekolah Dasar Negeri penerima Dana BOS Kinerja sebanyak 32 Sekolah yang masing-masing memperoleh Dana BOS Kinerja sebesar Rp80.000.000,00 yang terdiri dari:

No	Sekolah	Kecamatan	Penerimaan
1	SD NEGERI 1 CIOMAS	Ciawigebang	80.000.000
2	SD NEGERI 1 CIPUTAT	Ciawigebang	80.000.000
3	SD NEGERI 1 KADURAMA	Ciawigebang	80.000.000
4	SD NEGERI 1 MEKARJAYA	Ciawigebang	80.000.000
5	SD NEGERI 2 MEKARJAYA	Ciawigebang	80.000.000
6	SD NEGERI 3 SUKADANA	Ciawigebang	80.000.000
7	SD NEGERI DUKUHDALAM	Ciawigebang	80.000.000
8	SD NEGERI 2 RANDUSARI	Cibeureum	80.000.000
9	SD NEGERI 1 CIGADUNG	Cigugur	80.000.000
10	SD NEGERI GUNUNGKELING	Cigugur	80.000.000
11	SD NEGERI 2 CITUNDUN	Ciwaru	80.000.000
12	SD NEGERI CILAYUNG	Ciwaru	80.000.000
13	SD NEGERI LINGGAJAYA	Ciwaru	80.000.000
14	SD NEGERI 2 TUGUMULYA	Darma	80.000.000
15	SD NEGERI 1 BABAKANMULYA	Jalaksana	80.000.000
16	SD NEGERI 1 SUKAMUKTI	Jalaksana	80.000.000



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Sekolah	Kecamatan	Penerimaan
17	SD NEGERI SAYANA	Jalaksana	80.000.000
18	SD NEGERI 1 JAPARA	Japara	80.000.000
19	SD NEGERI 3 CENGAL	Japara	80.000.000
20	SD NEGERI SINGKUP	Japara	80.000.000
21	SD NEGERI BABATAN	Kadugede	80.000.000
22	SD NEGERI 1 JABRANTI	Karangkencana	80.000.000
23	SD NEGERI 1 CILOA	Kramatmulya	80.000.000
24	SD NEGERI 2 KARANGMANGU	Kramatmulya	80.000.000
25	SD NEGERI GEREBA	Kramatmulya	80.000.000
26	SD NEGERI 3 PURWAWINANGUN	Kuningan	80.000.000
27	SD NEGERI 1 CINEUMBEUY	Lebakwangi	80.000.000
28	SD NEGERI 2 LEBAKWANGI	Lebakwangi	80.000.000
29	SD NEGERI 3 HAURKUNING	Nusaherang	80.000.000
30	SD NEGERI 1 TENJOLAYAR	Pancalang	80.000.000
31	SD NEGERI 2 BABAKANREUMA	Sindangagung	80.000.000
32	SD NEGERI SINDANGAGUNG	Sindangagung	80.000.000
JUMLAH			2.560.000.000

Sedangkan untuk Sekolah Menengah pertama yang menerima BOS Kinerja hanya sebanyak 7 SMP, antara lain:

No	Nama Sekolah	Nilai
1	SMP NEGERI 1 CIWARU	120.000.000
2	SMP NEGERI 1 GARAWANGI	120.000.000
3	SMP NEGERI 1 JALAKSANA	120.000.000
4	SMP NEGERI 1 KUNINGAN	120.000.000
5	SMP NEGERI 1 LEBAKWANGI	120.000.000
6	SMP NEGERI 2 CIAWIGEBANG	120.000.000
7	SMP NEGERI 2 JALAKSANA	120.000.000
JUMLAH		840.000.000

6.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Pada Neraca Tahun 2022 terdapat Kas lainnya sebesar Rp362.130.745,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp247.174.081,00 dibandingkan dengan nilai Kas Lainnya tahun 2021 sebesar Rp114.956.664,00. Kenaikan tertinggi yaitu dari PFK, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Saldo Per 31 Des 2022	Saldo Per 31 Des 2021	Lebih/ kurang (Rp)
		Rp	Rp	Rp
a	PFK	359.571.042,00	56.194.726,00	303.376.316,00
b	Jasa giro	2.559.703,00	58.761.938,00	(56.202.235,00)
Jumlah		362.130.745,00	114.956.664,00	247.174.081,00

Rekening Bendahara FKTP masih belum melaksanakan autodebet untuk jasa giro, sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat jasa Giro yang belum disetorkan ke kas daerah.



Rincian Kas Lainnya per SKPD antara lain sebagai berikut:

NO	SKPD	Total PFK
		(Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	3.727.477,00
2	Dinas Perhubungan	3.439.369,00
3	Sekretariat DPRD	293.302.880,00
4	Kecamatan Cilimus	155.000,00
5	Kecamatan Kadugede	1.188.438,00
6	Kecamatan Kuningan	13.663.715,00
7	Kecamatan Luragung	21.752.343,00
8	Kecamatan Cimahi	3.416.329,00
9	Kecamatan Ciniru	2.459.628,00
10	Kecamatan Selajambe	2.594.814,00
11	Kecamatan Cidahu	9.583.249,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113.800,00
13	Kec. Cigugur	4.174.000,00
14	Jasa Giro FKTP	2.559.703,00
	JUMLAH	362.130.745,00

6.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dalam Neraca Tahun 2022 adalah sebesar 37.442.840.272,74, terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian dan Piutang Lainnya.

6.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.616.302.358,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
	Piutang Pajak	18.616.302.358,00	16.777.164.050,00	1.839.138.308,00	10,96
1	Pajak Hotel	110.109.850,00	84.898.850,00	25.211.000,00	29,70
2	Pajak Restoran	341.681.127,00	227.860.178,00	113.820.949,00	49,95
3	Pajak Hiburan	237.120.685,00	199.267.345,00	37.853.340,00	19,00
4	Pajak Reklame	537.044.523,00	298.637.513,00	238.407.010,00	79,83
5	Pajak Penerangan Jalan	2.425.990.298,00	2.036.516.058,00	389.474.240,00	19,12
6	Pajak Parkir	32.677.400,00	33.327.200,00	(649.800,00)	(1,95)
7	Pajak Air Tanah	11.045.780,00	6.174.870,00	4.870.910,00	78,88
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	961.671.960,00	961.671.960,00	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	13.958.960.735,00	12.928.810.076,00	1.030.150.659,00	7,97
	Jumlah Piutang Pajak :	18.616.302.358,00	16.777.164.050,00	1.839.138.308,00	10,96

Dari tabel diatas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2021, piutang pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.839.138.308,00 atau 10,96%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang di hampir seluruh sektor pajak kecuali pajak parkir yang mengalami penurunan. Kenaikan piutang pajak tertinggi adalah PBB sebesar



Rp1.030.150.659,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp389.474.240,00 dan piutang pajak reklame sebesar Rp238.407.010,00.

6.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi sebesar Rp1.999.010.410,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Piutang Retribusi				
1	Sewa Tanah	109.069.496,00	43.023.607,00	66.045.889,00	153,51
2	Retribusi Sewa Pertokoan Siliwangi Barat	67.500.000,00	150.160.000,00	(82.660.000,00)	(55,05)
3	Retribusi Kesehatan	1.813.944.914,00	632.650.771,00	1.181.294.143,00	186,72
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.496.000,00	102.988.000,00	(94.492.000,00)	(91,75)
	Jumlah	1.999.010.410,00	928.822.378,00	1.070.188.032,00	115,22

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 terdapat kenaikan piutang retribusi daerah yakni dari Retribusi Kesehatan dan Retribusi Menara Telekomunikasi dengan nilai total kenaikan sebesar Rp1.070.188.032,00 atau sebesar 115,22%. Kenaikan tertinggi yakni dari piutang retribusi Menara telekomunikasi. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang retribusi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43.023.607,00	714.369.435,00	648.323.546,00	109.069.496,00
2	Retribusi Sewa Pertokoan Siliwangi Barat	150.160.000,00	-	82.660.000,00	67.500.000,00
3	Retribusi Kesehatan	632.650.771,00	34.615.486.170,00	33.434.192.027,00	1.813.944.914,00
4	Retribusi Menara	102.988.000,00	927.188.000,00	1.021.680.000,00	8.496.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	928.822.378,00	36.257.043.605,00	35.186.855.573,00	1.999.010.410,00

Pada tabel dapat dijelaskan bahwa nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp1.999.010.410,00 diperoleh dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp928.822.378,00 ditambah SKRD sebesar Rp36.257.043.605,00 kemudian dikurangi penerimaan retribusi sebesar Rp35.186.855.573,00.

Dalam catatan laporan keuangan RSUD Linggajati tahun 2022, selain dari piutang Asuransi Kesehatan Lainnya dan Piutang Umum, terdapat pula piutang Program Layanan Kesehatan Lainnya berupa Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebesar Rp716.518.039,00. Namun karena piutang tersebut merupakan piutang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka piutang tersebut tidak dapat diakui sebagai piutang Retribusi kesehatan dalam Laporan Keuangan Pemda.



6.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.218.028.188,08. Uraian dari piutang tersebut antara lain sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO AKHIR Per 31 Des 2022 (Rp)	SALDO AWAL Per 31 Des 2021 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Piutang Denda Pajak	235.463.424,00	238.481.805,00	(3.018.381,00)	(1,27)
2	Piutang Denda Retribusi	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-
3	Piutang dari Pengembalian	45.058.260,00	45.058.260,00	-	-
4	Piutang BLUD	10.459.118.688,00	8.005.101.402,00	2.454.017.286,00	30,66
5	Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air	1.469.663.990,00	1.351.702.709,00	117.961.281,00	8,73
6	Piutang Remunerasi DBH TDF	1.910.370,08	-	1.910.370,08	-
	Jumlah	12.218.018.188,08	9.647.147.632,00	2.570.870.556,08	26,65

Pada Tahun 2022 nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan dari nilai Piutang Tahun 2021 sebesar Rp2.570.870.556,08. Kenaikan ini diperoleh dari nilai piutang BLUD dan Piutang Kompensasi Sumber Daya Air. Rincian dari nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Denda Pajak Daerah

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp235.463.424,00 terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)
1.	Pajak Hotel	24.695.899,00	26.113.919,00	(1.418.020,00)
2.	Pajak Restoran	42.959.225,00	44.103.879,00	(1.144.654,00)
3.	Pajak Hiburan	37.293.247,00	37.748.954,00	(455.707,00)
4.	Pajak Reklame	19.451.369,00	19.451.369,00	-
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.020.613,00	97.020.613,00	-
6.	Pajak Parkir	10.702.007,00	10.702.007,00	-
7.	Pajak Peng. Pengusahaan Srg Brg Walet	7.000,00	7.000,00	-
8.	Pajak Air Tanah	3.334.064,00	3.334.064,00	-
	Jumlah	235.463.424,00	238.481.805,00	(3.018.381,00)

Dalam tabel di atas, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp3.018.381,00). Hal ini dikarenakan adanya penurunan piutang dari denda pajak hotel, restoran dan hiburan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pembayaran pajak-pajak tersebut sehingga nilai piutang denda pajak dapat direalisasikan.

2. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.803.456,00 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berupa Denda Retribusi Sewa Tanah.



Nilai tersebut masih sama dengan nilai piutang denda retribusi Tahun 2021. Hal ini disebabkan masih belum adanya pembayaran piutang denda retribusi sewa tanah tahun 2013, 2015 dan 2016 seperti yang tercatat pada laporan keuangan tahun 2021.

No.	URAIAN	SALDO AKHIR Per 31 Des 2022 (Rp)	SALDO AWAL Per 31 Des 2021 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Piutang Denda Retribusi	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-
	Jumlah	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-

Rincian dari Piutang Denda Retribusi sebesar Rp6.803.456,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2016 sebesar	4.033.432,00
2.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2015 sebesar	2.222.418,00
3.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2013 sebesar	547.606,00
	Jumlah	6.803.456,

3. Piutang dari Pengembalian

Besaran Piutang dari Pengembalian pada Tahun 2022 adalah Rp45.058.260,00. Rincian perhitungan akun Piutang dari pengembalian, sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pengembalian Lain-lain - Pengembalian dari PT. Taspen	45.058.260,00	-	-	45.058.260,00
	Jumlah	45.058.260,00	-	-	45.058.260,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai saldo dari saldo akhir per 31 Desember 2022 masih sama dengan saldo awal per 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp45.058.260,00. Piutang ini merupakan piutang dari Pengembalian PT. Taspen atas kelebihan penyeteroran tunjangan taspen dari pembayaran gaji PNS yang pensiun. Pada tahun 2022 PT. Taspen belum melaksanakan pengembalian atas kelebihan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Kuningan. Sehingga pada akhir tahun 2022 nilai piutang pengembalian dari PT. Taspen masih sama dengan tahun sebelumnya.

4. Piutang BLUD

Piutang Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kuningan dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan adalah sebesar Rp10.459.118.688,00. Rincian Piutang BLUD sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No.	SKPD	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Asuransi Kesehatan	4.503.807.176,00	64.662.030.454,00	62.498.962.999,00	6.666.874.631,00
2	Piutang Umum	3.501.294.226,00	421.767.830,00	130.817.999,00	3.792.244.057,00
	Jumlah	8.005.101.402,00	65.083.798.284,00	62.629.780.998,00	10.459.118.688,00

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa piutang BLUD tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021. Yaitu dari Rp8.005.101.402,00 menjadi Rp10.459.118.688,00.

Dalam catatan laporan keuangan RSUD'45, selain dari piutang Asuransi Kesehatan Lainnya dan Piutang Umum, terdapat pula piutang Program Layanan Kesehatan Lainnya berupa Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebesar Rp2.107.057.389,00. Namun karena piutang tersebut merupakan piutang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka piutang tersebut tidak dapat diakui sebagai piutang BLUD dalam Laporan Keuangan Pemda.

5. Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air

Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.469.663.990,00. Rinciannya sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
	Piutang Kompensasi Pemanfaatan SDA dari :	1.351.702.709,00	6.821.834.615,00	6.703.873.334,00	1.469.663.990,00
1	PT. Pertamina Cirebon	22.439.440,00	23.026.608,00	43.547.164,00	1.918.884,00
2	PT. Indocement Cirebon	-	850.000.000,00	850.000.000,00	-
3	Pemerintah Kota Cirebon	1.236.281.149,00	5.053.944.507,00	5.052.211.800,00	1.238.013.856,00
4	Pemerintah Kabupaten Cirebon	92.982.120,00	894.863.500,00	758.114.370,00	229.731.250,00
	JUMLAH	1.351.702.709,00	6.821.834.615,00	6.703.873.334,00	1.469.663.990,00

Tabel kenaikan atau penurunan piutang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
	Piutang Kompensasi Pemanfaatan SDA dari :	1.469.663.990,00	1.351.702.709,00	117.961.281,00	8,73
1	PT. Pertamina Cirebon	1.918.884,00	22.439.440,00	(20.520.556,00)	(91,45)
2	Pemerintah Kota Cirebon	1.238.013.856,00	1.236.281.149,00	1.732.707,00	0,14
3	Pemerintah Kabupaten Cirebon	229.731.250,00	92.982.120,00	136.749.130,00	147,07
	JUMLAH	1.469.663.990,00	1.351.702.709,00	117.961.281,00	8,73



Dari tabel di atas terlihat bahwa piutang kompensasi pemanfaatan sumber daya air Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan piutang tahun 2021. Hal ini karena adanya peningkatan dari piutang kompensasi pemanfaatan sumber daya air oleh Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hanya PT. Pertamina yang mengalami penurunan atas piutang tersebut pada tahun 2022 ini.

6. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2022 terdapat Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.910.370,08. Piutang tersebut merupakan remunerasi atas Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk TDF – TKD.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai dapat dilakukan dengan Treasury Deposit Facility (TDF). Pada Tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk TDF - TKD yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF - TKD yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF – TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat Nomor S-773/WPB.13/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo Rekening Teasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF – TKD) Tahun 2022, disampaikan saldo Rekening Lain di BI TDF TKD Kabupaten Kuningan 519000315980 pada Kantor Pusat BI per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.876.826.944,00, dengan nilai remunerasi sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO AKHIR	SALDO AWAL	Bertambah/ berkurang	%
		Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021		
7	Piutang Remunerasi DBH TDF	1.910.370,08	-	1.910.370,08	100,00
	Jumlah	1.910.370,08	-	1.910.370,08	100,00

6.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 adalah nihil. Hal ini dikarenakan piutang tersebut tidak memiliki dokumen yang memadai untuk dijadikan dasar pengakuan piutang. Oleh karena itu, per 31 Desember 2022 nilai piutang tersebut



dikeluarkan dari Neraca. Gambaran nilai piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	4.053.605.308,00	(4.053.605.308,00)	(100,00)
	JUMLAH	-	4.053.605.308,00	(4.053.605.308,00)	(100,00)

6.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang ini merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian dari piutang tersebut dapat dijelaskan pada Tabel Berikut ini:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya						
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.849.030.740,00	1.787.069.220,00	1.849.030.740,00	1.787.069.220,00	(61.961.520,00)	(3,35)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	933.098.430,00	947.304.300,00	933.098.430,00	947.304.300,00	14.205.870,00	1,52
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.208.183.440,00	1.271.027.855,00	2.208.183.440,00	1.271.027.855,00	(937.155.585,00)	(42,44)
4	Pajak Air Permukaan (AP)	31.319.200,00	109.732.850,00	31.319.200,00	109.732.850,00	78.413.650,00	250,37
	JUMLAH PIUTANG DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	5.021.631.810,00	4.115.134.225,00	5.021.631.810,00	4.115.134.225,00	(906.497.585,00)	(18,05)

Berdasarkan Tabel tersebut, pertanggal 31 Desember 2022 terdapat piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan total nilai sebesar Rp5.021.631.810,00. Nilai piutang tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/KEP.114-BAPENDA/2023, tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Kepgub tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki piutang atas bagi hasil pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp4.115.134.225,00. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 nilai piutang tersebut menurun sebesar (Rp906.497.585,00).

6.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2022 sebesar Rp255.332.091,66. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
	Bagian Lancar TGR	255.332.091,66	359.128.059,09	(103.795.967,43)	(28,90)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Bagian Lancar TGR	255.332.091,66	359.128.059,09	(103.795.967,43)	(28,90)
	Jumlah	255.332.091,66	359.128.059,09	(103.795.967,43)	(28,90)

Pada Tahun 2022 terdapat nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp255.332.091,66. Bila nilai tersebut dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terjadi penurunan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian sebesar (Rp103.795.967,43). Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 nilai TGR dicatat seluruhnya di Bagian Lancar TGR. Sedangkan nilai tersebut tidak seluruhnya merupakan Bagian Lancar. Oleh sebab itu pada tahun 2022 nilai tersebut dihitung menjadi Bagian Lancar TGR dan sisanya yang bukan bagian lancar dicatat pada akun TGR di Aset lain-Lain.

Rincian Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	NILAI TGR (Rp)	Yang sudah disetor s.d 31 Des 2022 (Rp)	Kewajiban 2023 (Yang Menjadi Bagian Lancar) (Rp)	Sisa (Bagian Tidak Lancar) (Rp)
Yang Bersumber dari PNS						
1	DEDE SUTARDI, S. IP	Jul-18	57.415.200,00	57.415.200,00	-	-
2	Drs. SUNARDI, MM	Apr-21	60.000.000,00	13.200.000,00	10.000.000,00	36.800.000,00
3	DJUANDA	2018	60.000.000,00	10.000.000,00	-	50.000.000,00
4	DUDIANA, S. IP	Des 2021	60.000.000,00	23.400.000,00	30.000.000,00	6.600.000,00
5	WAWAN SUPMAR HADIWIJAYA	Des 2021	10.565.625,00	4.450.000,00	5.282.812,50	832.812,50
6	Drs. JAJA MOHAMAD PAQJAN	2018	26.000.000,00	1.500.000,00	-	24.500.000,00
7	YAYAN JUNIANDRANI, SE., ST., M. Si	Apr-21	240.647.234,09	70.500.000,00	40.107.872,35	130.039.361,74
8	DEDI FRISTIADI, S.H.	Jan-22	88.636.900,00	88.000.000,00	636.900,00	-
9	JAJANG JAMALUDIN, S. Sos.	Jan-22	91.960.000,00	91.960.000,00	-	-
10	DUDUNG ABDUROHMAN	Jan-22	113.450.500,00	-	56.725.250,00	56.725.250,00
11	TOTO SAPTORI	Jan-22	20.080.200,00	500.000,00	10.040.100,00	9.540.100,00
	JUMLAH		828.755.659,09	360.925.200,00	152.792.934,85	315.037.524,24
Yang Bersumber dari Penyedia Jasa						
1	Anugerah Jaya	Feb-21	24.631.075,65	5.631.076,00	2.052.589,64	16.947.410,01
2	Multi Agung Sedaya	Mei 2021	312.025.000,00	312.025.000,00	-	-
3	Gloria	Apr-22	8.954.370,67	8.954.370,67	-	-
4	Barra Pratama	Maret 2022	17.320.603,22	17.320.603,22	-	-
5	Cahaya Fajar Utama	Apr-22	17.763.345,91	750.000,00	8.881.672,96	8.131.672,96
6	Putri Jaya	Maret 2022	5.079.344,00	-	2.539.672,00	2.539.672,00
7	Surya Berkah Utama	Apr-22	15.572.622,88	2.000.000,00	7.786.311,44	5.786.311,44
8	Dian Varista	Jun-22	17.476.735,21	5.400.000,00	8.738.367,61	3.338.367,61
9	Limar Pelangi	Jun-22	45.475.844,94	17.465.100,00	22.737.922,47	5.272.822,47
10	Kelompok Tani Mekar Saluyu	Des 2022	28.040.141,87	8.868.000,00	14.020.070,94	5.152.070,94
11	Kelompok Tani Rahayu	Mei 2022	43.646.922,58	1.000.000,00	21.823.461,29	20.823.461,29



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	NILAI TGR (Rp)	Yang sudah disetor s.d 31 Des 2022 (Rp)	Kewajiban 2023 (Yang Menjadi Bagian Lancar) (Rp)	Sisa (Bagian Tidak Lancar) (Rp)
12	Kuda Mas	Jun-22	14.111.800,00	3.000.000,00	7.055.900,00	4.055.900,00
12	Vidya Karya	Jul-22	13.806.376,96	2.806.377,00	6.903.188,48	4.096.811,48
	JUMLAH		563.904.183,89	385.220.526,89	102.539.156,81	76.144.500,19
	JUMLAH TOTAL		1.392.659.842,98	746.145.726,89	255.332.091,66	391.182.024,43

6.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp239.043.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Kurang Setor Kontribusi Pembangunan Pasar Baru	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00
	J U M L A H	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00

Akun Piutang Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah Piutang yang timbul dari perjanjian kerjasama Pembangunan Pengelolaan Pasar Baru di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut bahwa Pihak pengelola wajib membayar kompensasi atas pembangunan Pasar Baru kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Piutang ini dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pada Per 31 Desember 2021 yang merupakan saldo awal piutang, terdapat piutang sebesar Rp239.043.000,00, yang merupakan Piutang Kurang Setor Kontribusi Pembangunan Pasar Baru sebesar Rp239.043.000,00. Piutang tersebut timbul akibat adanya kurang setor oleh pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada saat itu masih menjabat. Setoran Kontribusi Pembangunan Pasar Baru tersebut telah diserahkan oleh PT. ASP Land kepada Pejabat tersebut. Namun pejabat tersebut belum menyetorkan uang tersebut ke kas daerah. Pejabat tersebut telah meninggal pada tahun 2015.

6.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp14.252.149.670,66) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Penyisihan Piutang Pendapatan				
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	(1.499.240.696,72)	(1.001.864.433,20)	(497.376.263,52)	49,65
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(90.765.707,96)	(53.455.785,05)	(37.309.922,91)	69,80
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.425.954.157,13)	(870.031.308,41)	(2.555.922.848,72)	293,77
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(239.043.000,00)	(2.066.863.588,28)	1.827.820.588,28	(88,43)
5	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(8.997.146.108,85)	(8.534.750.275,20)	(462.395.833,65)	5,42



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Jumlah	(14.252.149.670,66)	(12.526.965.390,14)	(1.725.184.280,52)	13,77

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai penyisihan piutang sebesar Rp1.725.184.280,52 atau 13,77% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungan penyisihan piutang secara lengkap terdapat pada lampiran 12.

6.3.1.1.4 Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp365.348.351,65. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Beban Dibayar Dimuka				
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - sewa tanah kas desa	360.156.043,96	-	360.156.043,96	-
2	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian - Sewa Pasar Domba	5.192.307,69	-	5.192.307,69	-
	Jumlah	365.348.351,65	-	365.348.351,65	-

6.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp32.280.565.164,48 dengan rician sebagai berikut :

Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Bertambah/ Berkurang	%
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
32.280.565.164,48	29.158.251.252,75	3.122.313.911,73	10,71

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kenaikan nilai persediaan di Tahun 2022 sebesar Rp3.122.313.911,30 atau 10,71%. Berikut adalah rincian persediaan per jenis barang:

No	Jenis Barang Persediaan	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	167.700.314,00
2	Kertas dan Cover	57.502.600,00
3	Cetakan	324.321.767,00
4	Alat Listrik	3.987.000,00
5	Perangko, materai	789.000,00
6	Perabot Kantor	36.527.150,00
7	Bibit Tanaman	67.221.000,00
8	Obat-obatan Pertanian	88.001.450,00
9	Obat-obatan Lainnya	484.090.519,00
10	Obat/Alat KB	399.405.092,00
11	Obat-Obatan Lainnya(BMHP)	33.523.356,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Jenis Barang Persediaan	Nilai (Rp)
12	Alat medis pakai habis (KB) (Hibah)	281.986.540,00
13	obat-obatan	22.774.793.691,90
14	Makanan Minum pasien	12.581.755,00
15	Bahan alat medis habis pakai	6.078.712.551,85
16	Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat	76.612.877,30
17	Bahan Komputer	1.289.984.500,00
18	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	65.154.000,00
19	Persediaan Induk, Benih dan Pakan Ikan di Balai Benih Ikan	37.670.000,00
	Jumlah	32.280.565.164,05

Adapun rincian persediaan per SKPD pada lampiran 13.

6.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022 Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam bentuk investasi Jangka Panjang sebesar Rp95.915.104.233,68, atau mengalami penurunan sebesar (Rp4.779.991.673,70) dari investasi Jangka Panjang per 2021. Rincian nilai investasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	202.042.068,00	202.042.068,00	-	-
2	Dana bergulir Tak tertagih	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-
3	Investasi Jangka Panjang Permanen	95.915.104.233,68	100.695.095.907,38	(4.779.991.673,70)	(4,75)
	Jumlah	95.915.104.233,68	100.695.095.907,38	(4.779.991.673,70)	(4,75)

6.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.042.068,00 merupakan kategori macet, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Dinas Pertanian	500.000,00	500.000,00	-
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	146.774.268,00	146.774.268,00	-
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	54.767.800,00	54.767.800,00	-
	Jumlah Katagori Macet	202.042.068,00	202.042.068,00	-

Perlu kami sampaikan bahwa dana bergulir tersebut sebagai leading sektornya adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Serta untuk penyimpanannya atas hasil pengembalian dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PD.BPR Kabupaten Kuningan.



Proyek Dana Bergulir tersebut merupakan Proyek Pengembangan Ekonomi yang dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2006.

6.3.1.2.2 Dana Bergulir Tak Tertagih

Dana Bergulir Tak Tertagih merupakan Investasi Dana Bergulir yang tidak tertagis sebesar nilai Invesatsi Non Permanen Lainnya yaitu minus (Rp202.042.068,00). Nilai ini merupakan nilai penyisihan atas Investasi Non Permanen berupa Dana bergulir tak tertagih yang terdapat di Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Nilai tersebut masih sama dengan nilai tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Dana bergulir Tak tertagih	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-
	Jumlah	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-

6.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp95.915.104.233,68, sesuai dengan Laporan BUMD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Berikut daftar Investasi Jangka Panjang Permanen:

NO	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TAHUN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL S.D 2022 (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL S.D 2021 (Rp)	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN (Rp)	%
1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	1973 / 1974	28.637.380.059,00	30.286.522.666,00	(1.649.142.607,00)	(5,45)
2	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	2015	3.017.284.401,68	3.078.730.372,38	(61.445.970,70)	(2,00)
3	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	1989 / 1990	47.100.138.594,00	52.757.145.927,00	(5.657.007.333,00)	(10,72)
4	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	2010	5.334.190.789,00	5.246.585.942,00	87.604.847,00	1,67
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1981 / 1982	11.826.110.390,00	9.326.111.000,00	2.499.999.390,00	26,81
	JUMLAH		95.915.104.233,68	100.695.095.907,38	(4.779.991.673,70)	(4,75)

Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Metode Penilaian Investasi



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

No.	Nama Investee	Komposisi Kepemilikan Saham		Persentase Kepemilikan Akhir (%)	Metode Penilaian*		Kriteria Metode Penilaian Investasi
		Pemerintah Kabupaten Kuningan (Rp)	Total Kepemilikan Saham (Rp)		Biaya (Cost)	Ekuitas (Equity)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Seri A	7.199.277.500,00	2.630.360.921.500,00	0,29%	✓		Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Seri B	461.254.500,00			✓		
2	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	17.035.000.000,00	17.035.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
3	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
4	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	60,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
5	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning		37.500.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
	Jumlah	77.695.532.000,00	2.739.895.921.500,00				

b. Perhitungan Nilai Investasi

No.	Nama Investee	Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Bagian Laba Yang Disetorkan Ke Kasda (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	6	7	15=3+4+5-6
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	11.826.110.390,00	-	-	3.036.941.306,00	11.826.110.390,00
2	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	9.496.801.470,00	(4.311.932.241,00)	149.321.560,00	-	5.334.190.789,00
3	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	19.382.446.303,00	8.171.030.447,00	2.882.709.124,00	1.798.805.815,00	28.637.380.059,00
4	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	3.274.684.241,00	(227.812.473,31)	(29.587.366,01)	-	3.017.284.401,68
5	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	85.051.456.067,00	(39.076.893.917,00)	3.428.612.491,00	2.303.036.047,00	47.100.138.594,00
	Jumlah	129.031.498.471,00	(35.445.608.184,31)	6.431.055.808,99	7.138.783.168,00	95.915.104.233,68



Berdasarkan perhitungan tabel di atas, nilai investasi total tahun 2022 adalah sebesar Rp95.915.104.233,68. Sebagai catatan, khusus untuk PT. Bank BJB nilai penyeteroran bagian laba tidak menjadi pengurang dikarenakan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya.

6.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.702.590.287.639,78 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal Per 31 Des 2021 (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp-)	%
	Aset Tetap				
1	Tanah	679.451.914.910,33	802.105.752.403,00	122.653.837.492,67	18,05
2	Peralatan dan Mesin	807.147.540.129,67	870.181.347.747,67	63.033.807.618,00	7,81
3	Gedung dan Bangunan	1.394.703.186.722,40	1.487.226.086.352,40	92.522.899.630,00	6,63
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.107.869.347.256,58	2.217.973.923.924,58	110.104.576.668,00	5,22
5	Aset Tetap Lainnya	75.601.680.830,70	78.468.569.935,70	2.866.889.105,00	3,79
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.991.674.900,00	-	(36.991.674.900,00)	(100,00)
7	Akumulasi Penyusutan Aset	(2.561.524.099.752,57)	(2.753.365.392.723,57)	(191.841.292.971,00)	7,48
	Jumlah Aset	2.540.241.244.997,11	2.702.590.287.639,78	162.349.042.642,67	6,39

6.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp802.105.752.403,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Tanah	802.105.752.403,00	679.451.914.910,33	122.653.837.492,67	18,05

Penambahan Aset Tanah sebesar Rp122.653.837.492,67 diperoleh dari Nilai Aset Tanah Tahun 2022 sebesar Rp802.105.752.403,00 dikurangi nilai Aset Tanah Tahun 2021 sebesar Rp679.451.914.910,33. Rincian Aset Tanah Per SKPD terdapat pada lampiran 14.

Nilai tersebut terbentuk dari mutasi tambah dan kurang selama periode berjalan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Penambah (Rp)	Penambah (Rp)	Per 31 Des 2022
1	Tanah	679.451.914.910,33	127.865.915.376,00	5.212.077.883,33	802.105.752.403,00
a.	Penambah:				
	Penambahan dari belanja modal tahun 2022 sebesar		26.751.824.467,00		
	Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2022 sebesar		186.080.708,00		
	Hibah berupa Fasilitas Sosial dan fasilitas Umum di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar		95.663.742.317,67		



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Penambah (Rp)	Penambah (Rp)	Per 31 Des 2022
	Mutasi dari Dinkes ke RSUD 45		5.184.077.883,33		
	Aset tanah yang belum tercatat berupa tanah ex PD BPR		80.190.000,00		
b.	Pengurang:				
	Mutasi Antar SKPD			5.184.077.883,33	
	Penghapusan Aset Tanah yang dihibahkan ke Kementerian Agama sebesar .			28.000.000,00	
	Jumlah	679.451.914.910,33	127.865.915.376,00	5.212.077.883,33	802.105.752.403,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp127.865.915.325,67 berasal dari:
- Belanja modal sebesar Rp26.751.824.467,00
 - Utang tunda bayar sebesar Rp186.080.708,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Tanah Jalan Akses Kantor Kemenag di Komplek KIC.
 - Hibah masuk sebesar Rp95.663.742.317,67 pada SKPKD terdiri dari :

No.	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Fasum fasos – Tanah Perumahan Griya Nuansa Lestari Ancaran	12.223.952.100,00
2	Fasum fasos – Tanah Perumahan Griya Nuansa Lestari Sindangagung	7.249.291.160,00
3	Fasum fasos - Tanah Perumahan Alam Asri Desa Kasturi	36.680.587.524,80
4	Fasum fasos – Tanah Perumahan Taman Jananuraga Asri Kelurahan cirendang	11.949.864.000,00
5	Fasum fasos – Tanah Perumahan Griya Kuningan Permai	15.713.288.000,00
6	Fasum fasos – Tanah Perumahan Alam Asri Ciawigebang	11.691.759.532,87
7	Hibah Kemenag – Tanah Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)	155.000.000,00
	JUMLAH	95.663.742.317,67

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 5.184.077.883,33
 - Belum tercatat sebesar Rp. 80.190.000,00 pada SKPKD berupa Tanah Eks PD BPR Luragung Kecamatan Luragung.
- b. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp. 5.212.077.883,33
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 5.184.077.883,33
 - Penghapusan Hibah sebesar Rp. 28.000.000,- berupa hibah tanah ke Kementerian Agama yang terletak di Blok Djajar Kel. Winduherang Nomor sertipikat 6 tanggal 10 Maret 2015 berdasarkan SK



penghapusan Nomor 029/KPTS.215-BPKAD/2022 tanggal 10 Maret 2022.

6.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp870.181.347.747,67 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Peralatan dan Mesin	870.181.347.747,67	807.147.540.129,67	63.033.807.618,00	7,81

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.033.807.618,00 yaitu nilai peralatan mesin tahun 2022 sebesar Rp870.181.347.747,67 dikurangi nilai peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar 807.147.540.129,67 dengan rincian aset peralatan dan mesin per SKPD pada lampiran 15.

Sedangkan rincian mutasi aset peralatan mesin dapat dilihat pada tabel berikut beserta penjelasannya.

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	807.147.540.129,67	78.862.686.897,00	15.828.879.279,00	870.181.347.747,67
Penambah:				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	-	49.977.556.706,00	-	-
Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal	-	9.135.490.601,00	-	-
Mutasi antar SKPD	-	7.161.193.984,00	-	-
Reklas dari KIB C	-	232.558.597,00	-	-
Reklas dari KIB D	-	195.819.000,00	-	-
Reklas dari KIB E	-	124.396.694,00	-	-
Reklas dari Barang Pakai Habis	-	600.674.800,00	-	-
Tambahan dari Hibah Non APBD	-	11.181.072.500,00	-	-
Tambahan dari Aset Belum Tercatat	-	104.120.015,00	-	-
Reklas dari Utang Barang dan Jasa	-	149.804.000,00	-	-
Pengurang:				
Reklas ke Barang Pakai Habis	-	-	619.829.312,00	-
Koreksi Neraca 2021 atas Penghapusan yg belum tercatat	-	-	2.500.000,00	-
Mutasi Antar SKPD	-	-	7.161.193.984,00	-
Reklas ke KIB C	-	-	823.586.350,00	-
Reklas ke ATB	-	-	21.978.000,00	-
Reklas ke Aset Rusak Berat	-	-	5.464.917.718,00	-
Reklas ke Ekstrakomtable	-	-	1.734.873.915,00	-
Jumlah	807.147.540.129,67	78.862.686.897,00	15.828.879.279,00	870.181.347.747,67

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp78.862.686.896,00 berasal dari :
 - Belanja modal sebesar Rp49.977.556.706,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- Utang tunda bayar dari rekening belanja modal sebesar Rp9.135.490.601,00
- Utang tunda bayar dari rekening barang dan jasa sebesar Rp149.804.000,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.161.193.984,00
- Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp232.558.597,00
- Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp195.819.000,00
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp124.396.694,00
- Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis sebesar Rp600.674.800,00, terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	KET
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000,00	Microphone
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP & PA	497.000.000,00	Printer & PC unit
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	95.249.800,00	Alat kantor dan rumah tangga (Televisi, Mic, dll)
4	Kecamatan Maleber	6.925.000,00	Plang Kantor
JUMLAH		600.674.800,00	

- Hibah masuk sebesar Rp11.181.072.500,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.532.072.500,00	Hibah Dari Kemenbudristek berupa Bantuan Peralatan Tik
2	Satuan Polisi Pamong Praja	3.649.000.000,00	Hibah Dari Pemprov Dki Jakarta berupa Mobil Pemadam Kebakaran
Jumlah		11.181.072.500,00	

- Belum tercatat/ koreksi nilai sebesar Rp104.120.105,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Dinas Kesehatan	15,00	Koreksi Pembulatan
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	60.000.000,00	Kendaraan Pick-up belum tercatat
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.120.000,00	Kendaraan Jeep belum tercatat
JUMLAH		104.120.015,00	

- b. Pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp15.828.879.278,00 berasal dari :



- Barang Pakai Habis sebesar Rp619.829.312,00 terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150.796.263,00	Alat praktek dan peraga sekolah
2	Dinas Kesehatan	126.566.370,00	Alat Kesehatan
3	Badan Rsud' 45	181.587.599,00	Alat Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah "Linggajati" Kabupaten Kuningan	74.232.048,00	Alat Kesehatan
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.750.000,00	Alat Pemadam berupa Senter & Helm
6	Dinas Sosial	522.000,00	Perlengkapan rumah tangga berupa Tabung gas
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.166.000,00	Perlengkapan kantor berupa kain Latar & CDRW
8	Dinas Perhubungan	9.103.232,00	Perlengkapan kantor berupa Kabel UTP & Connector
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	58.209.800,00	Alat Peraga Edukasi berupa Permainan Anak
10	Sekretariat Daerah	1.554.000,00	Perlengkapan rumah tangga berupa bantal guling
11	Kecamatan Cimahi	1.342.000,00	Perlengkapan rumah tangga berupa Tabung gas
JUMLAH		619.829.312,00	

- Koreksi neraca sebesar Rp2.500.000,00 pada Kecamatan Cibingbin berupa penghapusan sepeda motor berdasarkan SK Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemkab Kuningan yang Merupakan Kendaraan Dinas Operasional Kepala Desa /029/Kpts. 226-Bpkad/2015
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.161.193.984,00
- Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp823.586.350,00
- Reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp21.978.000,00
- Reklasifikasi ke aset rusak berat sebesar Rp5.464.917.718,00
- Reklasifikasi ke ekstrakomtable sebesar Rp1.734.873.915,00

6.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.487.226.086.352,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Gedung dan Bangunan	1.487.226.086.352,40	1.394.703.186.722,40	92.522.899.630,00	6,63



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Terdapat penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.522.899.630,00 atau 6,63% pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan rincian Aset Gedung dan Bangunan per SKPD pada lampiran 16.

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	1.394.703.186.722,40	169.347.941.305,00	76.825.041.675,00	1.487.226.086.352,40
a.	Penambah:				
	Belanja Modal sebesar		66.623.156.876,00		
	Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal		11.235.852.611,00		
	Mutasi Antar SKPD		41.513.744.269,00		
	Koreksi belum tercatat		10.662.909.000,00		
	Reklas dari KIB B		823.586.350,00		
	Reklas dari KIB D		1.469.517.299,00		
	Reklas dari KIB E		27.500.000,00		
	Reklas dari KIB F		36.991.674.900,00		
b.	Pengurang:				
	Mutasi Antar SKPD			41.513.744.269,00	
	Reklas ke Barang Pakai Habis			12.500.000,00	
	Reklas ke Beban Pemeliharaan			47.313.403,00	
	Reklas ke Penghapusan			22.559.466.193,00	
	Reklas ke Etrakomtable			223.405.000,00	
	Reklas ke KIB B			232.558.597,00	
	Pemindahtanganan			11.100.747.213,00	
	Reklas Gedung Ex Kosgoro Ke Aset Tetap Lainnya			1.135.307.000,00	
	Jumlah	1.394.703.186.722,40	169.347.941.305,00	76.825.041.675,00	1.487.226.086.352,40

Berikut penjelasan dari tabel diatas:

- a. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp169.347.941.305,00 berasal dari :
- Belanja Modal sebesar Rp.66.623.156.876,00
 - Utang tunda bayar Rp11.235.852.611,00 terdiri dari:

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.920.612.200,00
2	Dinas Kesehatan	264.207.881,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	8.863.694.380,00
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	99.170.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	14.198.950,00
6	Dinas Perhubungan	66.489.350,00
7	Inspektorat Kabupaten	7.479.850,00
JUMLAH		11.235.852.611,00

- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp41.513.744.269,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- Belum Tercatat sebesar Rp10.662.909.000,00 pada SKPKD berupa Bangunan Gedung Pertokoan Siliwangi dan Langlang Buana.
 - Reklasifikasi dari Aset Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp36.991.674.900,00 berupa Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah di Lingkungan Islamic Center
 - Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp823.586.350,00
 - Reklasifikasi dari Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.469.517.299,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.27.500.000,00
- b. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp76.825.041.675,00 berasal dari :
- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp41.513.744.269,00
 - Persediaan/Pakai Habis sebesar Rp12.500.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa :

No	Uraian Persediaan/Pakai Habis	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif	5.000.000
2	Bangunan Kesehatan Lainnya	7.500.000
JUMLAH		12.500.000

- Pemeliharaan sebesar Rp47.313.403,00 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa :

No.	Uraian Pemeliharaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	9.512.700	Pekerjaan Pengecatan Dinding / Reklas Barjas
2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	10.273.050	Pemeliharaan ACP / Reklas Barjas
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	8.323.335	Perbaikan Meja Disdukcapil / Reklas Barjas
4	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	9.156.501	Pekerjaan Penutupan Jendela / Reklas Barjas
5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	10.047.817	Pemasangan Wallpaper
JUMLAH		47.313.403	

- Penghapusan sebesar Rp22.559.466.193,00 terdiri dari :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	21.111.834.193
2	Dinas Kesehatan	1.447.632.000
JUMLAH		22.559.466.193



- Reklasifikasi ke Ekstrakomtable Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp223.405.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp232.558.597,00
- Reklasifikasi ke Pemindahtanganan sebesar Rp11.100.747.215,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.135.307.000,00.

6.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.217.973.923.924,58 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.217.973.923.924,58	2.107.869.347.256,58	110.104.576.668,00	5,22

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp110.104.576.668,00 jika dibanding dengan aset tahun 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada lampiran 17.

Mutasi nilai aset jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.107.869.347.256,58	118.701.286.250,00	8.596.709.582,00	2.217.973.923.924,58
a.	Penambah:				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar		79.711.956.467,00		
	Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal sebesar		36.136.908.300,00		
	Mutasi Antar SKPD.		2.852.421.483,00		
b.	Pengurang:				
	Mutasi Antar SKPD			2.852.421.483,00	
	Reklas ke KIB B			195.819.000,00	
	Reklas ke KIB C			1.469.517.299,00	
	Reklas ke Beban Pemeliharaan			3.746.830.800,00	
	Reklas ke Pemindahtanganan			332.121.000,00	
	Jumlah	2.107.869.347.256,58	118.701.286.250,00	8.596.709.582,00	2.217.973.923.924,58

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp119.667.983.950,00 berasal dari :
 - Belanja Modal sebesar Rp79.711.956.467,00
 - Utang tunda bayar (Rek.Belanja Modal) Rp36.136.908.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp2.852.421.483,00
- b. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.563.407.282,00 berasal dari :
 - Mutasi Antar SKPD sebesar Rp2.852.421.483,00
 - Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp195.819.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.469.517.299,00
 - Pemeliharaan sebesar Rp3.746.830.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Jalan Kabupaten Arteri.
 - Reklasifikasi ke Pemindahtanganan sebesar Rp332.121.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

6.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp78.468.569.935,70 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Tetap Lainnya	78.468.569.935,70	75.601.680.830,70	2.866.889.105,00	3,80

Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai aset sebesar Rp2.866.889.105,00 atau 3,80% dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp75.601.680.830,70 menjadi Rp78.468.569.935,70. Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD ada pada lampiran 18. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	75.601.680.830,70	8.395.244.933,00	5.528.355.828,00	78.468.569.935,70
a.	Penambah:				
	Belanja Modal		6.792.438.933,00		
	Utang Belanja Modal		81.918.000,00		
	Reklas dari Utang Barang dan Jasa		385.581.000,00		
	Reklas dari KIB C		1.135.307.000,00		
b.	Pengurang:				
	Reklas ke Beban Barang Pakai Habis			78.764.000,00	
	Reklas ke KIB B			124.396.694,00	
	Reklas ke Ekstrakomtabel			5.240.511.134,00	
	Reklas ke ATB			57.184.000,00	
	Reklas ke KIB C			27.500.000,00	
	Reklas ke KIB B			-	
	Jumlah	75.601.680.830,70	8.395.244.933,00	5.528.355.828,00	78.468.569.935,70

6.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Nihil dengan rincian sebagai berikut :



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Konstruksi dalam pengerjaan	-	36.991.674.900,00	(36.991.674.900,00)	(100)

Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya reklas dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Gedung Bangunan sebesar Rp36.991.674.900,00. Aset tersebut berupa Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah di Lingkungan Islamic Center.

6.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.753.388.098.863,57) mengalami kenaikan sebesar Rp191.863.999.111,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan	(2.753.365.392.723,57)	(2.561.524.099.752,57)	(191.841.292.971,00)	7,48

Terdapat kenaikan nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp191.841.292.971,00 atau sebesar 7,48% selama Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Berikut adalah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 per KIB dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(573.114.092.060,75)	(112.015.173.401,16)	(7.548.050.686,64)	(677.581.214.775,27)
2	Gedung dan Bangunan	(411.195.821.173,87)	(30.094.447.773,46)	(8.096.259.078,55)	(433.194.009.868,78)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.577.214.186.517,95)	(65.490.078.420,89)	(114.096.859,32)	(1.642.590.168.079,52)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(2.561.524.099.752,57)	(207.599.699.595,51)	(15.758.406.624,51)	(2.753.365.392.723,57)

Perlu dijelaskan bahwa untuk penambah dan pengurang nilai akumulasi penyusutan, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Uraian	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)
KIB B		
Hibah	(3.649.000.000,00)	
Mutasi Skpd	(2.147.835.537,62)	
Belum Tercatat	(104.120.000,00)	
Beban Tahun Berjalan	(106.114.217.863,54)	
Koreksi Neraca Awal		(2.500.000,00)
Mutasi Skpd		(2.147.835.537,62)
Reklasifikasi Rusak Berat		(5.397.715.149,02)
	(112.015.173.401,16)	(7.548.050.686,64)
KIB C		
Mutasi Skpd	(957.561.209,34)	



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)
Beban Tahun Berjalan	(29.136.886.564,12)	
Koreksi		(115.810.560,00)
Mutasi Skpd		(957.561.209,34)
Penghapusan		(7.000.181.169,21)
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya		(22.706.140,00)
	(30.094.447.773,46)	(8.096.259.078,55)
KIB D		
Mutasi	(114.096.859,32)	
Beban Tahun Berjalan	(65.375.981.561,57)	
Mutasi Skpd		(114.096.859,32)
	(65.490.078.420,89)	(114.096.859,32)
Jumlah	(207.599.699.595,51)	(15.758.406.624,51)

Adapun rincian per KIB serta SKPD nya terdapat pada lampiran 19 – lampiran 21.

6.3.1.4 Dana Cadangan

6.3.1.4.1 Pembentukan Dana Cadangan

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Dana Cadangan. Dana tersebut disimpan di Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Bank BJB Kuningan sebesar Rp15.000.000.000,00.

Tujuan dibentuk Dana Cadangan tersebut adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dana Cadangan ini baru dibentuk pada Tahun Anggaran 2022, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	-
	Jumlah	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	-

6.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.349.640.092,28. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.583.876.459,80) dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Tagihan Jangka Panjang (TGR)	391.182.024,43	-	391.182.024,43	-
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(56.999.270,63)	-	(56.999.270,63)	-
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.073.344.000,00	10.073.344.000,00	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	11.216.365.858,00	10.529.832.858,00	686.533.000,00	6,52



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No.	Uraian	31-Des-2022 (Rp)	31-Des-2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
5	Aset Lain-lain	51.717.170.318,95	52.917.163.602,95	(1.199.993.284,00)	(2,27)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(38.868.249.782,47)	(32.754.576.828,47)	(6.113.672.954,00)	18,67
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.876.826.944,00	-	7.876.826.944,00	100,00
	Jumlah	42.349.640.092,28	40.765.763.632,48	1.583.876.459,80	3,89

6.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang (TGR)

Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp391.182.024,43. Berikut rincian nilai Tuntutan Ganti Kerugian tahun 2022:

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	LHP	Nilai Tagihan Jangka Panjang TGR (Rp)
Yang Bersumber dari PNS				
1	Drs. SUNARDI, MM	Apr-21	APIP 2010	36.800.000,00
2	DJUANDA	2018	APIP 2010	50.000.000,00
3	DUDIANA, S.IP	01-12-21	APIP 2010	6.600.000,00
4	WAWAN SUPMAR HADIWIJAYA	01-12-21	APIP 2013	832.812,50
5	Drs. JAJA MOHAMAD PAOJAN	2018		24.500.000,00
6	YAYAN JUNIANDRANI, SE., ST., M.Si	Apr-21	APIP 2019	130.039.361,74
7	DUDUNG ABDUROHMAN	Jan-22	APIP 2021	56.725.250,00
8	TOTO SAPTORI	Jan-22	APIP 2021	9.540.100,00
	Jumlah			315.037.524,24
Yang Bersumber dari Penyedia Jasa				
1	Anugerah Jaya	Feb-21	LKPD 2019	16.947.410,01
2	Cahaya Fajar Utama	Apr-22	Belanja 2019	8.131.672,96
3	Putri Jaya	Maret 2022	APIP 2021	2.539.672,00
4	Surya Berkah Utama	Apr-22	Belanja 2019	5.786.311,44
5	Dian Varista	Jun-22	Belanja 2016	3.338.367,61
6	Limar Pelangi	Jun-22	LKPD 2021	5.272.822,47
7	Kelompok Tani Mekar Saluyu	Des 2022	LKPD 2019	5.152.070,94
8	Kelompok Tani Rahayu	Mei 2022	LKPD 2019	20.823.461,29
9	Kuda Mas	Jun-22	LKPD 2020	4.055.900,00
10	Vidya Karya	Jul-22	LKPD 2020	4.096.811,48
	Jumlah			76.144.500,19
	Jumlah Total			391.182.024,43

6.3.1.5.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp56.999.270,63). Nilai ini merupakan Nilai Penyisihan atas Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi. Nilai tersebut baru ditampilkan di Neraca Tahun 2022 dikarenakan nilai penyisihan TGR di Tahun 2021 dicatat di penyisihan piutang. Gambarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(56.999.270,63)	-	(56.999.270,63)	-
	Jumlah	(56.999.270,63)	-	(56.999.270,63)	-



6.3.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.073.344.000,00, terdiri dari:

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Tanah Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-
2	Gedung dan Bangunan Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat yang terdiri dari 48 unit toko	8.823.344.000,00	8.823.344.000,00	-	-
	Jumlah	10.073.344.000,00	10.073.344.000,00	-	-

Aset Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut disewakan kepada pihak ketiga melalui surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan para penyewa pertokoan Siliwangi.

6.3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.216.365.858,00 atau meningkat sebesar Rp686.533.000,00.

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	11.216.365.858,00	10.529.832.858,00	686.533.000,00	6,52

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD pada lampiran 22. Adapun penambah dan pengurang Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	10.529.832.858,00	686.533.000,00	-	11.216.365.858,00
a.	Penambah:				
	Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin		21.978.000,00		
	Reklas dari Aset Tetap Lainnya		57.184.000,00		
	Reklas dari Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		81.918.000,00		
	Reklas dari Utang Belanja Jasa		426.575.000,00		
	Reklas dari Belanja Jasa		98.878.000,00		
	Jumlah	10.529.832.858,00	686.533.000,00	-	11.216.365.858,00

6.3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.717.170.318,95 atau menurun sebesar (Rp1.199.993.284,00) dari aset lain-lain per 31 Desember 2021.

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Rusak Berat	44.486.752.765,92	39.530.745.049,95	4.956.007.715,97	12,54
2	Pemindahtanganan	6.389.928.000,03	12.545.929.000,00	(6.156.000.999,97)	(49,07)
3	Aset Lainnya	840.489.553,00	840.489.553,00	-	-
	Jumlah	51.717.170.318,95	52.917.163.602,95	(1.199.993.284,00)	(2,27)



Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Rusak Berat	39.530.745.049,95	12.359.281.535,00	7.403.273.817,00	44.486.752.767,95
	Reklas dari aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat	-	5.464.917.718,00		
	Mutasi aset rusak berat antar SKPD	-	6.894.363.817,00		
	Mutasi aset rusak berat antar SKPD	-	-	6.894.363.817,00	
	Penghapusan aset rusak berat	-	-	508.910.000,00	
2	Pemindahtanganan	12.545.929.000,00	11.432.868.213,00	17.588.869.215,00	6.389.927.998,00
	Pemindahtanganan Aset Tanah sebesar	9.873.227.000,00			
	Pemindahtanganan Aset Gedung dan Bangunan sebesar	2.335.993.000,00	11.100.747.213,00		
	Pemindahtanganan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar	336.709.000,00	332.121.000,00		
	Hibah JIJ ke Desa & Instansi vertikal lainnya			17.588.869.215,00	
3	Aset Lainnya	840.489.553,00	-	-	840.489.553,00
	Jumlah	52.917.163.602,95	23.792.149.748,00	24.992.143.032,00	51.717.170.318,95

Selain Aset Lain-Lain sebesar Rp51.717.170.318,95, terdapat Aset Ekstrakomtable sebesar Rp117.074.484.020,56. Namun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dimana untuk Aset Ekstrakomtable tidak ditampilkan di face LKPD namun cukup diungkapkan di CALK. Nilai aset ekstrakomtable ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.160.879.081,56 adalah belanja modal di bawah nilai kapitalisasi.

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Ekstrakomtable	117.074.484.020,56	109.913.604.939,00	7.160.879.081,56	6,52

Untuk rincian per SKPD dapat dilihat pada lampiran 23.

6.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar (Rp38.868.249.782,47), dengan rincian:

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(529.400.639,70)	(529.400.639,70)	-	-
2	Aset Tak Berwujud	(9.924.912.802,60)	(8.947.004.997,62)	(977.907.804,98)	10,93
3	Rusak berat	(28.046.479.870,74)	(22.910.714.721,72)	(5.135.765.149,02)	22,42
4	Aset Lain-Lain	(367.456.469,43)	(367.456.469,43)	-	-
	Jumlah	(38.868.249.782,47)	(32.754.576.828,47)	(6.113.672.954,00)	18,59

Berdasarkan tabel diatas, akumulasi penyusutan aset lainnya mengalami kenaikan dibanding dengan akumulasi penyusutan tahun 2021 yaitu sebesar (Rp6.113.672.954,00). Sedangkan untuk penjelasan mutasi perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(529.400.639,70)	-	-	(529.400.639,70)
2	Aset Tak Berwujud	(8.947.004.997,62)	(977.907.804,98)	-	(9.924.912.802,60)
3	Penyusutan Tahun Berjalan	-	(977.907.804,98)	-	-
	Rusak berat	(22.910.714.721,72)	(5.397.715.149,02)	(261.950.000,00)	(28.046.479.870,74)
	Reklasifikasi dari KIB B	-	(5.397.715.149,02)	-	-
	Penghapusan	-	-	(261.950.000,00)	-
4	Aset Lainnya	(367.456.469,43)	-	-	(367.456.469,43)
	Jumlah	(32.754.576.828,47)	(6.375.622.954,00)	(261.950.000,00)	(38.868.249.782,47)

Untuk rincian per SKPD dijelaskan pada lampiran 24.

6.3.1.5.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2022 terdapat Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp7.876.826.944,00. Dana tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/WPB.13/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo Rekening Teasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF – TKD) Tahun 2022, disampaikan saldo Rekening Lain di BI TDF TKD Kabupaten Kuningan 519000315980 pada Kantor Pusat BI per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.876.826.944,00.

Perbandingan nilai DBH TDF tersebut baru terdapat di Neraca Per 31 Desember 2022 karena pada Tahun 2021 tidak terdapat dana DBH TDF, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
					%
1	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.876.826.944,00	-	7.876.826.944,00	100,00
	Jumlah	7.876.826.944,00	-	7.876.826.944,00	100,00

6.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp270.571.782.849,16 mengalami kenaikan sebesar Rp192.010.344.383,91 dibanding dengan kewajiban tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kewajiban jangka Pendek	270.571.782.849,16	78.561.438.465,25	192.010.344.383,91	244,41
	Jumlah	270.571.782.849,16	78.561.438.465,25	192.010.344.383,91	244,41

6.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp270.571.782.849,16 dengan rincian :



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	359.571.042,00	56.194.726,00	303.376.316,00	539,87
2	Pendapatan Diterima Dimuka	15.939.401.070,04	4.905.511.357,25	11.033.889.712,79	224,93
3	Utang Belanja	245.035.240.875,12	700.355.040,00	244.334.885.835,12	34.887,29
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.237.569.862,00	72.899.377.342,00	(63.661.807.480,00)	(87,33)
	Jumlah	270.571.782.849,16	78.561.438.465,25	192.010.344.383,91	244,41

6.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp359.571.042,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp303.376.316,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	359.571.042,00	56.194.726,00	303.376.316,00	539,87

Rincian Utang PFK per SKPD terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Lingkungan Hidup	3.727.477,00	9 Januari 2023
2	Dinas Perhubungan	3.439.369,00	4 Januari 2023
3	Sekretariat DPRD	293.302.880,00	22 Februari 2023 2 dan 3 Maret 2023
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113.800,00	Maret 2023
5	Kecamatan Cigugur	4.174.000,00	Maret 2023
6	Kecamatan Cilimus	155.000,00	16 Januari 2023
7	Kecamatan Kadugede	1.188.438,00	5 dan 6 Januari
8	Kecamatan Kuningan	13.663.715,00	16 Januari 2023
9	Kecamatan Luragung	21.752.343,00	10 Maret 2023
10	Kecamatan Cimahi	3.416.329,00	16 Januari 2023
11	Kecamatan Ciniru	2.459.628,00	16 Januari 2023
12	Kecamatan Selajambe	2.594.814,00	5 Januari 2023
13	Kecamatan Cidahu	9.583.249,00	5 Januari 2023
	Jumlah	359.571.042,00	

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Utang PFK tertinggi pada Sekretariat DPRD. Nilai tersebut yang menjadi salah satu penyebab naiknya nilai Utang PFK Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

6.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.939.401.070,04 yang dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	15.939.401.070,04	4.905.511.357,25	11.033.889.712,79	224,93
	Jumlah	15.939.401.070,04	4.905.511.357,25	11.033.889.712,79	224,93



Rincian dari Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak diterima Dimuka (Bapenda)	1.245.005.665,88
2	Pendapatan Retribusi diterima Dimuka (BPKAD)	14.554.951.263,96
3	Lain-Lain PAD diterima Dimuka (RSUD'45)	139.444.140,20
Jumlah		15.939.401.070,04

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

- Pendapatan dari Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp1.245.005.665,88 .
- Pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah yaitu Sewa Pertokoan Jalan Siliwangi Kuningan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp14.554.951.263,96.
- Pendapatan atas sewa bangunan oleh Bank BJB untuk kantor kas di RSUD 45 Kuningan sebesar Rp139.444.140,20

Rincian perhitungan Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

6.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp245.035.240.875,12 dapat dirinci per jenis utang belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	110.064.735.085,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	78.194.255.570,12
3	Utang Belanja Modal	56.776.250.220,00
Jumlah		245.035.240.875,12

Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp110.064.735.085,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Iuran BPJS 4%	39.655.124.947,00
2	Insentif Pemungut Pajak	1.237.111.468,00
3	TPP bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022	30.185.708.970,00
4	Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru Bulan Nopember dan Desember 2022	38.986.789.700,00
Jumlah		110.064.735.085,00

Untuk utang Iuran BPJS 4% sebesar Rp39.655.124.947,00 diakui sebagai utang berdasarkan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terkait batas tertinggi perhitungan Iuran Wajib 4% adalah sebesar Rp12.000.000,00, dimana dalam ketentuan tersebut berlaku surut.

Sedangkan untuk Insentif Pemungut Pajak sebesar Rp1.237.111.468,00 diakui sebagai utang berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati



Kuningan Nomor 27 Tahun 2020 Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan.

Utang Tambahan Penghasilan Pegawai diakui sebagai utang selama 3 bulan yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022 sebesar Rp30.185.708.970,00, dimana dalam APBD Tahun 2022 baru dianggarkan 9 bulan.

Utang Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi Guru diakui sebagai utang untuk Bulan Nopember dan Desember 2022 sebesar Rp38.986.789.700,00 dan merupakan kewajiban tahun 2022 yang dianggarkan kembali di tahun 2023.

Rincian Utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp78.194.255.570,12 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang jasa Kantor seperti, Listrik, Telepon Air, Surat Kabar dan Lain-Lain	1.848.292.645,00
2	Utang Jamkesda pada Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Swasta	8.638.863.401,00
3	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Utang Obat pada RSUD 45 Kuningan	18.381.838.560,00
4	Utang Jasa Pelayanan, utang Obat, Bahan Lab dan Lain-Lain di RSUD Linggajati	11.589.684.538,00
5	Utang Belanja Barang dan Jasa atas kegiatan Tahun 2022 (tunda bayar).	37.735.576.426,12
Jumlah		78.194.255.570,12

Berikutnya yaitu Utang Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp56.776.250.220,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Modal Tanah	186.080.708,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.174.314.601,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.230.330.911,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.103.606.000,00
5	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	81.918.000,00
6	Utang Belanja Modal Aset Lain-Lain	-
Jumlah		56.776.250.220,00

Rincian Utang Belanja per SKPD pada lampiran 26.

Untuk utang belanja Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp38.986.789.700,00, Utang Belanja Barang dan Jasa (tunda bayar) sebesar Rp37.735.576.426,12 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp56.776.250.220,00, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah merencanakan skema pendanaan dan pembayaran sebagai berikut:

1. Bulan Februari 2023 sebesar Rp49.047.202.120,00
2. Bulan Maret 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00
3. Bulan April 2023 sebesar Rp35.710.857.846,00



Sedangkan untuk utang BPJS sebesar Rp39.655.124.947,00 pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak menganggarkan dan akan dianggarkan pada tahun 2024, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Realisasi pembayaran utang belanja sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 sudah terbayar sebesar Rp162.519.250.644,00 atau 66,32%, terdiri dari:

NO	URAIAN	Nilai Utang	Nilai yang dibayar	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	110.064.735.085,00	70.409.610.138,00	63,97
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	78.194.255.570,12	37.402.511.394,00	47,83
3	Utang Belanja Modal	56.776.250.220,00	54.707.129.112,00	96,36
Jumlah		245.035.240.875,12	162.519.250.644,00	66,32

Realisasi pembayaran utang tersebut termasuk nilai SILPA DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp86.905.552.460,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai utang belanja di Tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	31-Des-2022	31-Des-2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Utang Belanja	245.035.240.875,12	700.355.040,00	244.334.885.835,12	34.887,29
Jumlah		245.035.240.875,12	700.355.040,00	244.334.885.835,12	34.887,29

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan nilai utang belanja sangat tinggi hingga mencapai 34.887%. Utang ini terjadi karena pada akhir bulan Desember 2022 dimana pada saat itu kegiatan-kegiatan telah selesai dilaksanakan dan diajukan untuk pembayarannya, namun pada saat itu pula ketersediaan kas di Kas Daerah tidak mencukupi untuk dilaksanakan pembayaran.

6.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.237.569.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.237.569.862,00	72.899.377.342,00	(63.661.807.480,00)	(87,33)
Jumlah		9.237.569.862,00	72.899.377.342,00	(63.661.807.480,00)	(87,33)

Utang jangka pendek pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp63.661.807.480,00 jika dibanding dengan utang jangka pendek tahun 2021. Penyebabnya adalah dikarenakan nilai utang jangka pendek lainnya tahun 2021 direklas menjadi utang belanja pegawai dan utang barang dan jasa, sesuai dengan akun yang terdapat di Permendagri 90 Tahun 2020.

Sedangkan Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2022 merupakan utang atas pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Utang tersebut dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 Tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan..



6.3.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.657.398.342.524,93, atau mengalami penurunan sebesar (Rp64.723.139.030,98) dari nilai ekuitas Per 31 Desember 2021. Rincian ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Bertambah/ Berkurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Ekuitas	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,98)	(2,38)
	Jumlah	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,98)	(2,38)

6.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

6.4.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan – LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.469.365.904.992,62. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.448.584.548,45) jika dibandingkan dengan tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambah/ Pengurang (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	341.333.691.836,95	333.993.686.726,87	7.340.005.110,08	2,20
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.015.081.249.358,00	1.972.630.540.884,00	42.450.708.474,00	12,71
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	112.950.963.797,67	165.190.261.930,20	(52.239.298.132,53)	(15,64)
	Jumlah	2.469.365.904.992,62	2.471.814.489.541,07	(2.448.584.548,45)	(0,73)

6.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp341.333.691.836,95, yang terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambah/ Pengurang (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO				
a	Pendapatan Pajak Daerah – LO	110.759.877.744,37	91.959.309.119,17	18.800.568.625,20	20,44
b	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	66.187.356.683,70	60.535.832.199,66	5.651.524.484,04	9,34
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	7.138.783.168,00	8.297.019.413,04	(1.158.236.245,04)	(13,96)
d	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	157.247.674.240,88	173.201.525.995,00	(15.953.851.754,12)	(9,21)
	Jumlah	341.333.691.836,95	333.993.686.726,87	7.340.005.110,08	2,20

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah-LO di tahun 2022 sebesar Rp7.340.005.110,08. Kenaikan tertinggi adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp18.800.568.625,20. Menyusul berikutnya adalah Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Namun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022



mengalami penurunan sebesar (Rp1.158.236.245,04). Penyebabnya adalah menurunnya deviden dari BUMD.

Berikut penjelasan dari masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah-LO

6.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.759.877.744,37. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan Pajak Daerah-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Pajak Daerah – LO	107.678.513.745,00	4.560.091.033,37	101.637.674.193,00	3.317.865.342,00	99.798.535.885,00	110.759.877.744,37

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp107.678.513.745,00 adalah Pajak yang telah diterima oleh Kas Daerah;
- Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp4.560.091.033,37 merupakan pengurang pendapatan pajak reklame diterima dimuka;
- Pendapatan-LO yang belum diterima kasnya sebesar Rp101.637.674.193,00 merupakan penambahan Piutang Pajak Daerah;
- Belum diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp3.317.865.342,00 adalah penambah Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka;
- Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp99.798.535.885,00 merupakan pengurang Piutang Pajak Daerah.

Adapun rincian dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
	Pajak Daerah – LO				
1	Pajak Hotel	4.268.443.654,00	3.198.436.139,00	1.070.007.515,00	33,45
2	Pajak Restoran	11.511.274.537,00	9.325.925.898,00	2.185.348.639,00	23,43
3	Pajak Hiburan	1.527.264.580,00	841.495.068,00	685.769.512,00	81,49
4	Pajak Reklame	4.798.498.043,37	2.330.360.065,17	2.468.137.978,20	105,91
5	Pajak Penerangan Jalan	28.617.267.651,00	23.052.448.330,00	5.564.819.321,00	24,14
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	429.620.274,00	3.251.264.000,00	(2.821.643.726,00)	(86,79)
7	Pajak Parkir	178.884.544,00	348.385.657,00	(169.501.113,00)	(48,65)
8	Pajak Air Tanah	2.343.110.910,00	499.179.587,00	1.843.931.323,00	369,39
9	Pajak Bumi dan Bangunan	36.122.586.980,00	33.468.329.185,00	2.654.257.795,00	7,93
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.962.926.571,00	15.643.485.190,00	5.319.441.381,00	34,00
	Jumlah Pajak Daerah – LO	110.759.877.744,37	91.959.309.119,17	18.800.568.625,20	20,44

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021, maka terdapat peningkatan nilai Pendapatan Pajak daerah-LO di Tahun 2022 sebesar Rp18.800.568.625,20. Hanya terdapat dua pajak daerah yang



mengalami penurunan, yaitu pajak parkir dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

6.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.187.356.683,70 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	77.239.874.431,00	2.514.905.484,66	36.257.043.605,00	14.637.611.263,96	35.186.855.573,00	66.187.356.683,70

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.187.356.683,70 diperoleh dari :

- Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima di kas daerah sebesar Rp77.239.874.431,00;
- Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp2.514.905.484,66 merupakan penambah pendapatan LO yang terdiri dari pengurang Retribusi Diterima Dimuka Rp2.500.940.000,00 dan Kas di Rekening Bendahara Penerimaan FKTP sebesar Rp13.902.984,66 serta Kas Lainnya di Rekening Bendahara FKTP Rp62.500,00;
- Belum diakui sebagai Pendapatan-LO merupakan penambahan Pendapatan Piutang Retribusi sebesar Rp36.257.043.605,00 ;
- Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya merupakan penambah Pendapatan Retribusi diterima dimuka sebesar Rp14.637.611.263,96.
- Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp35.186.855.573,00 merupakan pengurang piutang Pendapatan Retribusi Daerah.

Adapun rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	66.187.356.683,70	60.535.832.199,66	5.651.524.484,04	9,34
a	Retribusi Pelayanan Umum	55.690.338.024,66	51.924.038.931,00	3.766.299.093,66	7,25
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	52.916.827.574,66	48.821.585.431,00	4.095.242.143,66	8,39
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	491.105.000,00	401.859.500,00	89.245.500,00	22,21
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	170.125.000,00	502.090.000,00	(331.965.000,00)	(66,12)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	490.223.450,00	467.858.000,00	22.365.450,00	4,78
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	629.505.000,00	652.270.000,00	(22.765.000,00)	(3,49)



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.350.000,00	10.590.000,00	2.760.000,00	26,06
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	44.104.000,00	54.028.000,00	(9.924.000,00)	(18,37)
8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.910.000,00	1.330.000,00	6.580.000,00	494,74
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	927.188.000,00	1.012.428.000,00	(85.240.000,00)	(8,42)
b	Retribusi Jasa Usaha	5.834.088.121,04	5.966.537.468,66	(132.449.347,62)	(2,22)
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.146.811.121,04	5.537.029.668,66	(390.218.547,62)	(7,05)
11	Retribusi Terminal	116.985.000,00	120.300.000,00	(3.315.000,00)	(2,76)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	28.894.000,00	27.921.500,00	972.500,00	3,48
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	504.051.000,00	238.975.300,00	265.075.700,00	110,92
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.347.000,00	42.311.000,00	(4.964.000,00)	(11,73)
C	Retribusi Perijinan Tertentu	4.662.930.538,00	2.645.255.800,00	2.017.674.738,00	76,28
16	IMB	4.599.195.038,00	2.578.423.300,00	2.020.771.738,00	78,37
17	Ijin Trayek	63.735.500,00	66.832.500,00	(3.097.000,00)	(4,63)
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	66.187.356.683,70	60.535.832.199,66	5.651.524.484,04	9,34

6.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan-LO selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.138.783.168,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan- LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan- LRA (Rp)	Pendapatan- LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan- LO (Rp)	Pendapatan- LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan- LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	7.138.783.168,00	-	-	-	-	7.138.783.168,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diperoleh dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp7.138.783.168,00 merupakan Bagian Laba yang disetorkan ke kas daerah.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Rincian penurunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambah/ Pengurangan (Rp)	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	7.138.783.168,00	8.297.019.413,04	(1.158.236.245,04)	(13,96)
1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	1.798.805.815,00	2.720.118.125,00	(921.312.310,00)	(33,87)
2	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	-	(63.991.114,96)	63.991.114,96	(100,00)
3	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	2.303.036.047,00	3.083.265.385,00	(780.229.338,00)	(25,31)
4	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	-	(199.408.293,00)	199.408.293,00	(100,00)
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	3.036.941.306,00	2.757.035.311,00	279.905.995,00	10,15
	JUMLAH	7.138.783.168,00	8.297.019.413,04	(1.158.236.245,04)	13,96

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2022 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp1.158.236.245,04). Penurunan tersebut disebabkan pada tahun ini nilai perhitungan ekuitas BUMD tidak diperhitungkan sebagai penambah nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO. Nilai ekuitas BUMD pada tahun ini dicatat pada surplus/ defisit kegiatan non operasinal lainnya.

6.4.1.1.4. Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.247.684.240,88 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	154.528.861.768,00	-	72.757.917.289,18	139.444.140,20	69.899.660.676,10	157.247.674.240,88

Berdasarkan tabel diatas, dapat jelaskan bahwa Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2022 terdiri dari :

- a. Pendapatan LRA sebesar Rp154.528.861.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan LRA Tahun 2022
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	321.358.287,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	6.703.873.334,00
3	Jasa Giro	1.907.392.832,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	236.124.800,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	205.807.320,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.790.167,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No.	Uraian	Penerimaan LRA Tahun 2022
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.754.926.353,00
8	Pendapatan BLUD	109.526.163.026,00
9	Dana Kapitasi FKTP JKN	33.849.425.649,00
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah – LO	154.528.861.768,00

- b. Belum diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp72.757.917.289,18 yaitu penambahan piutang yang terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Penambahan
1	Hasil Kerja Sama Daerah	Bapenda	6.821.834.615,00
2	Bagian Lancar TGR	BPKAD	255.332.091,67
3	Tagihan Jangka Panjang TGR	BPKAD	391.182.024,43
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Bapenda	202.788.939,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Bapenda	1.070.965,00
6	Pendapatan BLUD	RSUD 45	65.083.798.284,00
7	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	BPKAD	1.910.370,08
	JUMLAH		72.757.917.289,18

- c. Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya sebesar Rp139.444.140,20 merupakan penambah Lain-Lain PAD yang Sah diterima dimuka. Pendapatan ini dikelola oleh RSUD45 atas sewa tanah oleh kantor Kas Bank BJB Kuningan.
- d. Pengurangan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.899.660.676,10 yaitu pembayaran piutang yang terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Penambahan
1	Hasil Kerja Sama Daerah	Bapenda	6.703.873.334,00
2	Bagian Lancar TGR	BPKAD	359.128.059,10
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Bapenda	205.807.320,00
4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Bapenda	1.070.965,00
5	Pendapatan BLUD	RSUD 45	62.629.780.998,00
	JUMLAH		69.899.660.676,10

Dalam pengurang nilai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dari BLUD RSUD'45 Kuningan terdapat piutang Jamkesda sebesar Rp2.107.057.389,00 dari Dinas Kesehatan. Namun piutang tersebut tidak dimunculkan dalam LK Pemda dikarenakan piutang tersebut merupakan piutang-utang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, nilai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO mengalami penurunan sebesar (Rp15.953.851.754,12) Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
	Lain-Lain PAD yang Sah - LO				
1	Lain-Lain PAD yang Sah -LO	157.247.674.240,88	173.201.525.995,00	(15.953.851.754,12)	(9,21)
	Jumlah	157.247.674.240,88	173.201.525.995,00	(15.953.851.754,12)	(9,21)



6.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.015.081.249.358,00. Adapun rinciannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
	Pendapatan Transfer –LO				
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO	1.765.030.674.857,00	1.699.703.729.283,00	65.326.945.574,00	3,84
2	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	250.050.574.501,00	272.926.811.601,00	(22.876.237.100,00)	(8,38)
	Jumlah	2.015.081.249.358,00	1.972.630.540.884,00	42.450.708.474,00	2,15

Pada Tabel di atas terlihat bahwa nilai pendapatan Transfer LO Tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp42.450.708.474,00 atau 2,15%.

Salah satu faktor kenaikan pendapatan transfer adalah dari perubahan nomenklatur kode rekening LO antara tahun 2021 dengan 2022. Pada Tahun 2022 Pendapatan Dana BOS dicatat dalam Pendapatan Transfer LO sesuai dengan Pendapatan Transfer pada LRA. Hal ini berbeda dengan tahun 2021 dimana pendapatan dana BOS dicatat pada Lain-lain pendapatan yang sah LO.

Berikut rincian Pendapatan Transfer LO per 31 Desember 2022:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan- LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan- LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan- LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Transfer - LO	2.323.312.627.999,00	-	11.991.961.169,00	-	320.223.339.810,00	2.015.081.249.358,00

Berdasarkan tabel diatas dapat jelaskan hal sebagai berikut :

- Pendapatan LRA sebesar Rp2.323.312.627.999,00
- Belum diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp11.991.961.169,00 merupakan penambah piutang transfer bagi hasil provinsi sebesar Rp4.115.134.225,00 dan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp7.876.826.944,00
- Pendapatan LRA yang tidak diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp320.223.339.810,00 merupakan Dana Desa sebesar Rp315.201.708.000,00 yang tidak dicatat sebagai pendapatan LO sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 21, dan pengurang piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.021.631.810,00.



6.4.1.3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1 12.950.963.797,67. Perbandingan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO				
1	Pendapatan Hibah	112.950.963.797,67	36.515.193.930,20	76.435.769.867,47	209,33
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	112.950.963.797,67	36.515.193.930,20	76.435.769.867,47	209,33
2	Pendapatan Lainnya – LO	-	128.675.068.000,00	(128.675.068.000,00)	(100,00)
	Pendapatan BOS-LO	-	128.675.068.000,00	(128.675.068.000,00)	(100,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -lo	112.950.963.797,67	165.190.261.930,20	(52.239.298.132,53)	(31,62)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO di tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tersebut disebabkan oleh reklas pendapatan BOS-LO yang pada tahun 2022 ini dicatat di Pendapatan Transfer DAK Fisk. Sehingga mengakibatkan nilai penerimaan lain-lain pendapatan yang sah LO menurun sebesar (Rp52.239.298.132,53).

Namun jika dilihat dari Pendapatan Hibah LO, nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO tahun 2022 naik di sisi pendapatan hibah. Kenaikan ini diperoleh dari pendapatan hibah barang berupa aset tanah dan peralatan dan mesin dengan nilai total kenaikan sebesar Rp76.435.769.867,47 atau senilai 209,33%.

Rincian dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	9.755.148.980,00	103.195.814.817,67	-	-	-	112.950.963.797,67

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Pendapatan LRA sebesar Rp9.755.148.980,00 adalah pendapatan Hibah Pusat
- Penetapan LO yang tidak diakui sebagai pendapatan LRA adalah penerimaan hibah berupa aset, terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah berupa Aset Tanah senilai Rp95.663.742.317,67



- Pendapatan Hibah berupa Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.181.072.500,00 dikurangi nilai penyusutan sebesar Rp3.649.000.000,00

Selain pendapatan hibah tersebut, berdasarkan surat direktur bank bjb Nomor 0353/DIR-CSE/2022 Tanggal 04 April 2022 Perihal Alokasi Dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bank bjb Tahun 2022, terdapat pendapatan hibah berupa dana CSR untuk Kabupaten Kuningan sebesar Rp714.018.194 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disalurkan dan masih terdapat di rekening bank bjb.

6.4.2. BEBAN-LO

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.525.088.103.266,60 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN –LO				
2.1	Beban Operasi – LO	2.352.175.042.225,90	2.195.454.702.457,79	156.720.339.768,10	7,14
2.2	Beban Transfer – LO	150.762.565.450,00	139.283.715.684,00	11.478.849.766,00	8,24
2.3	Defisit Non Operasional	10.279.991.063,70	-	10.279.991.063,70	100,00
2.4	Beban Luar Biasa – LO	11.870.504.527,00	25.257.213.802,00	(13.386.709.275,00)	(53,00)
	Jumlah	2.525.088.103.266,60	2.359.995.631.943,79	165.092.471.322,80	7,00

Berdasarkan tabel tersebut, bila dibandingkan dengan nilai Beban LO tahun 2021, secara keseluruhan nilai Beban LO Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,00% atau Rp165.115.177.469,80.

6.4.2.1. Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.352.175.042.225,90, yang terdiri dari :

6.4.2.1.1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.202.444.648.419,00. Terdapat peningkatan nilai beban pegawai di tahun 2022 sebesar Rp10.195.042.885,00.

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN OPERASI–LO				
2.1	Beban Operasi – LO	1.202.444.648.419,00	1.192.249.605.534,00	10.195.042.885,00	0,86

Rincian Beban Pegawai LO dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7=2+3+4+5-6-7
Beban Pegawai LO	1.146.569.988.635,00	-	-	111.170.320.515,00	-	55.295.660.731,00	1.202.444.648.419,00

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja LRA sebesar Rp1.146.569.988.635,00
- b. Beban yang Belum Dibayar sebesar Rp111.170.320.515,00
 - Utang iuran jaminan kesehatan BPJS 1% dan 4% sebesar Rp40.760.710.377,00
 - Utang Insentif pemungut pajak sebesar Rp1.237.111.468,00
 - Utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2022 sebesar Rp30.185.708.970,00
 - Utang Tunjangan Profesi Guru bulan Nopember dan Desember 2022 sebesar Rp38.986.789.700,00
- c. Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban sebesar Rp55.295.660.731,00 adalah pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 yang terdiri dari:
 - Pemabayaran Utang iuran jaminan kesehatan BPJS 1% dan 4% sebesar 27.310.962.201,00
 - Insentif Pemungut Pajak Triwulan ke 4 TA 2021 sebesar Rp1.230.417.704,00
 - Pembayaran TPP Tahun 2021 sebesar Rp26.754.280.826,00.

Rincian Beban Pegawai LO per SKPD terdapat pada lampiran 27.

6.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Barang-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp260.662.911.545,27.

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9=2+3+4+5-6-7
Beban Barang dan Jasa LO	256.698.547.752,00	698.593.312,00	354.412.899.807,05	42.273.569.353,00	600.674.800,00	392.820.023.878,78	260.662.911.545,27



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja LRA sebesar Rp256.698.547.752,00 merupakan belanja barang tahun 2022
2. Reklas Beban dari Aset Tetap dan Aset lainnya sebesar Rp698.593.312,00 yang menambah beban persediaan.
3. Beban diluar Belanja LRA sebesar Rp354.412.899.807,05 merupakan pengurang persediaan
4. Beban yang Belum dibayar merupakan penambah utang barang sebesar Rp42.273.569.353,00
5. Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya sebesar Rp600.674.800,00
6. Belanja LRA yang tidak diakui sebagai Beban sebesar Rp439.407.021.699,90 merupakan penambah persediaan sebesar Rp357.535.213.718,79 dan pengurang utang sebesar Rp35.284.810.160,00.

Jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa -LO tahun 2021, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp56.482.459.009,92 atau 27,66%.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang	260.662.911.545,27	204.180.452.535,35	56.482.459.009,92	27,66
	JUMLAH	260.662.911.545,27	204.180.452.535,35	56.482.459.009,92	27,66

Sedangkan rincian dari Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	REALISASI BELANJA LRA 2022	BEBAN PERSEDIaan 2022 (LO)
5.1.02.01.	Belanja Barang	256.698.547.752,00	253.576.233.840,69
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	256.656.759.752,00	253.534.445.840,69
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.288.749.178,00	9.293.374.078,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	96.375.000,00	1.005.486.240,75
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.469.299.770,00	4.469.299.770,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.005.865.250,00	2.009.465.250,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	45.945.500,00	45.945.500,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	49.980.000,00	49.980.000,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	650.218.500,00	692.703.500,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	223.511.500,00	223.511.500,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.412.918.101,00	4.412.918.101,00
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	134.049.750,00	134.049.750,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	143.747.200,00	143.747.200,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	72.682.000,00	72.682.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.054.852.021,00	6.998.175.457,85
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.782.666.050,00	3.768.651.329,80
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.544.213.376,00	17.564.961.319,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

KODE REK	URAIAN	REALISASI BELANJA LRA 2022	BEBAN PERSEDIAAN 2022 (LO)
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	321.548.500,00	323.069.500,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	28.500.000,00	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.613.876.150,00	1.898.811.750,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.949.294.398,00	2.965.349.748,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.449.396.958,00	4.447.247.893,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.616.013.300,00	5.616.013.300,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	610.253.000,00	610.253.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	882.076.800,00	883.326.800,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.140.174.032,00	5.140.326.032,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.215.810.349,00	6.515.667.868,33
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.359.610.317,00	8.787.518.348,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	125.850.462.877,00	125.861.724.925,48
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	0,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	67.554.000,00	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	658.814.000,00	658.814.000,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.458.911.929,00	33.458.911.929,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.081.159.091,00	3.081.159.091,00
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	0,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	796.849.855,00	789.019.659,49
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	732.695.000,00	732.695.000,00
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	193.972.000,00	193.972.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	0,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	0,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.625.000,00	60.625.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	206.180.000,00	206.180.000,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	0,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga	-	0,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	-	0,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	143.609.000,00	143.609.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	67.200.000,00	67.200.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	106.400.000,00	106.400.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	67.500.000,00	67.500.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	41.788.000,00	41.788.000,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.418.000,00	9.418.000,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.370.000,00	2.370.000,00
	JUMLAH	256.698.547.752,00	253.576.233.840,69



6.4.2.1.3 Beban Jasa

Nilai Beban Jasa pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp248.865.061.047,35. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.133.104.037,35 dari nilai Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp212.731.957.010,00.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Jasa	248.865.061.047,35	212.731.957.010,00	36.133.104.037,35	16,99
	JUMLAH	248.865.061.047,35	212.731.957.010,00	36.133.104.037,35	16,99

6.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan – LO tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.886.480.791,00 yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp6.403.394.511,00.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Pemeliharaan	14.886.480.791,00	8.483.086.280,00	6.403.394.511,00	75,48
	JUMLAH	14.886.480.791,00	8.483.086.280,00	6.403.394.511,00	75,48

6.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,10% dari tahun sebelumnya. Yaitu dari Rp48.462.416.792,00 menjadi Rp64.990.197.476,00, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Perjalanan Dinas	64.990.197.476,00	48.462.416.792,00	16.527.780.684,00	34,10
	JUMLAH	64.990.197.476,00	48.462.416.792,00	16.527.780.684,00	34,10

6.4.2.1.6 Beban untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Nilai Beban untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.598.147.971,12. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan nilai beban tahun 2021 sebesar Rp18.370.862.093,60 atau 223,29%.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.598.147.971,12	8.227.285.877,52	18.370.862.093,60	223,29
	JUMLAH	26.598.147.971,12	8.227.285.877,52	18.370.862.093,60	223,29

6.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOS



Beban barang dan jasa BOS tahun 2022 adalah sebesar Rp115.201.551.998,00. Nilai ini sama dengan nilai Belanja Barang dan Jasa LRA Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.153.791.317,41, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang dan Jasa BOS	115.201.551.998,00	112.047.760.680,59	3.153.791.317,41	2,81
	JUMLAH	115.201.551.998,00	112.047.760.680,59	3.153.791.317,41	2,81

6.4.2.1.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.205.763.903,00. Namun nilai ini mengalami penurunan sebesar (Rp15.976.717.942,00) dibandingkan dengan Tahun 2021.

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	114.205.763.903,00	130.182.481.845,00	(15.976.717.942,00)	(12,27)
	JUMLAH	114.205.763.903,00	130.182.481.845,00	(15.976.717.942,00)	(12,27)

6.4.2.1.9 Beban Subsidi-LO

Beban Subsidi LO tahun 2022 adalah sebesar Rp1.408.740.156,00. Sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat beban subsidi, seperti terlihat pada tabel.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN OPERASI-LO				
2.4	Beban Subsidi – LO	1.408.740.156,00	-	1.408.740.156,00	-

Beban Subsidi ini merupakan beban berupa bantuan Voucher BBM untuk supir angkutan umum dalam rangka menghadapi inflasi.

6.4.2.1.10 Beban Hibah-LO

Beban Hibah-LO TA 2022 sebesar Rp84.193.674.665,00, nilai Beban Hibah LO Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.491.330.465,00 seperti terlihat pada tabel berikut ini,

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN OPERASI-LO				
2.5	Beban Hibah – LO	84.193.674.665,00	79.702.344.200,00	4.491.330.465,00	5,64

Rincian dari nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar (Rp)	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5-6-7-8
Beban Barang dan Jasa LO	66.576.805.450,00	17.616.869.215,00	-	-	-	-	-	84.193.674.665,00

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hal berikut ini:

- Belanja LRA merupakan relisasi belanja hibah sebesar Rp66.576.805.450,00
- Reklas Beban dari Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp17.616.869.215,00 terdiri dari Rp17.588.869.215,00 merupakan reklas dari aset lainnya berupa aset pemindahtanganan yang dihibahkan ke Desa dan instansi vertikal lainnya, ditambah Beban Hibah Aset berupa Tanah yang dihibahkan ke Kementerian Agama sebesar Rp28.000.000,00.

6.4.2.1.11 Beban Bantuan Sosial -LO

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.154.603.000,00 sesuai dengan nilai Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022. Rincian dari Beban Bantuan Sosila tersebut antara lain:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	5.185.802.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	50.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	494.801.000,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.424.000.000,00
Jumlah		8.154.603.000,00

Beban bantuan sosial ini berupa bantuan uang maupun barang untuk pengobatan, alat bantu, bahan pertanian dan peternakan, bantuan sosial untuk rutilahu dan sebagainya.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.685.329.225,00 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebesar 17,13%, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
	Beban Bansos LO	8.154.603.000,00	9.839.932.225,00	(1.685.329.225,00)	(17,13)



6.4.2.1.12 Beban Penyusutan - LO

Beban penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp200.604.379.849,00 yaitu beban penyusutan aset tetap. Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	106.114.217.863,00
2	Gedung Dan Bangunan	29.114.180.424,00
3	Jalan Jaringan Irigasi dan Jaringan	65.375.981.562,00
Jumlah		200.604.379.849,00

Pada Tahun 2022 Beban penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp13.433.059.711,87 bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2021. Berikut tabel perbandingan Beban Penyusutan LO Tahun 2022 dengan Tahun 2021:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan	200.604.379.849,00	187.194.026.277,13	13.410.353.571,87	7,16

6.4.2.1.13 Beban Amortisasi - LO

Beban amortisasi Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp977.907.805,00 yaitu beban penyusutan aset tak berwujud. Secara perbandingan, Pada Tahun 2022 Beban amortisasi baru dimunculkan di face Laporan Operasional, berbeda dengan tahun 2021, beban amortisasi tidak ditampilkan khusus tetapi tergabung pada beban penyusutan. Berikut tabel perbandingan Beban Penyusutan LO Tahun 2022 dengan Tahun 2021:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1	Beban Amortisasi	977.907.805,00	-	977.907.805,00	-

6.4.2.1.14 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah beban penyisihan piutang Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.782.183.551,16. Beban Penyisihan Piutang ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.178.050.861,55 di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai umur piutang. Perbandingan beban penyisihan piutang tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang	1.782.183.551,16	(7.395.867.310,40)	9.178.050.861,55	(124,10)

Rincian atas beban penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran 28.



6.4.2.1.15 Beban Lain-lain - LO

Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.198.790.049,00. Perlu kami jelaskan bahwa Beban Lain-Lain-LO Tahun 2022 merupakan beban yang timbul akibat dari adanya reklasifikasi dari belanja modal ke aset ekstrakomtable.

Aset ekstrakomtable merupakan aset yang tidak dapat ditampilkan di neraca karena secara kapitalisasi tidak dapat dikategorikan sebagai aset dan secara masa manfaat juga tidak bisa dikategorikan sebagai barang pakai habis. Oleh karena itu, aset ekstrakomtable dicatat sebagai beban lain-lain LO.

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1.	Beban Lain-Lain	7.198.790.049,00	9.549.220.511,60	(2.350.430.462,60)	(24,61)

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 nilai beban lain-lain LO sebesar Rp9.549.220.511,60 menurun menjadi sebesar Rp7.198.790.049,00 atau menurun sebesar 24,61%.

6.4.2.2 Beban Transfer - LO

Beban Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp150.762.565.450,00. Rincian Beban Transfer LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5-6-7-8
Beban Transfer LO	456.726.703.588,00	-	-	9.237.569.862,00	-	-	315.201.708.000,00	150.762.565.450,00

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja LRA sebesar Rp456.726.703.588,00
- Beban yang belum dibayar merupakan Utang Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2015 samapai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.237.569.862,00
- Belanja LRA yang Tidak diakui sebagai beban sebesar Rp315.201.708.000,00 merupakan belanja Transfer ke Desa yang bersumber dari Dana Desa. Nilai ini dikeluarkan dari Beban LO sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 PSAP Tahun 2010. Bultek tersebut menyatakan bahwa Beban Transfer Dana Desa tidak dicatat dalam beban Laporan Operasional dikarenakan bukan termasuk beban untuk operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan beban transfer sebesar Rp11.478.849.766,00 seperti pada tabel berikut ini:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1.	Beban Transfer LO	150.762.565.450,00	139.283.715.684,00	11.478.849.766,00	8,24



Beban Transfer terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp15.921.642.838,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi Sebesar Rp9.237.569.862,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp125.603.352.750,00

6.4.2.3 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.279.991.063,70. Sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat defisit non operasional seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1.	Defisit Non Operasional	10.279.991.063,70	-	10.279.991.063,70	-

Defisit Non Operasional tersebut merupakan penurunan nilai ekuitas investasi pada BUMD karena terdapat beberapa BUMD yang mengalami kerugian.

6.4.2.4 Beban Luar Biasa

Untuk Tahun 2022 terdapat beban untuk Pos Luar Biasa sebesar Rp11.870.504.527,00. Beban tersebut berupa bantuan untuk bencana alam yang terjadi pada Tahun 2022 di kabupaten Kuningan, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lainnya. Selain itu pos luar biasa terbesar adalah untuk kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Rincian dari Beban Luar biasa dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
Beban Luar Biasa	11.870.504.527,00	25.257.213.802,00	(13.386.709.275,00)	(53,00)

Pada laporan operasional, Beban Luar Biasa mengalami pengurangan nilai sebesar Rp13.386.709.275,00 jika dibanding dengan realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp25.257.213.802,00.

6.4.2.5 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp55.744.904.413,98). Laporan Operasional TA 2022 mengalami defisit disebabkan oleh nilai beban LO lebih besar daripada nilai pendapatan LO

NO	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%
1.	Surplus/ Defisit LO	(55.722.198.273,98)	111.818.857.597,28	(167.541.055.871,25)	(149,83)



6.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

6.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp201.008.995.928,66. Untuk Tahun 2022, gambaran aktivitas operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Masuk Kas	2.679.667.713.075,66	2.778.618.768.752,00	(98.951.055.676,34)	(3,56)
2	Jumlah Arus Keluar Kas	2.478.658.717.147,00	2.421.426.543.176,00	57.232.173.971,00	2,36
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	201.008.995.928,66	357.192.225.576,00	(156.183.229.647,34)	(43,73)

6.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.679.667.713.075,66 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.778.618.768.752,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp98.951.055.676,34). Berikut merupakan rincian dari arus masuk kas aktivitas Operasi.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	107.678.513.745,00	92.331.986.827,00	15.346.526.918,00	16,62
2	Penerimaan Retribusi Daerah	77.253.777.415,66	68.297.563.893,00	8.956.213.522,66	13,11
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.138.783.168,00	5.907.864.248,00	1.230.918.920,00	20,84
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154.328.861.768,00	177.327.174.991,00	(22.998.313.223,00)	(12,97)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	46.290.301.582,00	55.481.882.073,00	(9.191.580.491,00)	(16,57)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	37.619.775.916,00	47.999.996.094,00	(10.380.220.178,00)	(21,63)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.107.697.897.206,00	1.111.944.421.000,00	(4.246.523.794,00)	(0,38)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	565.745.873.209,00	478.482.001.965,00	87.263.871.244,00	18,24
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	315.201.708.000,00	330.848.849.000,00	(15.647.141.000,00)	(4,73)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	143.009.228.224,00	124.614.494.617,00	18.394.733.607,00	14,76
11	Penerimaan Hibah	9.755.148.980,00	9.205.007.200,00	550.141.780,00	5,98
12	Penerimaan Lainnya	107.947.843.862,00	276.177.526.844,00	(168.229.682.982,00)	(60,91)
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.679.667.713.075,66	2.778.618.768.752,00	(98.951.055.676,34)	(3,56)

6.5.1.2 Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.478.658.717.147,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.421.426.543.176,00 maka terdapat kenaikan sebesar



Rp57.232.173.971,00 atau 2,36%. Adapun rinciannya dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Pembayaran Pegawai	1.146.569.988.635,00	1.152.944.764.985,00	(6.374.776.350,00)	(0,55)
2	Pembayaran Barang dan Jasa	787.351.371.791,00	729.215.570.980,00	58.135.800.811,00	7,97
4	Pembayaran Subsidi	1.408.740.156,00	-	1.408.740.156,00	-
5	Pembayaran Hibah	66.576.805.450,00	59.840.624.500,00	6.736.180.950,00	11,26
6	Pembayaran Bantuan Sosial	8.154.603.000,00	9.839.932.225,00	(1.685.329.225,00)	(17,13)
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	440.805.060.750,00	430.733.010.994,00	10.072.049.756,00	2,34
8	Pembayaran Tidak Terduga	11.870.504.527,00	25.272.600.802,00	(13.402.096.275,00)	(53,03)
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota	6.769.979.323,00	8.306.378.422,00	(1.536.399.099,00)	(18,50)
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota	9.151.663.515,00	5.273.660.268,00	3.878.003.247,00	73,54
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.478.658.717.147,00	2.421.426.543.176,00	57.232.173.971,00	2,36

6.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini pada tahun 2022 adalah sebesar (Rp250.356.932.839,00). Berikut penjelasan arus kas dari aktivitas investasi :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
a	Arus Masuk Kas	-	-	-	-
b	Jumlah Arus Keluar Kas	250.356.932.839,00	324.227.654.179,53	(73.870.721.340,53)	(22,78)
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(250.356.932.839,00)	(324.227.654.179,53)	73.870.721.340,53	(22,78)

6.5.2.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Arus masuk kas aktivitas investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 begitu pula pada Tahun 2021 arus masuk kas dari aktivitas investasi bernilai nihil.

6.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Arus keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp250.356.932.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	#DIV/0!
2	Perolehan Tanah	26.751.824.467,00	7.612.718.068,00	19.139.106.399,00	251,41



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
3	Perolehan Peralatan Mesin	49.977.556.706,00	104.329.063.606,00	(54.351.506.900,00)	(52,10)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	66.623.156.876,00	88.667.096.662,53	(22.043.939.786,53)	(24,86)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.711.956.467,00	119.717.944.843,00	(40.005.988.376,00)	(33,42)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.792.438.933,00	400.831.000,00	6.391.607.933,00	1.594,59
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.499.999.390,00	3.500.000.000,00	1.999.999.390,00	57,14
	Jumlah :	250.356.932.839,00	324.227.654.179,53	(73.870.721.340,53)	(22,78)

Bila dibandingkan dengan arus keluar kas investasi tahun 2021, nilai arus kas dari aktivitas investasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp73.870.721.340,53). Penyebabnya adalah penurunan arus keluar kas dari perolehan peralatan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Perolehan aset tetap lainnya.

6.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk TA 2022 adalah sebesar Rp359.633.542,00. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Kas Masuk	145.563.326.880,00	82.586.792.011,00	62.976.534.869,00	76,25
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	145.563.264.380,00	82.586.792.011,00	62.976.472.369,00	76,25
	Kas Lainnya di Bendahara FKTP	62.500,00	-	62.500,00	-
2	Arus Kas Keluar	145.203.693.339,00	82.586.792.011,00	62.616.901.328,00	75,82
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.203.693.339,00	82.586.792.011,00	62.616.901.328,00	75,82
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	359.633.541,00	-	359.633.541,00	-

Dari Tabel uraian tabel di atas, diperoleh nilai Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp359.633.541,00. Nilai tersebut terdiri dari:

- Utang PFK sebesar Rp359.571.041,00
- Kas Lainnya di rekening Bendahara Penerimaan FKTP sebesar Rp62.500,00

6.5.4 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	201.008.995.928,66	357.192.225.576,00	(156.183.229.647,34)	(43,73)
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(250.356.932.839,00)	(324.227.654.179,53)	73.870.721.340,53	(22,78)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	359.633.542,00	-	359.633.542,00	-
	Jumlah :	(48.988.303.368,34)	32.964.571.396,47	(81.952.874.764,81)	(66,51)



Nilai Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp48.988.303.368,34). Nilai ini mengalami penurunan dari tahu 2021 sebesar (Rp81.952.874.764,81) atau senilai (66,51)%.

6.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp65.266.792.658,47. Nilai ini merupakan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 202, 1 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas di BUD	33.668.044.084,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	71.906.591,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	10.706.520,00
4	Kas di Bendahara BLUD	27.625.748.314,00
5	Kas di Bendahara JKN	3.711.993.026,47
6	Kas di Bendahara BOS	119.632.185,00
7	Kas Lainnya	58.761.938,00
	Jumlah :	65.266.792.658,47

6.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas dalam Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.278.489.290,13 Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibanding Tahun 2021 sebesar (Rp48.988.303.368,34) seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Saldo Akhir Kas di BUD	566.130.021,00	33.668.044.084,00	(33.101.914.063,00)	(98,32)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	24.545.838,00	71.906.591,00	(47.360.753,00)	(65,86)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	28.180.384,66	10.706.520,00	17.473.864,66	163,21
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	13.477.341.729,00	27.625.748.314,00	(14.148.406.585,00)	(51,21)
5	Saldo Akhir Kas di JKN	1.792.619.266,47	3.711.993.026,47	(1.919.373.760,00)	(51,71)
6	Saldo Akhir Kas di BOS	27.478.806,00	119.632.185,00	(92.153.379,00)	(77,03)
7	Kas Lainnya berupa PFK	359.571.042,00	58.761.938,00	300.809.104,00	511,91
8	Kas Lainnya berupa Jasa Giro di bendahara JKN	2.622.203,00	-	2.622.203,00	-
	JUMLAH	16.278.489.290,13	65.266.792.658,47	(48.988.303.368,34)	(75,06)

6.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Nilai Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.649.496.899.070,85. Rincian atas LPE dapat diuraikan dalam penjelasan per akun Laporan Perubahan Ekuitas.



6.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.722.121.481.555,90.

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/(Berkurang)	
1	Ekuitas Awal LPE	2.722.121.481.555,90	2.608.513.068.857,41	113.608.412.698,50	4,35
	Jumlah	2.722.121.481.555,90	2.608.513.068.857,41	113.608.412.698,50	4,35

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, nilai Ekuitas Awal LPE Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar 113.608.412.698,50 atau sekitar 4,35%. Dikarenakan adanya penambahan Aset sebesar Rp151.509.764.750,60 dikurangi kenaikan kewajiban sebesar Rp37.901.352.052,11.

6.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO Tahun 2022 adalah sebesar (Rp55.722.198.273,98). Berikut adalah perbandingan surplus defisit LO Tahun 2022 dengan Tahun 2021:

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Surplus/ Defisit LO	(55.722.198.273,98)	111.818.857.604,28	(167.541.055.878,26)	(149,83)
	Jumlah	(55.722.198.273,98)	111.818.857.604,28	(167.535.762.018,25)	(149,83)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan nilai surplus / defisit LO pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar (Rp167.541.055.878,26). Hal ini disebabkan oleh nilai pendapatan LO yang rendah. Sedangkan nilai beban LO lebih besar daripada pendapatan.

6.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar (Rp9.028.940.757,00) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Koreksi piutang	(4.053.605.308,00)	-	(4.053.605.308,00)	-
2	Koreksi Aset Tanah	80.190.000,00	2.895.058.000,00	(2.814.868.000,00)	(98,20)
3	Koreksi Peralatan Dan Mesin	101.620.015,00	(85.299.993,90)	186.920.008,90	(219,13)
4	Koreksi Gedung dan Bangunan	(11.896.557.193,00)	-	(11.896.557.193,00)	-
5	Koreksi Aset Lain-lain	(508.910.000,00)	(7.215.469.442,00)	6.706.559.442,00	(92,95)
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan	7.276.321.729,00	6.195.266.530,12	1.081.055.198,88	17,45
	JUMLAH	(9.000.940.757,00)	1.789.555.094,22	(10.790.495.851,22)	(604,54)

Berdasarkan tabel diatas apabila dibandingkan dengan tahun 2021, nilai dampak kumulatif kesalahan/ kebijakan mendasar mengalami penurunan sebesar (Rp10.818.495.851,22). Hal tersebut disebabkan adanya koreksi atas beberapa akun aset dan kewajiban. Koreksi atas beberapa akun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Piutang sebesar (Rp4.053.605.308,00) yaitu koreksi berkurang atas piutang Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan tidak terdapat aturan yang



menyatakan utang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atas dana transfer tersebut.

- Koreksi aset Tanah sebesar Rp52.190.000,00 yaitu koreksi tanah yang belum tercatat sebesar berupa tanah bekas PD BPR
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.620.015,00. Nilai ini merupakan penambahan nilai aset peralatan mesin yang disebabkan salah catat dan belum tercatat.
- Gedung dan Bangunan sebesar (Rp11.896.557.193,00). Nilai ini merupakan pengurangan nilai aset gedung dan bangunan yang disebabkan salah catat, dobel catat, belum tercatat dan penghapusan.
- Koreksi Aset Lain-Lain sebesar Rp(508.910.000,00) yaitu koreksi atas kesalahan catat, dobel catat dan penghapusan aset lain-lain.
- Koreksi Akumulasi penyusutan sebesar Rp7.276.321.729,00. Nilai ini merupakan nilai penyusutan aset, baik aset tetap atau aset lainnya yang dikoreksi karena kesalahan pencatatan atau belum tercatat.

6.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp2.657.398.342.524,93, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Ekuitas Akhir	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,97)	(2,38)
	Jumlah	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,97)	(2,38)

6.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

6.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2022 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada Rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari dari 37 Puskesmas di Kabupaten Kuningan.
- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD'45 Kuningan yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.



3) Pengelolaan Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Satuan Pendidikan Negeri mengelola Dana BOS sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, dan Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2022. Untuk Tahun 2022 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan sebesar Rp129.292.264.348,00 ditambah dengan sisa dana Tahun 2021 sebesar Rp119.632.185,00 jadi dana bos yang tersedia sebesar Rp129.411.896.533,00 dimana dana tersebut digunakan dengan realisasi belanja sebesar Rp129.384.417.727,00. Maka sisa dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.478.806,00.

4) Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa, Dana Desa tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pada Tahun 2022 Dana Desa yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp315.201.708.000,00 dan terealisasi baik pendapatan maupun belanja sebesar Rp315.201.708.000,00.

6.8 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat setelah tanggal Neraca yang mengakibatkan jurnal penyesuaian pada Neraca. Kejadian tersebut antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat NOMOR: 973/KEP.114-BAPENDA/2023 Tanggal 14 Maret 2023 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Keputusan tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2022 memiliki piutang atas Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.787.069.220,00	1.849.030.740,00	(61.961.520,00)	100,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	947.304.300,00	933.098.430,00	14.205.870,00	1,52
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.271.027.855,00	2.208.183.440,00	(937.155.585,00)	(42,44)
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	109.732.850,00	31.319.200,00	78.413.650,00	100,00
	JUMLAH	4.115.134.225,00	5.021.631.810,00	(906.497.585,00)	(18,05)



Nilai piutang tersebut dicatat dalam Neraca Per 31 Desember 2022, melalui jurnal penyesuaian.

5. Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-Bpkad/2022 Tentang Penetapan Sisa Bantuan keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Keputusan tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2022 memiliki Utang atas Sisa Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp9.237.569.862,00. Nilai tersebut merupakan sisa bantuan keuangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang belum dikembalikan ke Kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan mencatat utang atas pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi pada Neraca per 31 Desember 2022 Audited.
6. Berdasarkan surat Nomor S-773/WPB.13/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF – TKD) Tahun 2022, disampaikan saldo Rekening Lain di BI TDF TKD Kabupaten Kuningan 519000315980 pada Kantor Pusat BI per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.876.826.944,00, dengan nilai remunerasi sebesar Rp1.910.370,08. Serta merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai dapat dilakukan dengan Treasury Deposit Facility (TDF). Pada Tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk TDF - TKD yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF - TKD yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF – TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian nilai TDF TKD tersebut dilakukan jurnal penyesuaian untuk dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2022.



BAB VII PENUTUP

Di dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan TA 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2022 telah terjadi realisasi penerimaan Pendapatan sebesar Rp2.679.667.713.075,66 dan realisasi Belanja sebesar Rp2.708.515.650.596,00. Atas Realisasi Pendapatan dikurangi Belanja diperoleh nilai defisit sebesar (Rp28.847.937.520,34). Selanjut nilai defisit tersebut ditambah nilai pembiayaan Netto sebesar Rp44.766.793.268,47. Sehingga diperoleh Sisa Lebih Anggaran Tahun 2022 (SILPA) sebesar Rp15.918.855.748,13.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Kuningan TA 2022 ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual. Selain itu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 juga mengacu kepada pedoman akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah TA 2022 tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan, diantaranya kondisi perkenomian yang masih sangat perlu ditingkatkan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan roda pemerintahan yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Namun Pemerintah Kabupaten Kuningan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah.


BUPATI KUNINGAN

H. ACEP PURNAMA, SH., MH.



**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
TA. 2022**



**LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
TA. 2022**



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

Lampiran 1

REKAP BELANJA PEGAWAI PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	725.889.402.972
2	DINAS KESEHATAN	76.302.260.298
3	RSUD 45	36.476.027.865
4	RSUD LINGGAJATI	7.570.109.678
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	21.186.311.283
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.361.204.192
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.359.572.520
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.626.311.373
9	DINAS SOSIAL	3.913.690.062
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.533.561.918
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.216.946.536
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.979.487.481
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.488.075.247
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.394.677.694
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.894.169.167
16	DINAS PERHUBUNGAN	7.434.375.688
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.541.076.096
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.410.771.479
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.669.108.471
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.962.476.967
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.198.947.799
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	7.185.717.785
23	SEKRETARIAT DAERAH	19.238.497.868
24	SEKRETARIAT DPRD	36.622.261.613
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.981.058.398
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.155.250.016
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.884.758.055
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.307.993.296
29	INSPEKTORAT	8.756.524.326
30	KECAMATAN CILIMUS	2.048.328.113
31	KECAMATAN CIWARU	1.490.410.024
32	KECAMATAN DARMA	1.577.175.147
33	KECAMATAN GARAWANGI	2.002.759.123
34	KECAMATAN JALAKSANA	1.675.143.700
35	KECAMATAN KADUGEDE	1.447.314.827
36	KECAMATAN KARANGKANCANA	1.584.115.459
37	KECAMATAN KRAMATMULYA	1.713.293.487
38	KECAMATAN KUNINGAN	10.126.810.654
39	KECAMATAN LEBAKWANGI	1.644.307.427



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	NILAI
40	KECAMATAN LURAGUNG	1.741.470.521
41	KECAMATAN MALEBER	1.569.495.945
42	KECAMATAN MANDIRANCAN	1.646.400.105
43	KECAMATAN PANCALANG	1.690.269.884
44	KECAMATAN SINDANGAGUNG	1.605.243.473
45	KECAMATAN CIBEUREUM	1.207.033.403
46	KECAMATAN CIGUGUR	6.384.371.968
47	KECAMATAN CILEBAK	1.114.994.141
48	KECAMATAN CIMAHI	1.310.240.123
49	KECAMATAN CINIRU	1.561.626.465
50	KECAMATAN CIPICUNG	1.651.288.109
51	KECAMATAN HANTARA	1.642.194.838
52	KECAMATAN JAPARA	1.297.739.410
53	KECAMATAN KALIMANGGIS	1.870.447.242
54	KECAMATAN NUSAHERANG	1.519.249.424
55	KECAMATAN PASAWAHAN	1.353.738.308
56	KECAMATAN SELAJAMBE	1.428.727.189
57	KECAMATAN SUBANG	1.483.606.139
58	KECAMATAN CIAWIGEBANG	1.796.182.307
59	KECAMATAN CIBINGBIN	1.845.113.747
60	KECAMATAN CIDAHU	1.193.403.422
61	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	1.677.387.812
62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.129.480.556
		1.146.569.988.635



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 2

REKAP BELANJA BARANG DAN JASA PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	152.082.681.371
2	DINAS KESEHATAN	99.882.497.961
3	RSUD 45	114.205.763.903
4	RSUD LINGGAJATI	49.267.838.734
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	52.840.818.470
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	41.155.360.161
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.916.777.314
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.316.703.760
9	DINAS SOSIAL	2.785.099.305
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.641.596.069
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.536.765.308
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.370.254.009
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.103.339.990
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.653.162.759
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.510.798.230
16	DINAS PERHUBUNGAN	16.801.399.417
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.751.929.315
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.629.213.889
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.102.653.990
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	18.184.578.061
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.743.649.558
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	14.481.147.305
23	SEKRETARIAT DAERAH	32.692.544.348
24	SEKRETARIAT DPRD	26.286.958.578
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.985.591.663
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.439.706.516
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.882.017.562
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.934.414.981
29	INSPEKTORAT	5.915.620.350
30	KECAMATAN CILIMUS	504.542.758
31	KECAMATAN CIWARU	428.969.578
32	KECAMATAN DARMA	417.918.543
33	KECAMATAN GARAWANGI	452.616.597
34	KECAMATAN JALAKSANA	544.374.504
35	KECAMATAN KADUGEDE	479.660.946
36	KECAMATAN KARANGKANCANA	477.769.166
37	KECAMATAN KRAMATMULYA	455.812.109
38	KECAMATAN KUNINGAN	3.691.054.399
39	KECAMATAN LEBAKWANGI	494.316.412
40	KECAMATAN LURAGUNG	454.167.911
41	KECAMATAN MALEBER	469.546.832
42	KECAMATAN MANDIRANCAN	459.247.754
43	KECAMATAN PANCALANG	467.819.201
44	KECAMATAN SINDANGAGUNG	458.377.007
45	KECAMATAN CIBEUREUM	396.726.224
46	KECAMATAN CIGUGUR	1.776.459.106
47	KECAMATAN CILEBAK	385.462.615
48	KECAMATAN CIMAHI	380.828.376
49	KECAMATAN CINIRU	374.724.578
50	KECAMATAN CIPICUNG	319.896.707
51	KECAMATAN HANTARA	364.774.880
52	KECAMATAN JAPARA	368.353.153
53	KECAMATAN KALIMANGGIS	386.337.500
54	KECAMATAN NUSAHERANG	384.261.636
55	KECAMATAN PASAWAHAN	377.348.908
56	KECAMATAN SELAJAMBE	407.507.451
57	KECAMATAN SUBANG	430.659.053
58	KECAMATAN CIAWIGEBANG	451.953.600
59	KECAMATAN CIBINGBIN	451.987.488
60	KECAMATAN CIDAHU	446.445.057
61	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	542.857.520
62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.747.711.345
	TOTAL	787.351.371.791



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 3

RINCIAN BARANG DAN JASA PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Belanja Barang dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.877.523.350	29.410.521.023	22.500.000	1.108.485.000	462.100.000	115.201.551.998		152.082.681.371
2	DINAS KESEHATAN	16.664.967.682	57.072.293.037	759.146.553	25.385.840.689	250.000			99.882.497.961
3	RSUD 45	-	-	-	-	-		114.205.763.903	114.205.763.903
4	RSUD LINGGAJATI	13.616.226.772	34.224.166.455	1.305.715.807	121.729.700	-			49.267.838.734
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	45.644.550.680	4.520.572.790	852.200.000	1.823.495.000	-			52.840.818.470
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	37.185.601.500	2.591.334.661	25.000.000	1.353.424.000	-			41.155.360.161
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.209.764.587	3.135.656.727	88.800.000	1.474.556.000	8.000.000			6.916.777.314
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.870.688.890	927.268.670	14.970.000	500.776.200	3.000.000			3.316.703.760
9	DINAS SOSIAL	776.179.500	1.585.309.805	20.750.000	402.860.000	-			2.785.099.305
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.114.310.768	1.757.797.301	29.700.000	739.788.000	-			5.641.596.069
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.506.587.431	2.107.760.701	142.319.500	997.597.676	1.782.500.000			19.536.765.308
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.646.611.650	4.538.929.459	54.100.000	1.123.412.900	7.200.000			10.370.254.009
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.537.475.600	733.296.440	43.248.950	789.319.000	-			4.103.339.990
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.379.015.230	6.434.799.529	53.250.000	714.348.000	71.750.000			16.653.162.759
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.058.883.010	9.307.002.220	-	2.005.163.000	139.750.000			15.510.798.230
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.094.654.565	11.729.251.282	535.418.570	442.075.000	-			16.801.399.417
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.643.080.200	3.500.877.115	54.000.000	553.972.000	-			5.751.929.315
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.299.537.169	2.378.903.774	2.187.302.946	748.470.000	15.000.000			12.629.213.889
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	906.481.000	1.567.316.279	201.421.750	427.434.961	-			3.102.653.990
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14.014.676.611	3.390.599.450	50.000.000	591.152.000	138.150.000			18.184.578.061
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	614.398.000	506.927.558	25.000.000	554.124.000	43.200.000			1.743.649.558



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	SKPD	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Belanja Barang dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	13.470.959.660	735.125.145	28.940.000	246.122.500	-			14.481.147.305
23	SEKRETARIAT DAERAH	13.235.865.300	12.367.260.943	1.091.784.345	5.338.133.760	659.500.000			32.692.544.348
24	SEKRETARIAT DPRD	10.289.962.612	6.893.604.966	550.000.000	8.553.391.000	-			26.286.958.578
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.752.393.700	1.580.959.963	375.845.000	1.276.393.000	-			4.985.591.663
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.412.049.760	2.802.779.294	119.996.362	1.051.081.100	1.053.800.000			9.439.706.516
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.533.041.535	3.855.887.177	680.803.860	1.812.284.990	-			12.882.017.562
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.820.335.500	2.817.215.481	169.578.000	1.127.286.000	-			6.934.414.981
29	INSPEKTORAT	1.620.378.300	3.350.150.050	95.000.000	850.092.000	-			5.915.620.350
30	KECAMATAN CILIMUS	277.260.000	120.902.758	10.000.000	96.380.000	-			504.542.758
31	KECAMATAN CIWARU	272.325.000	94.174.578	11.750.000	50.720.000	-			428.969.578
32	KECAMATAN DARMA	218.631.660	110.736.883	22.000.000	66.550.000	-			417.918.543
33	KECAMATAN GARAWANGI	268.325.800	100.710.797	8.000.000	75.580.000	-			452.616.597
34	KECAMATAN JALAKSANA	314.254.848	150.119.656	-	80.000.000	-			544.374.504
35	KECAMATAN KADUGEDE	289.756.028	133.954.918	15.400.000	40.550.000	-			479.660.946
36	KECAMATAN KARANGKANCANA	226.087.700	114.221.466	74.150.000	63.310.000	-			477.769.166
37	KECAMATAN KRAMATMULYA	266.408.310	87.478.799	36.550.000	65.375.000	-			455.812.109
38	KECAMATAN KUNINGAN	2.078.450.470	1.185.763.929	-	426.840.000	-			3.691.054.399
39	KECAMATAN LEBAKWANGI	249.731.000	95.685.412	14.800.000	134.100.000	-			494.316.412
40	KECAMATAN LURAGUNG	253.125.636	126.072.275	-	74.970.000	-			454.167.911
41	KECAMATAN MALEBER	312.448.500	76.123.332	-	80.975.000	-			469.546.832
42	KECAMATAN MANDIRANCAN	300.642.250	80.005.504	-	78.600.000	-			459.247.754
43	KECAMATAN PANCALANG	244.953.776	141.175.425	-	81.690.000	-			467.819.201
44	KECAMATAN SINDANGAGUNG	192.798.000	152.689.007	18.800.000	94.090.000	-			458.377.007
45	KECAMATAN CIBEUREUM	245.362.900	103.763.324	-	47.600.000	-			396.726.224
46	KECAMATAN CIGUGUR	1.186.669.900	481.904.206	49.135.000	58.750.000	-			1.776.459.106
47	KECAMATAN CILEBAK	197.363.400	123.884.215	16.650.000	47.565.000	-			385.462.615
48	KECAMATAN CIMAHI	191.021.962	107.031.414	18.425.000	52.350.000	12.000.000			380.828.376
49	KECAMATAN CINIRU	202.893.400	91.046.178	3.000.000	75.585.000	2.200.000			374.724.578
50	KECAMATAN CIPICUNG	169.607.200	95.149.507	-	55.140.000	-			319.896.707
51	KECAMATAN HANTARA	245.018.650	91.556.230	-	28.200.000	-			364.774.880
52	KECAMATAN JAPARA	203.474.500	90.988.653	4.000.000	69.890.000	-			368.353.153
53	KECAMATAN	231.381.500	114.656.000	22.900.000	17.400.000	-			386.337.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Belanja Barang dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Total
	KALIMANGGIS								
54	KECAMATAN NUSAHERANG	230.910.500	105.506.136	10.000.000	37.845.000	-			384.261.636
55	KECAMATAN PASAWAHAN	199.691.950	121.471.958	1.800.000	51.385.000	3.000.000			377.348.908
56	KECAMATAN SELAJAMBE	271.380.800	95.316.651	3.500.000	37.310.000	-			407.507.451
57	KECAMATAN SUBANG	291.584.950	93.104.103	-	45.970.000	-			430.659.053
58	KECAMATAN CIAWIGEBANG	231.767.000	129.676.600	14.250.000	76.260.000	-			451.953.600
59	KECAMATAN CIBINGBIN	275.039.300	100.953.188	-	75.995.000	-			451.987.488
60	KECAMATAN CIDAHU	211.088.000	149.357.057	11.500.000	74.500.000	-			446.445.057
61	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	301.997.300	126.780.220	29.050.000	85.030.000	-			542.857.520
62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.250.895.000	1.022.981.345	42.950.000	430.885.000	-			2.747.711.345
	TOTAL	256.698.547.752	221.838.509.019	10.015.401.643	64.990.197.476	4.401.400.000	115.201.551.998	114.205.763.903	787.351.371.791



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 4

REKAP BELANJA BARANG JASA BOS SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
1	SD NEGERI 1 CIAWIGEBANG	266.388.460
2	SD NEGERI 1 CIAWILOR	197.565.000
3	SD NEGERI 1 CIGARUKGAK	175.827.000
4	SD NEGERI 1 CIHAUR	174.215.000
5	SD NEGERI 1 CIHIRUP	110.285.000
6	SD NEGERI 1 CIKUBANGMULYA	121.617.700
7	SD NEGERI 1 CIOMAS	124.816.000
8	SD NEGERI 1 CIPUTAT	222.364.000
9	SD NEGERI 1 GERESIK	103.614.000
10	SD NEGERI 1 KADURAMA	62.462.500
11	SD NEGERI 1 KARANGKAMULYAN	131.695.000
12	SD NEGERI 1 KRAMATMULYA	127.660.100
13	SD NEGERI 1 LEBAKSIUH	103.843.600
14	SD NEGERI 1 MEKARJAYA	158.410.000
15	SD NEGERI 1 SIDARAJA	200.276.000
16	SD NEGERI 1 SUKADANA	144.749.400
17	SD NEGERI 1 SUKARAJA	234.676.881
18	SD NEGERI 2 CIAWIGEBANG	102.715.000
19	SD NEGERI 2 CIAWILOR	167.544.000
20	SD NEGERI 2 CIGARUKGAK	124.870.000
21	SD NEGERI 2 CIHAUR	75.043.000
22	SD NEGERI 2 CIHIRUP	160.118.800
23	SD NEGERI 2 CIKUBANGMULYA	106.090.650
24	SD NEGERI 2 CIOMAS	103.453.500
25	SD NEGERI 2 CIPUTAT	110.639.500
26	SD NEGERI 2 GERESIK	78.351.030
27	SD NEGERI 2 KADURAMA	157.994.481
28	SD NEGERI 2 KARANGKAMULYAN	80.736.835
29	SD NEGERI 2 KRAMATMULYA	93.515.800
30	SD NEGERI 2 LEBAKSIUH	62.136.500
31	SD NEGERI 2 MEKARJAYA	91.626.200
32	SD NEGERI 2 SIDARAJA	153.584.180
33	SD NEGERI 2 SUKADANA	153.364.600
34	SD NEGERI 2 SUKARAJA	220.019.800
35	SD NEGERI 3 CIAWIGEBANG	176.624.414
36	SD NEGERI 3 CIHIRUP	97.195.000
37	SD NEGERI 3 CIPUTAT	53.294.000
38	SD NEGERI 3 GERESIK	103.790.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
39	SD NEGERI 3 SUKADANA	23.125.000
40	SD NEGERI CIJAGAMULYA	134.371.500
41	SD NEGERI DUKUHDALAM	147.899.515
42	SD NEGERI KAPANDAYAN	168.100.900
43	SD NEGERI PADARAMA	121.374.600
44	SD NEGERI PAJAWANLOR	113.125.000
45	SD NEGERI PAMIJAHAN	222.179.500
46	SD NEGERI PANGKALAN	149.455.000
47	SD NEGERI 1 CIBEUREUM	218.349.385
48	SD NEGERI 1 CIMARA	86.915.000
49	SD NEGERI 1 RANDUSARI	88.357.400
50	SD NEGERI 1 SUKARAPIH	130.159.270
51	SD NEGERI 2 CIMARA	39.327.400
52	SD NEGERI 2 RANDUSARI	88.076.497
53	SD NEGERI 2 SUKARAPIH	122.748.516
54	SD NEGERI 3 CIBEUREUM	76.820.280
55	SD NEGERI 3 CIMARA	74.630.000
56	SD NEGERI 3 SUKARAPIH	101.410.000
57	SD NEGERI 4 CIMARA	54.700.000
58	SD NEGERI KAWUNGSARI	85.545.800
59	SD NEGERI SUKADANA	114.051.500
60	SD NEGERI SUMURWIRU	84.403.150
61	SD NEGERI TARIKOLOT	79.800.800
62	SD NEGERI 1 CIANGIR	83.118.000
63	SD NEGERI 1 CIBINGBIN	91.219.000
64	SD NEGERI 1 CIPONDOK	55.149.000
65	SD NEGERI 1 CITENJO	106.034.000
66	SD NEGERI 1 SINDANGJAWA	111.132.000
67	SD NEGERI 1 SUKAMAJU	104.113.000
68	SD NEGERI 2 CIANGIR	93.491.300
69	SD NEGERI 2 CIBINGBIN	159.417.978
70	SD NEGERI 2 CIPONDOK	124.572.000
71	SD NEGERI 2 CITENJO	121.982.800
72	SD NEGERI 2 SINDANGJAWA	64.272.000
73	SD NEGERI 2 SUKAMAJU	97.130.900
74	SD NEGERI 3 CIBINGBIN	180.252.000
75	SD NEGERI 6 CIBINGBIN	93.875.000
76	SD NEGERI 7 CIBINGBIN	48.967.000
77	SD NEGERI BANTARPANJANG	204.080.000
78	SD NEGERI CISAAT	64.053.000
79	SD NEGERI DUKUHBADAG	156.069.000
80	SD NEGERI SUKAHARJA	77.795.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
81	SD NEGERI 1 CIBULAN	227.999.800
82	SD NEGERI 1 CIDAHU	184.651.915
83	SD NEGERI 1 CIEURIH	108.660.345
84	SD NEGERI 1 CIHIDEUNGGIRANG	121.833.500
85	SD NEGERI 1 CIHIDEUNGHILIR	289.344.900
86	SD NEGERI 1 CIKEUSIK	122.531.500
87	SD NEGERI 1 JATIMULYA	158.893.700
88	SD NEGERI 1 KERTAWINANGUN	135.523.000
89	SD NEGERI 1 LEGOK	77.753.800
90	SD NEGERI 1 NANGGELA	143.030.000
91	SD NEGERI 2 CIDAHU	117.663.000
92	SD NEGERI 2 CIEURIH	114.421.800
93	SD NEGERI 2 CIHIDEUNGGIRANG	163.201.440
94	SD NEGERI 2 CIHIDEUNGHILIR	222.645.200
95	SD NEGERI 2 CIKEUSIK	131.732.600
96	SD NEGERI 2 JATIMULYA	131.225.000
97	SD NEGERI 2 KERTAWINANGUN	60.680.400
98	SD NEGERI 2 LEGOK	159.951.700
99	SD NEGERI 2 NANGGELA	97.102.500
100	SD NEGERI 3 CIEURIH	44.780.000
101	SD NEGERI 4 CIHIDEUNGHILIR	93.104.740
102	SD NEGERI BUNDER	76.752.956
103	SD NEGERI DATAR	182.624.600
104	SD NEGERI 1 CIBUNTU	109.388.000
105	SD NEGERI 1 KARANGMUNCANG	92.631.200
106	SD NEGERI 1 KOREAK	101.659.500
107	SD NEGERI 1 PANAWUAN	117.730.000
108	SD NEGERI 2 CIBUNTU	62.629.102
109	SD NEGERI 2 KARANGMUNCANG	159.657.800
110	SD NEGERI 2 KOREAK	86.598.340
111	SD NEGERI 2 PANAWUAN	56.627.500
112	SD NEGERI BABAKANJATI	85.738.500
113	SD NEGERI BUNIGEULIS	94.184.500
114	SD NEGERI INDAPATRA	88.348.000
115	SD NEGERI JAMBUGEULIS	114.002.000
116	SD NEGERI SANGKANMULYA	62.280.000
117	SD NEGERI SANGKANURIP	162.573.000
118	SD NEGERI TIMBANG	215.170.000
119	SD NEGERI 1 BABAKANMULYA	135.564.800
120	SD NEGERI 1 CIGADUNG	194.090.885
121	SD NEGERI 1 CILEULEUY	136.136.420
122	SD NEGERI 1 CISANTANA	128.445.400



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
123	SD NEGERI 1 PUNCAK	129.916.000
124	SD NEGERI 1 SUKAMULYA	147.732.940
125	SD NEGERI 1 WINDUHERANG	100.734.715
126	SD NEGERI 2 BABAKANMULYA	105.919.135
127	SD NEGERI 2 CILEULEUY	128.445.000
128	SD NEGERI 2 CISANTANA	168.637.600
129	SD NEGERI 2 PUNCAK	94.149.100
130	SD NEGERI 2 SUKAMULYA	100.735.000
131	SD NEGERI 2 WINDUHERANG	165.640.000
132	SD NEGERI 3 CIGADUNG	123.816.300
133	SD NEGERI 3 CILEULEUY	49.163.836
134	SD NEGERI 3 CISANTANA	121.806.000
135	SD NEGERI 3 PUNCAK	119.202.500
136	SD NEGERI 4 CIGADUNG	76.955.000
137	SD NEGERI CIGUGUR	220.050.500
138	SD NEGERI CIPARI	151.299.090
139	SD NEGERI GUNUNGKELING	145.677.500
140	SD NEGERI 1 BUNGURBERES	70.940.000
141	SD NEGERI 1 LEGOKHERANG	60.072.000
142	SD NEGERI 1 MANDAPAJAYA	42.376.400
143	SD NEGERI 1 PATALA	69.357.500
144	SD NEGERI 2 BUNGURBERES	36.800.000
145	SD NEGERI 2 LEGOKHERANG	81.880.000
146	SD NEGERI 2 MANDAPAJAYA	63.480.000
147	SD NEGERI 2 PATALA	74.860.000
148	SD NEGERI CILEBAK	116.641.700
149	SD NEGERI CILIMUSARI	95.040.000
150	SD NEGERI JALATRANG	107.080.000
151	SD NEGERI 1 BANDORASAKULON	166.811.100
152	SD NEGERI 1 BANDORASAWETAN	202.711.600
153	SD NEGERI 1 BOJONG	169.774.000
154	SD NEGERI 1 CARACAS	114.914.850
155	SD NEGERI 1 CILIMUS	171.570.900
156	SD NEGERI 1 LINGGAJATI	152.586.800
157	SD NEGERI 1 SAMPORA	150.180.165
158	SD NEGERI 1 SETIANEGARA	166.679.600
159	SD NEGERI 2 BANDORASAKULON	99.919.600
160	SD NEGERI 2 BANDORASAWETAN	118.993.780
161	SD NEGERI 2 BOJONG	91.674.200
162	SD NEGERI 2 CARACAS	196.636.000
163	SD NEGERI 2 CILIMUS	84.157.900
164	SD NEGERI 2 LINGGAJATI	188.411.600



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
165	SD NEGERI 2 SAMPORA	121.668.000
166	SD NEGERI 2 SETIANEGARA	110.846.500
167	SD NEGERI 3 BANDORASAKULON	83.011.800
168	SD NEGERI 3 BOJONG	143.306.100
169	SD NEGERI 3 CARACAS	53.460.320
170	SD NEGERI 3 SAMPORA	129.928.200
171	SD NEGERI 4 BOJONG	110.448.479
172	SD NEGERI 4 CILIMUS	145.843.300
173	SD NEGERI 5 CILIMUS	65.616.900
174	SD NEGERI CIBEUREUM	116.885.400
175	SD NEGERI KALIAREN	145.510.000
176	SD NEGERI LINGGAINDAH	65.594.600
177	SD NEGERI LINGGAMEKAR	101.078.900
178	SD NEGERI LINGGASANA	126.586.000
179	SD NEGERI 1 CIKEUSAL	138.265.000
180	SD NEGERI 1 CILEUYA	130.268.000
181	SD NEGERI 1 CIMAHI	107.435.000
182	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	95.695.000
183	SD NEGERI 1 KANANGA	112.035.000
184	SD NEGERI 1 MARGAMUKTI	146.610.000
185	SD NEGERI 1 MULYAJAYA	65.368.100
186	SD NEGERI 2 CIKEUSAL	141.282.000
187	SD NEGERI 2 CILEUYA	112.554.000
188	SD NEGERI 2 CIMAHI	83.162.200
189	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	77.438.200
190	SD NEGERI 2 KANANGA	60.565.000
191	SD NEGERI 2 MULYAJAYA	103.390.000
192	SD NEGERI 3 CILEUYA	119.975.000
193	SD NEGERI 3 MARGAMUKTI	57.104.600
194	SD NEGERI 4 MARGAMUKTI	54.875.800
195	SD NEGERI CIMULYA	146.010.600
196	SD NEGERI MEKARJAYA	215.171.000
197	SD NEGERI SUKAJAYA	180.647.500
198	SD NEGERI 1 CIJEMIT	74.044.515
199	SD NEGERI 1 CIPEDES	152.662.965
200	SD NEGERI 1 PAMUPUKAN	92.630.700
201	SD NEGERI 1 RAMBATAN	164.264.975
202	SD NEGERI 2 CIJEMIT	72.381.664
203	SD NEGERI 2 PAMUPUKAN	65.901.100
204	SD NEGERI 2 RAMBATAN	41.508.930
205	SD NEGERI 3 CIJEMIT	16.830.000
206	SD NEGERI 3 CIPEDES	80.204.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
207	SD NEGERI 4 CIPEDES	61.145.090
208	SD NEGERI 4 RAMBATAN	72.577.800
209	SD NEGERI CINIRU	148.262.502
210	SD NEGERI GUNUNGMANIK	82.401.800
211	SD NEGERI LONGKEWANG	96.506.943
212	SD NEGERI MUNGKAL DATAR	86.759.500
213	SD NEGERI PINARA	96.867.550
214	SD NEGERI 1 CIMARANTEN	176.772.700
215	SD NEGERI 1 KAROYA	91.956.400
216	SD NEGERI 1 MUNCANGELA	148.652.000
217	SD NEGERI 1 PAMULIHAN	139.700.000
218	SD NEGERI 1 SALAREUMA	89.276.600
219	SD NEGERI 1 SUGANANGAN	115.668.000
220	SD NEGERI 1 SUSUKAN	71.828.700
221	SD NEGERI 2 CIMARANTEN	85.235.800
222	SD NEGERI 2 KAROYA	125.883.700
223	SD NEGERI 2 MUNCANGELA	157.909.000
224	SD NEGERI 2 PAMULIHAN	127.532.000
225	SD NEGERI 2 SALAREUMA	101.684.800
226	SD NEGERI 2 SUGANANGAN	59.552.119
227	SD NEGERI 3 SUSUKAN	167.460.000
228	SD NEGERI CIPICUNG	177.983.800
229	SD NEGERI MEKARSARI	107.308.500
230	SD NEGERI SUKAMUKTI	188.206.000
231	SD NEGERI 1 BAOK	89.800.000
232	SD NEGERI 1 CITUNDUN	38.640.000
233	SD NEGERI 1 CIWARU	115.590.000
234	SD NEGERI 1 GARAJATI	89.125.000
235	SD NEGERI 1 SUMBERJAYA	112.771.500
236	SD NEGERI 2 BAOK	37.327.500
237	SD NEGERI 2 CITUNDUN	117.830.000
238	SD NEGERI 2 CIWARU	118.356.000
239	SD NEGERI 2 GARAJATI	82.370.000
240	SD NEGERI 2 SUMBERJAYA	78.880.000
241	SD NEGERI 3 CIWARU	177.200.000
242	SD NEGERI 3 GARAJATI	85.260.000
243	SD NEGERI 4 CIWARU	125.120.000
244	SD NEGERI ANDAMUI	126.536.900
245	SD NEGERI CILAYUNG	117.166.000
246	SD NEGERI CITIKUR	101.688.100
247	SD NEGERI KARANGBARU	199.965.000
248	SD NEGERI LEBAKHERANG	79.378.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
249	SD NEGERI LINGGAJAYA	131.060.000
250	SD NEGERI SAGARANTEN	81.550.000
251	SD NEGERI 1 BAKOM	131.709.950
252	SD NEGERI 1 CIMENGA	117.230.000
253	SD NEGERI 1 DARMA	279.436.000
254	SD NEGERI 1 SAGARAHANG	132.905.500
255	SD NEGERI 1 SAKERTA TIMUR	80.102.800
256	SD NEGERI 1 TUGUMULYA	41.730.300
257	SD NEGERI 2 BAKOM	172.883.500
258	SD NEGERI 2 CIMENGA	75.560.000
259	SD NEGERI 2 DARMA	174.602.000
260	SD NEGERI 2 SAGARAHANG	110.295.000
261	SD NEGERI 2 SAKERTA TIMUR	79.638.900
262	SD NEGERI 2 TUGUMULYA	83.030.000
263	SD NEGERI CAGEUR	139.151.000
264	SD NEGERI CIKUPA	166.605.150
265	SD NEGERI CIPASUNG	263.250.000
266	SD NEGERI GUNUNGSIRAH	261.297.500
267	SD NEGERI JAGARA	230.410.000
268	SD NEGERI KARANGANYAR	259.730.000
269	SD NEGERI KARANGSARI	203.883.750
270	SD NEGERI KAWAHMANUK	156.612.000
271	SD NEGERI PANINGGARAN	158.100.000
272	SD NEGERI PARUNG	263.016.600
273	SD NEGERI SAKERTA BARAT	223.202.900
274	SD NEGERI SITUSARI	123.217.900
275	SD NEGERI SUKARASA	148.288.000
276	SD NEGERI 1 KUTAKEMBARAN	99.144.058
277	SD NEGERI 1 LENGKONG	244.762.995
278	SD NEGERI 1 PURWASARI	118.923.905
279	SD NEGERI 2 KUTAKEMBARAN	125.381.257
280	SD NEGERI 2 PURWASARI	208.483.602
281	SD NEGERI 3 LENGKONG	241.540.477
282	SD NEGERI 3 PURWASARI	139.593.620
283	SD NEGERI CIKANANGA	130.203.820
284	SD NEGERI CIRUKEM	162.175.557
285	SD NEGERI GARAWANGI	292.018.481
286	SD NEGERI GEWOK	225.583.305
287	SD NEGERI KADATUAN	168.070.812
288	SD NEGERI KARAMATWANGI	84.742.250
289	SD NEGERI MANCAGAR	104.305.800
290	SD NEGERI MEKARMULYA	143.939.748



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
291	SD NEGERI PAKEMBANGAN	175.812.315
292	SD NEGERI SUKAIMUT	45.007.300
293	SD NEGERI SUKAMULYA	147.506.325
294	SD NEGERI TAMBAKBAYA	62.923.239
295	SD NEGERI TEMBONG	116.393.678
296	SD NEGERI 1 BUNIGEULIS	133.748.200
297	SD NEGERI 1 HANTARA	82.568.400
298	SD NEGERI 2 BUNIGEULIS	111.505.000
299	SD NEGERI 2 HANTARA	75.052.000
300	SD NEGERI 3 BUNIGEULIS	79.862.250
301	SD NEGERI CIKONDANG	77.760.000
302	SD NEGERI CITAPEN	105.074.100
303	SD NEGERI PAKAPASAN GIRANG	137.159.100
304	SD NEGERI PAKAPASAN HILIR	56.169.850
305	SD NEGERI PASIRAGUNG	65.202.700
306	SD NEGERI TUNDAGAN	214.200.400
307	SD NEGERI 1 BABAKANMULYA	101.968.549
308	SD NEGERI 1 JALAKSANA	288.030.000
309	SD NEGERI 1 MANISKIDUL	77.560.000
310	SD NEGERI 1 MANISLOR	88.017.000
311	SD NEGERI 1 PEUSING	100.354.000
312	SD NEGERI 1 SANGKANERANG	102.639.800
313	SD NEGERI 1 SEMBAWA	120.025.600
314	SD NEGERI 1 SIDAMULYA	111.226.300
315	SD NEGERI 1 SINDANGBARANG	95.485.000
316	SD NEGERI 1 SUKAMUKTI	160.642.000
317	SD NEGERI 2 BABAKANMULYA	123.317.000
318	SD NEGERI 2 MANISKIDUL	126.800.000
319	SD NEGERI 2 MANISLOR	122.086.000
320	SD NEGERI 2 PEUSING	88.337.000
321	SD NEGERI 2 SANGKANERANG	85.510.000
322	SD NEGERI 2 SEMBAWA	112.090.700
323	SD NEGERI 2 SIDAMULYA	85.737.000
324	SD NEGERI 2 SINDANGBARANG	135.871.000
325	SD NEGERI 2 SUKAMUKTI	133.545.700
326	SD NEGERI 3 JALAKSANA	77.195.100
327	SD NEGERI 3 MANISKIDUL	116.360.000
328	SD NEGERI 3 MANISLOR	103.123.500
329	SD NEGERI 4 JALAKSANA	172.096.600
330	SD NEGERI CINIRU	87.443.300
331	SD NEGERI NANGGERANG	151.008.600
332	SD NEGERI PADAMENAK	121.104.786



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
333	SD NEGERI SADAMANTRA	118.860.000
334	SD NEGERI SAYANA	83.556.700
335	SD NEGERI 1 CENGAL	139.332.500
336	SD NEGERI 1 CIKELENG	214.173.800
337	SD NEGERI 1 JAPARA	110.595.000
338	SD NEGERI 1 RAJADANU	123.985.300
339	SD NEGERI 2 CENGAL	153.815.700
340	SD NEGERI 2 CIKELENG	144.263.400
341	SD NEGERI 2 JAPARA	102.589.500
342	SD NEGERI 2 RAJADANU	126.714.200
343	SD NEGERI 3 CENGAL	160.920.000
344	SD NEGERI CITAPEN	140.007.800
345	SD NEGERI DUKUHDALAM	100.877.600
346	SD NEGERI GARATENGAH	123.286.200
347	SD NEGERI KALIMATI	104.147.300
348	SD NEGERI SINGKUP	50.600.000
349	SD NEGERI WANO	54.887.000
350	SD NEGERI 1 BAYUNING	140.178.630
351	SD NEGERI 1 CIHERANG	113.890.000
352	SD NEGERI 1 KADUGEDE	179.213.000
353	SD NEGERI 1 WINDUJANTEN	83.882.300
354	SD NEGERI 2 BAYUNING	171.662.820
355	SD NEGERI 2 CIHERANG	120.675.115
356	SD NEGERI 2 KADUGEDE	119.345.800
357	SD NEGERI 2 WINDUJANTEN	77.745.200
358	SD NEGERI 3 CIHERANG	169.289.400
359	SD NEGERI 3 KADUGEDE	89.240.000
360	SD NEGERI BABATAN	81.443.350
361	SD NEGERI CIKETAK	93.547.000
362	SD NEGERI CIPONDOK	75.440.000
363	SD NEGERI CISUKADANA	49.580.000
364	SD NEGERI MARGABAKTI	138.290.700
365	SD NEGERI NANGKA	70.802.250
366	SD NEGERI SINDANGJAWA	67.254.900
367	SD NEGERI TINGGAR	91.991.180
368	SD NEGERI 1 CIPANCUR	133.702.700
369	SD NEGERI 1 KALIMANGGISKULON	141.688.227
370	SD NEGERI 1 KALIMANGGISWETAN	160.964.400
371	SD NEGERI 1 KERTAWANA	286.523.280
372	SD NEGERI 2 CIPANCUR	78.376.200
373	SD NEGERI 2 KALIMANGGISKULON	156.920.200
374	SD NEGERI 2 KALIMANGGISWETAN	110.522.400



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
375	SD NEGERI 3 KALIMANGGISKULON	117.855.800
376	SD NEGERI 3 KERTAWANA	86.995.000
377	SD NEGERI PARTAWANGUNAN	137.324.000
378	SD NEGERI WANASARAYA	181.055.500
379	SD NEGERI 1 JABRANTI	104.140.000
380	SD NEGERI 1 KARANGKANCANA	186.908.000
381	SD NEGERI 1 MARGACINA	72.210.000
382	SD NEGERI 1 SEGONG	51.785.000
383	SD NEGERI 1 SUKASARI	145.430.000
384	SD NEGERI 1 TANJUNGKERTA	112.998.000
385	SD NEGERI 2 JABRANTI	68.240.000
386	SD NEGERI 2 KARANGKANCANA	72.424.100
387	SD NEGERI 2 MARGACINA	65.978.900
388	SD NEGERI 2 SEGONG	123.820.000
389	SD NEGERI 2 TANJUNGKERTA	140.953.600
390	SD NEGERI 3 JABRANTI	68.650.000
391	SD NEGERI 3 KARANGKANCANA	39.510.000
392	SD NEGERI CIHANJARO	103.850.000
393	SD NEGERI KADUAGUNG	178.420.000
394	SD NEGERI SIMPAYJAYA	150.777.000
395	SD NEGERI 1 BOJONG	119.673.800
396	SD NEGERI 1 CILAJA	136.420.160
397	SD NEGERI 1 CILOA	124.354.900
398	SD NEGERI 1 GANDASOLI	152.882.000
399	SD NEGERI 1 KALAPAGUNUNG	127.844.413
400	SD NEGERI 1 KARANGMANGU	118.229.928
401	SD NEGERI 1 RAGAWACANA	112.064.729
402	SD NEGERI 2 BOJONG	88.352.500
403	SD NEGERI 2 CILAJA	55.692.600
404	SD NEGERI 2 CILOA	170.326.021
405	SD NEGERI 2 GANDASOLI	106.868.200
406	SD NEGERI 2 KALAPAGUNUNG	149.858.000
407	SD NEGERI 2 KARANGMANGU	80.009.450
408	SD NEGERI 2 RAGAWACANA	138.082.900
409	SD NEGERI CIBENTANG	156.149.300
410	SD NEGERI CIKASO	75.311.600
411	SD NEGERI CIKUBANGSARI	78.146.100
412	SD NEGERI GEREBA	72.400.000
413	SD NEGERI KRAMATMULYA	83.590.500
414	SD NEGERI PAJAMBON	154.445.050
415	SD NEGERI UNGGULAN	155.497.400
416	SD NEGERI WIDARASARI	97.349.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
417	SD NEGERI 1 ANCARAN	173.284.500
418	SD NEGERI 1 AWIRARANGAN	365.392.505
419	SD NEGERI 1 CIBINUANG	107.964.800
420	SD NEGERI 1 CIPORANG	361.664.850
421	SD NEGERI 1 CIRENDANG	217.578.500
422	SD NEGERI 1 CITANGTU	103.360.001
423	SD NEGERI 1 KARANGTAWANG	161.524.840
424	SD NEGERI 1 KASTURI	112.653.330
425	SD NEGERI 1 KEDUNGARUM	87.251.600
426	SD NEGERI 1 PADAREK	94.038.100
427	SD NEGERI 1 PURWAWINANGUN	254.538.550
428	SD NEGERI 1 WINDUHAJI	263.157.110
429	SD NEGERI 1 WINDUSENGKAHAN	125.332.750
430	SD NEGERI 10 KUNINGAN	63.127.020
431	SD NEGERI 11 KUNINGAN	85.533.474
432	SD NEGERI 17 KUNINGAN	541.199.411
433	SD NEGERI 2 ANCARAN	211.993.400
434	SD NEGERI 2 CIBINUANG	66.114.500
435	SD NEGERI 2 CIPORANG	55.583.409
436	SD NEGERI 2 CIRENDANG	201.113.580
437	SD NEGERI 2 CITANGTU	106.538.600
438	SD NEGERI 2 KARANGTAWANG	129.295.020
439	SD NEGERI 2 KASTURI	195.450.820
440	SD NEGERI 2 KEDUNGARUM	140.535.000
441	SD NEGERI 2 KUNINGAN	341.622.900
442	SD NEGERI 2 PADAREK	75.823.300
443	SD NEGERI 2 PURWAWINANGUN	246.674.500
444	SD NEGERI 2 WINDUHAJI	149.160.900
445	SD NEGERI 2 WINDUSENGKAHAN	105.618.530
446	SD NEGERI 3 ANCARAN	231.590.650
447	SD NEGERI 3 AWIRARANGAN	139.787.450
448	SD NEGERI 3 CIPORANG	111.682.300
449	SD NEGERI 3 CITANGTU	87.355.300
450	SD NEGERI 3 KARANGTAWANG	70.504.782
451	SD NEGERI 3 PURWAWINANGUN	179.034.000
452	SD NEGERI 3 WINDUHAJI	94.814.300
453	SD NEGERI 4 AWIRARANGAN	90.078.000
454	SD NEGERI 4 CIJOHO	75.156.710
455	SD NEGERI 4 CITANGTU	51.109.700
456	SD NEGERI 4 KUNINGAN	204.288.309
457	SD NEGERI 4 PURWAWINANGUN	135.685.730
458	SD NEGERI 5 KUNINGAN	103.854.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
459	SD NEGERI 5 PURWAWINANGUN	136.218.713
460	SD NEGERI 6 PURWAWINANGUN	85.619.220
461	SD NEGERI 7 PURWAWINANGUN	84.676.055
462	SD NEGERI CIGINTUNG	180.874.220
463	SD NEGERI CIJOHO	389.020.100
464	SD NEGERI 1 BENDUNGAN	84.000.000
465	SD NEGERI 1 CINAGARA	154.616.300
466	SD NEGERI 1 CINEUMBEUY	161.117.000
467	SD NEGERI 1 LANGSEB	87.067.600
468	SD NEGERI 1 LEBAKWANGI	162.321.887
469	SD NEGERI 1 MEKARWANGI	157.240.300
470	SD NEGERI 1 PAGUNDAN	200.064.800
471	SD NEGERI 1 SINDANG	174.402.800
472	SD NEGERI 2 BENDUNGAN	110.130.700
473	SD NEGERI 2 CINAGARA	173.441.700
474	SD NEGERI 2 CINEUMBEUY	179.821.400
475	SD NEGERI 2 LANGSEB	109.059.140
476	SD NEGERI 2 LEBAKWANGI	157.820.700
477	SD NEGERI 2 MEKARWANGI	210.692.100
478	SD NEGERI 2 PAGUNDAN	125.230.287
479	SD NEGERI 2 SINDANG	120.849.100
480	SD NEGERI 3 MEKARWANGI	124.861.800
481	SD NEGERI CIPETIR	196.434.100
482	SD NEGERI MANCAGAR	74.419.600
483	SD NEGERI MANGGARI	143.414.000
484	SD NEGERI PAJAWANKIDUL	231.518.000
485	SD NEGERI PASAYANGAN	168.538.500
486	SD NEGERI 1 CIKADUWETAN	169.359.000
487	SD NEGERI 1 CIKANDANG	200.020.000
488	SD NEGERI 1 CIRAHAYU	117.383.400
489	SD NEGERI 1 DUKUHMAJA	145.585.000
490	SD NEGERI 1 GUNUNGKARUNG	127.515.000
491	SD NEGERI 1 LURAGUNGLANDEUH	113.560.000
492	SD NEGERI 1 PANYOSOGAN	125.438.900
493	SD NEGERI 1 WILANAGARA	100.076.600
494	SD NEGERI 2 CIKADUWETAN	167.822.300
495	SD NEGERI 2 CIKANDANG	47.713.100
496	SD NEGERI 2 CIRAHAYU	97.557.600
497	SD NEGERI 2 DUKUHMAJA	75.522.400
498	SD NEGERI 2 GUNUNGKARUNG	93.969.000
499	SD NEGERI 2 LURAGUNGLANDEUH	134.800.000
500	SD NEGERI 2 PANYOSOGAN	90.160.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
501	SD NEGERI 2 WILANAGARA	140.525.100
502	SD NEGERI 3 CIKADUWETAN	63.910.000
503	SD NEGERI 3 LURAGUNGLANDEUH	132.162.400
504	SD NEGERI BENDA	142.762.300
505	SD NEGERI CIGEDANG	195.123.000
506	SD NEGERI DUKUHPICUNG	145.625.000
507	SD NEGERI LURAGUNGTONGGOH	149.468.000
508	SD NEGERI MARGASARI	55.767.200
509	SD NEGERI SINDANGSARI	106.364.800
510	SD NEGERI SINDANGSUKA	101.970.000
511	SD NEGERI WALAHARCAGEUR	161.554.000
512	SD NEGERI 1 CIPAKEM	101.874.500
513	SD NEGERI 1 CIPORANG	138.469.500
514	SD NEGERI 1 GALAHERANG	90.400.000
515	SD NEGERI 1 MANDALAJAYA	41.968.000
516	SD NEGERI 1 PADAMULYA	79.862.000
517	SD NEGERI 2 CIPAKEM	67.639.000
518	SD NEGERI 2 GALAHERANG	153.808.000
519	SD NEGERI 2 MANDALAJAYA	94.058.500
520	SD NEGERI 2 PADAMULYA	215.267.000
521	SD NEGERI 3 CIPAKEM	68.355.100
522	SD NEGERI 4 CIPAKEM	70.240.000
523	SD NEGERI BUNIASIH	72.787.700
524	SD NEGERI CIKAHURIPAN	296.361.400
525	SD NEGERI DUKUHTENGAH	103.335.000
526	SD NEGERI GARAHAJI	66.597.200
527	SD NEGERI GIRIWARINGIN	89.229.400
528	SD NEGERI KARANGTENGAH	85.699.300
529	SD NEGERI KUTAMANDARAKAN	82.488.100
530	SD NEGERI KUTARAJA	104.412.300
531	SD NEGERI MALEBER	242.703.350
532	SD NEGERI MEKARSARI	104.808.600
533	SD NEGERI PARAKAN	146.897.100
534	SD NEGERI 1 KERTAWINANGUN	100.743.000
535	SD NEGERI 1 NANGGELA	121.300.000
536	SD NEGERI 2 KERTAWINANGUN	62.120.900
537	SD NEGERI 2 NANGGELA	102.152.000
538	SD NEGERI CIREA	158.240.000
539	SD NEGERI MANDIRANCAN	215.797.000
540	SD NEGERI NANGGERANGJAYA	35.880.000
541	SD NEGERI PAKEMBANGAN	134.605.000
542	SD NEGERI RANDOBAWAGIRANG	114.032.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
543	SD NEGERI RANDOBAWAILIR	153.546.000
544	SD NEGERI SALAKADOMAS	176.579.000
545	SD NEGERI SEDA	130.803.000
546	SD NEGERI SUKASARI	113.070.500
547	SD NEGERI TRIJAYA	75.732.000
548	SD NEGERI 1 CIKADU	140.680.000
549	SD NEGERI 1 JAMBAR	60.360.000
550	SD NEGERI 1 KERTAWIRAMA	88.268.000
551	SD NEGERI 1 NUSAHERANG	159.433.000
552	SD NEGERI 2 CIKADU	91.080.000
553	SD NEGERI 2 JAMBAR	76.360.000
554	SD NEGERI 2 KERTAWIRAMA	53.300.000
555	SD NEGERI 3 CIKADU	57.626.800
556	SD NEGERI 3 HAURKUNING	63.135.000
557	SD NEGERI 3 JAMBAR	150.634.900
558	SD NEGERI CIASIH	48.760.000
559	SD NEGERI HAURKUNING	277.335.700
560	SD NEGERI KERTAYUGA	76.127.900
561	SD NEGERI WINDUSARI	78.827.500
562	SD NEGERI 1 PATALAGAN	108.692.000
563	SD NEGERI 1 TENJOLAYAR	106.960.900
564	SD NEGERI 2 PATALAGAN	79.828.000
565	SD NEGERI 2 TENJOLAYAR	103.814.500
566	SD NEGERI DANALAMPAH	104.356.400
567	SD NEGERI KAHİYANGAN	124.200.000
568	SD NEGERI MEKARJAYA	118.489.500
569	SD NEGERI PANCALANG	197.493.000
570	SD NEGERI RAJAWETAN	81.820.700
571	SD NEGERI SAREWU	119.880.000
572	SD NEGERI SILEBU	202.213.500
573	SD NEGERI SINDANGKEMPENG	118.556.000
574	SD NEGERI SUMBAKELING	69.705.300
575	SD NEGERI TAJURBUNTU	141.132.500
576	SD NEGERI TARIKOLOT	151.814.900
577	SD NEGERI 1 CIWIRU	79.473.800
578	SD NEGERI 1 KADUELA	68.550.500
579	SD NEGERI 1 PADABEUNGHAR	115.610.000
580	SD NEGERI 1 PANIIS	118.079.000
581	SD NEGERI 2 CIWIRU	54.692.000
582	SD NEGERI 2 KADUELA	71.404.400
583	SD NEGERI 2 PADABEUNGHAR	21.227.000
584	SD NEGERI 2 PANIIS	138.085.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
585	SD NEGERI 3 PASAWAHAN	85.618.425
586	SD NEGERI CIBUNTU	46.293.600
587	SD NEGERI CIDAHU	96.268.625
588	SD NEGERI CIMARA	148.165.000
589	SD NEGERI PASAWAHAN	172.165.000
590	SD NEGERI SINGKUP	90.700.000
591	SD NEGERI 1 BAGAWAT	45.080.000
592	SD NEGERI 1 CANTILAN	58.527.500
593	SD NEGERI 1 CIBERUNG	138.900.000
594	SD NEGERI 1 KUTAWARINGIN	66.240.000
595	SD NEGERI 1 PADAHURIP	58.599.200
596	SD NEGERI 1 SELAJAMBE	45.061.000
597	SD NEGERI 2 BAGAWAT	34.955.700
598	SD NEGERI 2 CANTILAN	58.945.600
599	SD NEGERI 2 KUTAWARINGIN	48.744.500
600	SD NEGERI 2 PADAHURIP	35.880.000
601	SD NEGERI 2 SELAJAMBE	38.640.000
602	SD NEGERI 3 CIBERUNG	29.440.000
603	SD NEGERI 3 KUTAWARINGIN	57.960.000
604	SD NEGERI 3 SELAJAMBE	95.160.000
605	SD NEGERI JAMBERAMA	70.730.000
606	SD NEGERI 1 BABAKANREUMA	86.281.500
607	SD NEGERI 1 KERTAWANGUNAN	129.300.000
608	SD NEGERI 1 KERTAYASA	102.721.400
609	SD NEGERI 1 TARAJU	156.466.800
610	SD NEGERI 2 BABAKANREUMA	177.361.200
611	SD NEGERI 2 KERTAWANGUNAN	113.210.600
612	SD NEGERI 2 KERTAYASA	77.471.000
613	SD NEGERI 2 TARAJU	151.790.000
614	SD NEGERI BALONG	173.030.500
615	SD NEGERI DUKUHLOR	173.705.400
616	SD NEGERI KADUAGUNG	191.906.400
617	SD NEGERI KERTAUNGERAN	315.200.000
618	SD NEGERI SINDANGAGUNG	329.974.000
619	SD NEGERI SINDANGSARI	217.397.200
620	SD NEGERI TIRTAWANGUNAN	88.069.000
621	SD NEGERI 1 JATISARI	57.472.700
622	SD NEGERI 1 PAMULIHAN	44.599.500
623	SD NEGERI 1 SITUGEDE	72.258.600
624	SD NEGERI 1 SUBANG	75.580.200
625	SD NEGERI 1 TANGKOLO	63.611.400
626	SD NEGERI 2 JATISARI	55.893.100



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
627	SD NEGERI 2 PAMULIHAN	55.230.800
628	SD NEGERI 2 SITUGEDE	52.201.700
629	SD NEGERI 2 SUBANG	40.204.000
630	SD NEGERI 2 TANGKOLO	63.992.900
631	SD NEGERI 3 PAMULIHAN	50.780.000
632	SD NEGERI 3 SUBANG	36.009.300
633	SD NEGERI 3 TANGKOLO	44.626.000
634	SD NEGERI 4 SUBANG	44.479.000
635	SD NEGERI BANGUNJAYA	39.762.200
636	SD NEGERI GUNUNGACI	26.220.000
TOTAL		77.636.560.613

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
1	SMP NEGERI 1 CIAWIGEBANG	986.217.800
2	SMP NEGERI 1 CIBEUREUM	407.830.000
3	SMP NEGERI 1 CIBINGBIN	677.763.000
4	SMP NEGERI 1 CIDAHU	939.787.100
5	SMP NEGERI 1 CIGANDAMEKAR	373.199.650
6	SMP NEGERI 1 CIGUGUR	373.098.200
7	SMP NEGERI 1 CILEBAK	197.317.000
8	SMP NEGERI 1 CILIMUS	919.945.000
9	SMP NEGERI 1 CIMAHI	400.560.000
10	SMP NEGERI 1 CINIRU	312.553.300
11	SMP NEGERI 1 CIPICUNG	480.636.000
12	SMP NEGERI 1 CIWARU	728.360.400
13	SMP NEGERI 1 DARMA	583.741.900
14	SMP NEGERI 1 GARAWANGI	827.218.580
15	SMP NEGERI 1 HANTARA	305.699.800
16	SMP NEGERI 1 JALAKSANA	1.084.710.000
17	SMP NEGERI 1 JAPARA	521.240.800
18	SMP NEGERI 1 KADUGEDE	885.686.530
19	SMP NEGERI 1 KALIMANGGIS	680.138.300
20	SMP NEGERI 1 KARANGKANCANA	426.430.000
21	SMP NEGERI 1 KRAMATMULYA	789.341.400
22	SMP NEGERI 1 KUNINGAN	996.608.980
23	SMP NEGERI 1 LEBAKWANGI	865.239.050
24	SMP NEGERI 1 LURAGUNG	888.174.000
25	SMP NEGERI 1 MALEBER	638.023.100
26	SMP NEGERI 1 MANDIRANCAN	645.100.000
27	SMP NEGERI 1 NUSAHERANG	292.746.000
28	SMP NEGERI 1 PANCALANG	340.998.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
29	SMP NEGERI 1 PASAWAHAN	569.610.600
30	SMP NEGERI 1 SELAJAMBE	223.009.950
31	SMP NEGERI 1 SINDANGAGUNG	357.718.900
32	SMP NEGERI 1 SUBANG	241.553.700
33	SMP NEGERI 2 CIAWIGEBANG	490.300.000
34	SMP NEGERI 2 CIBEUREUM	293.899.630
35	SMP NEGERI 2 CIBINGBIN	407.204.526
36	SMP NEGERI 2 CIDAHU	501.052.300
37	SMP NEGERI 2 CIGUGUR	143.551.900
38	SMP NEGERI 2 CILIMUS	509.705.000
39	SMP NEGERI 2 CIMAHI	422.500.800
40	SMP NEGERI 2 CINIRU	226.938.500
41	SMP NEGERI 2 CIWARU	304.871.200
42	SMP NEGERI 2 DARMA	101.867.200
43	SMP NEGERI 2 GARAWANGI	455.858.500
44	SMP NEGERI 2 JALAKSANA	626.090.000
45	SMP NEGERI 2 JAPARA	355.645.000
46	SMP NEGERI 2 KADUGEDE	228.425.250
47	SMP NEGERI 2 KALIMANGGIS	74.954.800
48	SMP NEGERI 2 KRAMATMULYA	557.017.800
49	SMP NEGERI 2 KUNINGAN	965.177.030
50	SMP NEGERI 2 LEBAKWANGI	469.431.000
51	SMP NEGERI 2 LURAGUNG	282.345.500
52	SMP NEGERI 2 MALEBER	274.753.500
53	SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN	638.746.400
54	SMP NEGERI 2 PANCALANG	357.045.543
55	SMP NEGERI 2 PASAWAHAN	260.542.000
56	SMP NEGERI 2 SELAJAMBE	191.383.100
57	SMP NEGERI 2 SINDANGAGUNG	490.126.500
58	SMP NEGERI 2 SUBANG	113.326.000
59	SMP NEGERI 3 CIAWIGEBANG	431.376.500
60	SMP NEGERI 3 CILIMUS	378.652.315
61	SMP NEGERI 3 CIMAHI	312.970.500
62	SMP NEGERI 3 DARMA	252.346.000
63	SMP NEGERI 3 KUNINGAN	710.976.000
64	SMP NEGERI 3 LURAGUNG	418.476.000
65	SMP NEGERI 4 CIAWIGEBANG	463.578.400
66	SMP NEGERI 4 DARMA	121.000.000
67	SMP NEGERI 4 KUNINGAN	1.012.508.900
68	SMP NEGERI 5 CIAWIGEBANG	523.126.600
69	SMP NEGERI 5 KUNINGAN	236.682.200
70	SMP NEGERI 6 KUNINGAN	99.126.500



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
71	SMP NEGERI 7 KUNINGAN	952.334.593
72	SMP NEGERI SATAP BANTARPANJANG	51.520.000
73	SMP NEGERI SATU ATAP CIBULAN	78.400.000
74	SMP NEGERI SATU ATAP CIMULYA	77.280.000
75	SMP NEGERI SATU ATAP KAWUNGSARI	-
76	SMP NEGERI SATU ATAP PATALA	55.686.700
77	SMP NEGERI SATU ATAP SITUGEDE	90.960.000
78	SMP SATAP MARGABAKTI	61.943.000
79	SMP SATAP RAMBATAN	90.517.500
TOTAL		35.122.478.227

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
1	SD NEGERI 1 CIOMAS	77.671.879
2	SD NEGERI 1 CIPUTAT	55.015.592
3	SD NEGERI 1 KADURAMA	68.055.485
4	SD NEGERI 1 MEKARJAYA	60.146.190
5	SD NEGERI 2 MEKARJAYA	41.461.922
6	SD NEGERI 3 SUKADANA	79.121.392
7	SD NEGERI DUKUHDALAM	58.333.464
8	SD NEGERI 2 RANDUSARI	53.044.291
9	SD NEGERI 1 CIGADUNG	57.536.018
10	SD NEGERI GUNUNGKELING	55.547.500
11	SD NEGERI 2 CITUNDUN	32.764.476
12	SD NEGERI CILAYUNG	39.571.787
13	SD NEGERI LINGGAJAYA	41.565.392
14	SD NEGERI 2 TUGUMULYA	56.619.795
15	SD NEGERI 1 BABAKANMULYA	33.322.365
16	SD NEGERI 1 SUKAMUKTI	57.910.616
17	SD NEGERI SAYANA	42.353.907
18	SD NEGERI 1 JAPARA	76.699.800
19	SD NEGERI 3 CENGAL	72.586.500
20	SD NEGERI SINGKUP	78.653.300
21	SD NEGERI BABATAN	54.792.444
22	SD NEGERI 1 JABRANTI	42.659.060
23	SD NEGERI 1 CILOA	51.336.018
24	SD NEGERI 2 KARANGMANGU	55.272.500
25	SD NEGERI GEREBA	79.732.477
26	SD NEGERI 3 PURWAWINANGUN	74.271.378
27	SD NEGERI 1 CINEUMBEUY	68.289.417
28	SD NEGERI 2 LEBAKWANGI	64.270.508



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
29	SD NEGERI 3 HAURKUNING	53.340.200
30	SD NEGERI 1 TENJOLAYAR	60.600.000
31	SD NEGERI 2 BABAKANREUMA	52.920.633
32	SD NEGERI SINDANGAGUNG	64.456.283
33	SMP NEGERI 1 CIWARU	89.085.000
34	SMP NEGERI 1 GARAWANGI	62.838.600
35	SMP NEGERI 1 JALAKSANA	76.689.486
36	SMP NEGERI 1 KUNINGAN	69.507.363
37	SMP NEGERI 1 LEBAKWANGI	87.641.326
38	SMP NEGERI 2 CIAWIGEBANG	100.613.594
39	SMP NEGERI 2 JALAKSANA	96.215.200
TOTAL		2.442.513.158

REKAP BELANJA BARANG DAN JASA BOS 2022

(Dalam Rupiah)

No	Sekolah	NILAI REALISASI BARANG DAN JASA BOS
1	BOS SD REGULER	77.636.560.613
2	BOS SMP REGULER	35.122.478.227
	JUMLAH BOS REGULER	112.759.038.840
3	BOS SD KINERJA	1.859.922.589
4	BOS SMP KINERJA	582.590.569
	JUMLAH BOS KINERJA	2.442.513.158
	JUMLAH BOS 2022	115.201.551.998



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

Lampiran 5

REKAP BELANJA BARANG DAN JASA BLUD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Barang	38.622.565.210
2	Belanja Jasa	71.378.090.775
3	Belanja Pemeliharaan	3.810.091.283
4	Belanja Perjalanan Dinas	395.016.635
	Total	114.205.763.903

REKAP BELANJA HIBAH

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.878.145.000	214.761.000	35.000.000	285.000.000	-	-	33.412.906.000
2	DINAS KESEHATAN	425.000.000	-	25.000.000	-	-	-	450.000.000
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000
4	DINAS SOSIAL	-	-	470.000.000	1.643.200.000	-	-	2.113.200.000
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	3.050.000.000	130.000.000	-	-	3.180.000.000
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	175.000.000	-	-	400.000.000	-	-	575.000.000
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000	-	-	400.000.000	-	-	475.000.000



tatan atas Laporan Keuangan
merintah Kabupaten Kuningan
tuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Jumlah
9	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000	-	650.000.000	50.000.000	-	400.000.000	1.150.000.000
10	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	11.000.000.000	-	700.000.000	-	-	-	11.700.000.000
11	SEKRETARIAT DAERAH	698.240.200	-	5.120.000.000	275.000.000	-	-	6.093.240.200
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.925.000.000	-	375.000.000	-	79.564.000	-	5.379.564.000
Jumlah		50.526.385.200	214.761.000	10.425.000.000	3.383.200.000	79.564.000	400.000.000	65.028.910.200

RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH*(Dalam Rupiah)*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang untuk PAUD Misbahul Huda Ds.Citundun Kec.Ciwaru Kuningan	PAUD Misbahul Huda	100.000.000
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk TK.PGRI Bougenvile Kapandayan Kec.Ciawigebang Kuningan (APBD)	TK.PGRI Bougenvile Kapandayan	50.000.000
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk BEM STIKES Muhamadiyah Kuningan	BEM STIKES Muhamadiyah Kng	25.000.000
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk TPA Nurul Iman Ds.Jambugeulis Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan (APBD)	TPA Nurul Iman	25.000.000
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk KB Bungur Indah Kab. Kuningan (APBD)	KB Bungur Indah II	50.000.000
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk LKP Dipta Karya Cira Kuningan	LKP Dipta Karya Cira	25.000.000
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk DPC HIPKI Kab. Kuningan	DPC HIPKI Kab.Kuningan	25.000.000
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang untuk MTs Nurul Huda Timbang Kec.Cigandamekar Kuningan	MTs Nurul Huda	25.000.000
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Balebat (APBD)	Sanggar Seni Balebat	100.000.000
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PC PMII Kab. Kuningan (APBD)	PMII Kab.Kuningan./".	50.000.000
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PPA Al- Madany Ds.Cilimus Kec.Cilimus Kuningan (APBD)	PPA Al-Madany	75.000.000
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk BEM UNISA Kab. Kuningan (APBD)	BEM UNISA	25.000.000
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kuningan (APBD)	PC.IMM Kab. Kuningan	50.000.000
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MI Fatahilah Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan (APBD)	MI Fatahilah Pangkalan	10.000.000
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MDTA Al-Hijrah Purwawinangun Kab. Kuningan (APBD)	MDTA Al-Hijrah Purwawinangun	25.000.000
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk HARPI MELATI DPC. KAB. KUNINGAN. (APBD)	HARPI Melati DPC Kab.Kuningan	50.000.000
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk KAMMI Daerah Kuningan	KAMMI Daerah Kuningan	50.000.000
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Pokja Bunda Paud	POKJA BUNDA PAUD//>>	100.000.000
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah uang Untuk Perkumpulan Pelita Karya Kuningan (APBD)	Perkumpulan Pelita Karya Kuningan	100.000.000
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk KS.Purwacarita Karya Ds.Kutakembaran Garawangi Kab. Kuningan (APBD)	KS. Purwacarita Karya >>	35.000.000
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Yayasan Dipati Ewangga Kuningan	Yayasan Dipati Ewangga Kuningan//	50.000.000
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MI PUI Babakanjati - Cigandamekar	MI. PUI Babakanjati Cigandamekar / M.NAJAZ, S.Ag	50.000.000
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk RA Miftahus Saadah Kalimanggis Wetan Kab. Kuningan (APBD)	RA Miftahus Sa'adah	50.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PUI Kab. Kuningan	PUI KAB.KUNINGAN	50.000.000
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MTs. Darussalam Japara Kuningan (APBD)	MTs.Darussalam Japara	100.000.000
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MI Al Islamiyah Linggamekar Cilimus Kuningan (APBD)	MI Cisabuk (MI Al Islamiyah)	100.000.000
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk BEM UNIKU (APBD)	BEM Uniku.//	25.000.000
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk TK Mawar 1 BPP Ciporang Kab. Kuningan (APBD)	TK Mawar I BPP Ciporang	50.000.000
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk SMK Cibening Cibingbin Kuningan (APBD)	SMK Cibening	100.000.000
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk BEM STIKES Kuningan	BEM STIKES KUNINGAN.>>//	25.000.000
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Belanja Non Modal Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak PAUD Stunting Di Kab. Kuningan (APBD)	CV.HS Putri	125.958.000
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah uang Untuk Yayasan Ar-Raudloh Kasturi Kuningan (APBD)	Yayasan Ar-Raudloh Kasturi	200.000.000
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk DPD PGM Kuningan	DPD PGM Indonesia Kab.Kuningan	250.000.000
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah uang Untuk POKJA Bunda PAUD Kuningan	POKJA BUNDA PAUD//>>	200.000.000
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MI PUI Kab. Kuningan	OTONG NURYAMIN, S.Pd.I	50.000.000
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PAUD YATAWAB Link.Pasapen Kuningan	PAUD Yatawab	50.000.000
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk BEM STKIP Muhamadiyah Kab. Kuningan	BEM STKIP Muhamadiyah Kuningan	25.000.000
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PGRI Kab. Kuningan (APBD)	PGRI Kab.Kuningan //	50.000.000
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk DPC GMNI Kab. Kuningan (APBD)	DPC GMNI Kuningan >>.	50.000.000
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Kober Paud Lodaya Ciwaru Kuningan (APBD)	Paud Kober Lodaya	50.000.000
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Dewan Kebudayaan Kab. Kuningan	Dewan Kebudayaan	25.000.000
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk SMK Samiudin Plus Cipakem (APBD)	SMK Samiudin Plus Cipakem >>	100.000.000
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk GTKI Kuningan (APBD)	IGTKI - PGRI Kabupaten Kuningan	50.000.000
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Lembaga PAUD Al-Anwar Ds.Nusherang Kuningan (APBD)	Lembaga PAUD Al-Anwar	50.000.000
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk HIMPAUDI Kuningan (APBD)	HIMPAUDI	50.000.000
46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Katiyasa Laras Kuningan	Sanggar Seni Katiyasa Laras	50.000.000
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Sekar Dangiang Sunda Kuningan	Sanggar Seni Sekar Dangiang Sunda	15.000.000
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk DPC Forsa Kuningan	DPC Forsa Kuningan.	25.000.000
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Dangiang Jagat	Sanggar Seni Dangiang Jagat	30.000.000
50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Pramaditta	Sanggar Seni Pramaditta	25.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Extra Nada Entertainment	Extra Nada Entertainment	20.000.000
52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Pusaka Aria Kamuning 3	Pusaka Aria Kamuning Tilu	15.000.000
53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk SMP Itus Jalaksana	SMP ITUS Kuningan.//	250.000.000
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MI - PUI Kaliaren Kec.Cilimus Kuningan (APBD)	MI - PUI Kaliaren	50.000.000
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah uang Untuk FK PKB Kab. Kuningan	FK PKBM Kab.Kuningan	50.000.000
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk HMI Cabang Kuningan (APBD)	HMI Cabang Kuningan //	50.000.000
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan kain Batik untuk Guru PAUD Formal dan Non Formal) APBD	CV.Mutiara Anandiatama	88.803.000
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Dewan Pendidikan Kab. Kuningan (APBD)	Dewan Pendidikan Kab.Kuningan	50.000.000
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk PKBM Romantika Ds.parung Kec.darma Kuningan (PAD)	PKBM Romantika ///	50.000.000
60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Sanggar Seni Sri Pusaka Sunda	Sanggar Seni SRIPUSAKA SUNDA	20.000.000
61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk Forum TBM Kuningan	Forum TBM Kuningan	50.000.000
62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk IPM Yogyakarta (APBD)	IPMK YOGYAKARTA//>>	100.000.000
63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah Uang Untuk MTs. PUI Cilimus Kuningan (APBD)	MTs PUI Cilimus	25.000.000
64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat		10.000.000
65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah DANA BOP Kesetaraan		9.980.000.000
66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hibah DANA BOP PAUD		19.538.145.000
67	DINAS KESEHATAN	Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga (POPTI Kab. Kuningan)	Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia Indonesia (POPTI)	25.000.000
68	DINAS KESEHATAN	Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga (PMI Kab. Kuningan)	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Kuningan	400.000.000
69	DINAS KESEHATAN	Pembayaran Hibah Keuangan kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Kuningan	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Kuningan	25.000.000
70	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		50.000.000
71	DINAS SOSIAL	Dibayar Belanja Hibah Bansos Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab. Kuningan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab. Kuningan	200.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
72	DINAS SOSIAL	Dibayar Belanja Hibah Bansos Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Antara Graha Berdaya Kab. Kuningan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	LKS Rumah Graha Berdaya	120.000.000
73	DINAS SOSIAL	Dibayar Biaya Belanja Hibah Bansos Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kab. Kuningan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)	50.000.000
74	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Dinas sosial	515.000.000
75	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		480.600.000
76	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		270.000.000
77	DINAS SOSIAL	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PAGODA ABE PLUS	50.000.000
78	DINAS SOSIAL	Belanja Hibah Uang kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diserahkan Kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab. Kuningan, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab. Kuningan	50.000.000
79	DINAS SOSIAL	Belanja Hibah kepada Badan & Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.		377.600.000
80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kananga Kec. Cimahi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani JAYANTI	100.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
81	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Ciwiru Kec. Pasawahan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani SABUK HALU II	100.000.000
82	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pengembangan Tanaman Hidroponik Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI BHUMIPONIK INDONESIA	25.000.000
83	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan JUT Dusun Cisandag Desa Cipakem Kecamatan Maleber Kab. Kuningan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK MASYARAKAT SANDAG (KMS)	145.000.000
84	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Kelompok Tani Rukun Tani III Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani Rukun Tani III	190.000.000
85	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kelompok Tani Nusa Jaya Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani NUSA JAYA	75.000.000
86	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Tunas Muda Desa Mulyajaya Kec. Cimahi Kabupaten Kuningan DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI TUNAS MUDA	100.000.000
87	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Karangamangu Kec. Kramatmulya Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2022	Kelompok Tani TUMENGGUNG III	100.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
88	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Parakan Kec. Maleber Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani TUNAS KARYA	100.000.000
89	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Sukamaju Kec. Cibingbin Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	GAPOKTAN SUKA MAKMUR	100.000.000
90	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Sukamulya Kec. Garawangi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani MULYA TANI	100.000.000
91	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kel Citangtu Kec. Kuningan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani PESAR MAJU	100.000.000
92	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Mandirancan Kec. Mandirancan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2022	Kelompok Tani TEGAL WETAN	100.000.000
93	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Cipari Kec. Cigugur Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani CIPARI 2	100.000.000
94	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Dampak Inflasi Kenaikan BBM untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Cikupa Kec. Darma Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani BINA KARYA 2	100.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
95	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Rumah RMU Kelompok Tani Mekarsari 2 Desa Jatisari Kecamatan Subang DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI MEKARSARI 2	135.000.000
96	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Sapihanean Desa Sukajaya Kec. Cimahi DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani SAPIHANEAN	100.000.000
97	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Gapoktan MEKAR JAYA	190.000.000
98	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Berkah Tani Desa Sagarahieng Kecamatan Darma DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani BERKAH TANI	100.000.000
99	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	KELOMPOK WANITA TANI MELATI SARI	15.000.000
100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	KELOMPOK WANITA TANI SRI AYU	15.000.000
101	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Irigasi Air Dalam Hortikultura Kelompok Tani Ambang Jaya Desa Sukaraja Kec. Ciawigebang DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani AMBANG JAYA	190.000.000
102	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Windusari Kecamatan Nusahaerang Kabupaten Kuningan DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI MEKARSARI 1	100.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
103	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Jalan Produksi Hortikultura Kelompok Tani Mulya Asih I di Desa Puncak Kec. Cigugur DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani MULYA ASIH I	100.000.000
104	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	KELOMPOK TANI SILIH ASIH	15.000.000
105	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	KELOMPOK WANITA TANI SARI BUMI	15.000.000
106	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	Kelompok Tani Mekar Wangi	15.000.000
107	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	Kelompok Wanita Tani DAHLIA	15.000.000
108	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022	Kelompok Wanita Tani MEKAR SARI	15.000.000
109	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi Hortikultura di Kelompok Tani SRI DEWI I Desa Windujanten Kec. Kadugede DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani SRI DEWI I	100.000.000
110	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pengadaan DRYER UV pada Kelompok Tani Mekar Hurip II Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani MEKAR HURIP II	225.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
111	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan / Perbaikan Jalan Produksi Perkebunan Kelompok Tani Mulya Jaya Desa Sukarasa Kecamatan Darma DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	Kelompok Tani MULYA JAYA	100.000.000
112	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kelompok Tani Mitra Buana Desa Cimenga Kec. Darma DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI MITRA BUANA	75.000.000
113	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Desa Tangkolo Kecamatan Subang DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2022	KELOMPOK TANI KUBANG SARI	100.000.000
114	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Belanja Hibah Uang untuk Penguatan Modal (Gabah) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Tahun 2022	Ketua Kelompok Tani BANYU URIP	25.000.000
115	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah PPDI	DPMD	50.000.000
116	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah untuk Posyandu Cempaka I Kel Cirendang Kec Kuningan Tahun 2022 (Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, POSyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Posyandu Cempaka I Kel. Cirendang	50.000.000
117	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah untuk Sarana dan Prasarana kepada Pemuda Bhoenoet Desa Babakanjati Kec. Cigandamekar (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Pemuda Bhoenoet	50.000.000
118	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah untuk Posyandu Puhun 3 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan	Posyandu Puhun III	50.000.000
119	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah bagi Karang Taruna Komara Binangkit Desa Cisantana untuk Pembangunan Lahan Parkir Galeri Cekas	KT Komara Binangkit	25.000.000
120	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN SELAMAT DATANG KEPADA KARANG TARUNA PADAWANGI DESA SUKASARI	KARANG TARUNA PADAWANGI	50.000.000
121	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BELANJA HIBAH PERMODALAN USAHA EKONOMI BUDIDAYA IKAN LELE	POKDAKAN SRI RAHAYU I DESA CIBUNTU	50.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
122	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	belanja hibah uang PKTD Cikaso	Bumdes Sangga Emas	100.000.000
123	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja hibah Kelengkapan kantor dan pemeliharaan gedung DPC APDESI Kab Kuningan	APDESI	50.000.000
124	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Hibah BUM Desa Masagi Desa Cibinuang Kec. Kuningan (Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa)	BUMDES MASAGI	25.000.000
125	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Bantuan Hibah PABPDSI (Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	PABPDSI	50.000.000
126	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belanja Bantuan Hibah untuk Pengembangan Lapangan Olahraga kepada Karang Taruna Tunas Mandala Giri Desa Kalapagunung (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lurah, RT, RW, PKK, POSyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	Karang Taruna Tunas Mandala Giri	25.000.000
127	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengajuan GU Ke 2		50.000.000
128	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengajuan GU Ke - 6		100.000.000
129	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Hibah (LPPL)	LPPL KABUPATEN KUNINGAN	200.000.000
130	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Hibah (FORWADES)	Forum Wartawan Desa dan Sekolah	25.000.000
131	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Hibah (PWI)	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA	50.000.000
132	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Hibah (LPPL)	LPPL KABUPATEN KUNINGAN	200.000.000
133	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DEWAN KERAJINAN NASIONAL	250.000.000
134	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Dana Hibah dari keg. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOPERASI SERBA USAHA (KSU)	100.000.000
135	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KUNINGAN (KADIN) / H. Uba Subari, Ak	50.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
136	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEG. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KELOMPOK PONDOK INDAH	50.000.000
137	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Keg. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KELOMPOK MEUBEULAIR R. MULYA	25.000.000
138	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Keg. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (HIBAH)	KELOMPOK BERKAH JAYA MANDIRI	25.000.000
139	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba Dr Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelompok Mawar Dusun Manis	50.000.000
140	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KELOMPOK WARNA ALAM	50.000.000
141	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DANA hibah)	KELOMPOK BISAMANDIRI KERTAUNGAN	100.000.000
142	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN)	BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	50.000.000
143	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengajuan Dana Hibah dari Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Badan Usaha Milik IMM Kabupaten Kuningan	50.000.000
144	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (HIBAH)	KELOMPOK UMKM NUSA INDAH	25.000.000
145	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (HIBAH)	KELOMPOK UMKM SALUYU	25.000.000
146	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DANA HIBAH)	JAMUR KRISPI CYPY	50.000.000
147	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEG. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH)	KELOMPOK LINGGA BERKAH MADU KELENCENG LINGGASANA	100.000.000
148	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Dibayar transfer untuk sub.keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		150.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
149	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Sepak Bola Indonesia Kuningan / Pesik Kuningan (H. DIDI Sutardi)	Persatuan Sepak Bola Indonesia Kuningan / Pesik Kuningan (H. DIDI Sutardi)	50.000.000
150	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia Kabupaten Kuningan (PABERSI) / U. Kusmana S. Sos., M. Si	Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia Kabupaten Kuningan (PABERSI) / U. Kusmana S. Sos., M. Si	50.000.000
151	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kuningan	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kuningan	100.000.000
152	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada KORMI KABUPATEN KUNINGAN / HJ. IKA ACEP PURNAMA	KORMI KABUPATEN KUNINGAN / HJ. IKA ACEP PURNAMA (KETUA)	200.000.000
153	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) KAB. KUNINGAN / Hj. Yuana Woelansarie, SH	PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) KAB. KUNINGAN	200.000.000
154	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Taekwondo Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Kuningan	Taekwondo Indonesia Pengurus Cabang Kuningan ? Dr. A. Taufik Rohman, M. Si., M. Pd	100.000.000
155	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kab.Kuningan/GURUH IRAWAN ZULKARNAEN, S. STP. M.Si	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kab.Kuningan/GURUH IRAWAN ZULKARNAEN, S. STP. M.Si	200.000.000
156	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kuningan / Drs. H. Nurohim, M. Si		50.000.000
157	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kab. Kuningan	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kab. Kuningan	50.000.000
158	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Tim Pembinaan Kontingen Kegiatan PORPROV / ASEP ISMANTO, S. Pd., M. Pd	Tim Pembinaan Kontingen Kegiatan PORPROV / ASEP ISMANTO, S. Pd., M. Pd	250.000.000
159	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia (POGTI) / Kabupaten Kuningan / SISWOYO, SE	Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia (POGTI) / Kabupaten Kuningan / SISWOYO, SE	50.000.000
160	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Untuk Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kuningan / EVA NURAFIFAH LATIEF, SE., M. Si	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kuningan / EVA NURAFIFAH LATIEF, SE., M. Si	100.000.000
161	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PSSI ASKAB KUNINGAN / H. UDIN KUSNAEDI, SE., M. Si	PSSI ASKAB KUNINGAN / H. UDIN KUSNAEDI, SE., M. Si	200.000.000
162	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) / Drs. H. ENAY SUNARYO, MM	KONI KAB. KUNINGAN	1.598.062.500
163	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwatir Cabang Kuningan / RANA SUPARMAN, S. Sos	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kuningan	200.000.000
164	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) / Drs. H. ENAY SUNARYO, MM	KONI KAB. KUNINGAN	2.411.225.000
165	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) / Drs. H. ENAY SUNARYO, MM	KONI KAB. KUNINGAN	1.220.712.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
166	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kuningan / NUZUL RACHDY, SE	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kuningan	100.000.000
167	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PERSATUAN PANAHAH INDONESIA KUNINGAN (PERPANI) / Drs. H. LILI SUHERLI, M. Si	PERSATUAN PANAHAH INDONESIA KUNINGAN (PERPANI) / Drs. H. LILI SUHERLI, M. Si /	50.000.000
168	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kuningan / H. DEDE ISMAIL, SIP. M. Si	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kuningan	100.000.000
169	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kuningan / Yusup Dandi Asih	DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KAB. KUNINGAN / YUSUP DANDI ASIH	300.000.000
170	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Forum Karang Taruna Kabupaten Kuningan / Dr. CARLAN, M. M. Pd	FORUM KARANG TARUNA KUNINGAN	300.000.000
171	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada National Paralympic Committee Indonesia / Dr. CARLAN, M. M. Pd	NPCI KAB. KUNINGAN	1.000.000.000
172	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PESIK KABUPATEN KUNINGAN / DODO JUANDA	PESIK KABUPATEN KUNINGAN / DODO JUANDA	100.000.000
173	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) KAB. KUNINGAN / Hj. Yuana Woelansarie, SH	PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA (PERWOSI) KAB. KUNINGAN	200.000.000
174	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada KORMI KABUPATEN KUNINGAN / HJ. IKA ACEP PURNAMA (KETUA)	KORMI KABUPATEN KUNINGAN / HJ. IKA ACEP PURNAMA (KETUA)	500.000.000
175	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Persatuan Penembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Kuningan/ H. Moch Nurdijanto, SH., M. Si	Persatuan Penembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Kuningan/ H. Moch Nurdijanto, SH., M. Si	100.000.000
176	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) / Drs. H. ENAY SUNARYO, MM	KONI KAB. KUNINGAN	1.770.000.000
177	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada Himpunan Pencak Silat Surangga Panglipur / Ujang Khaerudin, S. Pd	Himpunan Pencak Silat Surangga Panglipur / Ujang Khaerudin, S. Pd	50.000.000
178	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Hibah Uang Kepada PAGUYUBAN MOBIL KUNINGAN / IYAN MOHAMMAD FAOZAN	PAGUYUBAN MOBIL KUNINGAN / IYAN MOHAMMAD FAOZAN	100.000.000
179	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan LKS LU Putra Ampuh Jaya	LKS LU Putra Ampuh Jaya	50.000.000
180	SEKRETARIAT DAERAH	Pencarian Hibah Kepada Masjid Al-Istiqomah Desa Margasari Kec. Luragung Kab. Kuningan	Masjid Al-Istiqomah	10.000.000
181	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Mushola Al-Falah	Mushola Al-Falah	10.000.000
182	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Kepada Masjid As-Sidiq	Masjid As-Sidiq	25.000.000
183	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan MASJID AL-FITROH Ciawigebang	MASJID AL-FITROH	15.000.000
184	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Kepada Majelis Ratib Suryalaya	Majelis Ratib Suryalaya	25.000.000
185	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Hibah DKM Al-Iklas Ciwaru	DKM Al-Iklas Ciwaru	50.000.000
186	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan DKM MIFTAHUL FALAH	DKM MIFTAHUL FALAH	100.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
187	SEKRETARIAT DAERAH	Pncairan Bantuan Hibah PD. Muhammadiyah Kuningan	PD. Muhammadiyah Kuningan	100.000.000
188	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Hibah Forum Kyai dan Qori Kabupaten Kuningan	Forum Kyai dan Qori Kabupaten Kuningan	250.000.000
189	SEKRETARIAT DAERAH	Belanja Hibah Kepada Sekretariat Kunci Bersama	Sekretariat Kunci Bersama	100.000.000
190	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada DPC FKDT Kabupaten Kuningan	DPC FKDT Kab Kuningan	2.000.000.000
191	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama	150.000.000
192	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada LPPTKA/TPA BKPRMI Kab. Kuningan	DPD BKPRMI	500.000.000
193	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada Baznas	Drs.H.R YAYAN SOFYAN, MM	300.000.000
194	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja hibah uang kepadabadan dan lembaga yang bersifat nirlaba,sukarela, dan dinas sosial yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang undangan	Drs. KH. D. Syarif Hidayatullah, MA	150.000.000
195	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Yayasan Pendidikan Isalm Al-Fattah desa lengkong kecamatan garawangi	Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah Kuningan	25.000.000
196	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Belanja Hibah uang kepada Ponpes Ihsanul Huda Desa Cijemit	Ponpes Ihsanul Huda desa cijemit	25.000.000
197	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Musola Nurul Hayati	Musola Nurul Hayati	10.000.000
198	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Mushola Al-Maarif	Mushola Al-Maarif	10.000.000
199	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Hibah DKM Nurul Fathiyyah	DKM Nurul Fathiyyah	100.000.000
200	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan MD.Daarussalam	MD.Daarussalam	30.000.000
201	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Hibah Majelis Taklim Ihyaa Ussunnah	Majelis Taklim Ihyaa Ussunnah	50.000.000
202	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan LDII Kab. Kuningan	LDII Kab. Kuningan	25.000.000
203	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Kepada Organisasi PDP PGM Kuningan	Organisasi PDP PGM Kuningan	50.000.000
204	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Kepada Pondok Pesantren Miftahul Karomah	Pondok Pesantren Miftahul Karomah	50.000.000
205	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja hibah uang kepada Mushola An-Nawawi	Mushola An'Nawawi	10.000.000
206	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja hibah uang kepada forum komunikasi penyuluh agama islam (FKPAI)	ISHAK	750.000.000
207	SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran Bantuan Hibah Kepada LPTQ Kab.Kuningan	Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si	500.000.000
208	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Mts. Ar. Rasyid	Mts. Ar. Rasyid	100.000.000
209	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja kegiatan BMS kepada DTA Bustanun Najah Desa Jatimulya Kec. Cidahu	DTA BUSTANUN NAJAH	50.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
210	SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Kuningan	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	148.240.200
211	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Mushola Pondok Pesantren Jabal Rohmah	Pondok Pesantren Jabal Rohmah	25.000.000
212	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Madrasah Diniyah Fisabilillah	Madrasah Diniyah Fisabilillah	25.000.000
213	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan DKM Masjid Nurul Iman	DKM Masjid Nurul Iman	25.000.000
214	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Hibah Kepada Muslimat Nahdatul Ulama Kuningan	Drs. Hj.Tuti Rysilawati	150.000.000
215	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada DPD BKPRMI Kuningan	Insan Nulyaman, M.Pd.I	50.000.000
216	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar bantuan hibah kepada Yayasan Al-Ihya Kuningan	Al Ihya Kuningan	50.000.000
217	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kuningan TA 2022	DPK KORPRI Kabupaten Kuningan	200.000.000
218	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Permohonan Pencairan Dana Hibah PWRI Kabupaten Kuningan tahun 2022	PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kabupaten Kuningan	100.000.000
219	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PP POLRI CAB.KAB.KUNINGAN TA.2022	PP POLRI Kab.Kuningan	25.000.000
220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA LMPI KAB.KUNINGAN TA.2022	LMPI KAB.KUNINGAN	25.000.000
221	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah kepada FKUB Kab.Kuningan TA.2022	FKUB KAB KUNINGAN	50.000.000
222	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Uang Kepada PP POLRI Kab.Kuningan Ta.2022	PP POLRI	100.000.000
223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah kepada FKUB Kab.Kuningan TA.2022	FKUB/KH ACHIDIN NOOR,MA	50.000.000
224	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Uang kepada Kodim 0615 Kuningan Tahun 2022	KODIM 0615 /DAVID NAINGGOLAN,ST	1.000.000.000
225	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Uang Kepada PP (PEMUDA PANCASILA) KAB.KUNINGAN TA.2022	PP (PEMUDA PANCASILA)	100.000.000
226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA YAYASAN JIWA MERAH PUTIH TA.2022	ELANG SATRIA TIMOER/YAYASAN JIWA MERAH PUTIH	25.000.000
227	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Uang Kepada DPC HIPAKAD KAB.KUNINGAN TA.2022	DPC HIPAKAD KAB.KUNINGAN	25.000.000
228	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH BERUPA UANG KEPDA ORMAS DPC PEPABRI KAB.KUNINGAN TA.2022	PEPABRI	25.000.000
229	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , SUBDENPOM III/3-6 KUNINGAN	SUBDENPOM III/3-6 KUNINGAN/YANTO A.USULU	125.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
230	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG KEPADA POLRES KAB.KUNINGAN	POLRES KUNINGAN	3.000.000.000
231	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG KEPADAPENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II KAB.KUNINGAN	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN KELAS II	700.000.000
232	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELANJA HIBAH UANG BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA RECLASSEERING TA.2022	RECLASSEERING	50.000.000
233	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	CV.EGYD	79.564.000
	TOTAL			65.028.910.200



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

Lampiran 7

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	KEPERLUAN	NILAI
1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	505.000.000
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	255.000.000
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengajuan GU ke 4	115.000.000
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Stimulan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan (Belanja Bantuan Sosial Uang) 3478 Orang Se - Kabupaten Kuningan Tahun 2022	1.739.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengajuan GU ke 8	37.500.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengajuan GU ke 11	10.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	GU KE 9	22.500.000
8	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Maret 2022	45.024.000
9	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Maret 2022	8.446.000
10	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Mei 2022	9.375.000
11	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu.	85.492.000
12	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Juli	22.512.000
13	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan sosial yang direncanakan kepada individu, Penyediaan Sandang	85.866.000
14	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Belanja Bantuan Sosial.	479.500.000
15	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat (Warungan) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	172.161.000
16	DINAS SOSIAL	Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu kegiatan Penyediaan Makanan	130.317.000
17	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat (Bibit Ternak Domba) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	119.520.000
18	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan Kepada Masyarakat.	159.760.000
19	DINAS SOSIAL	SPP GU September	25.338.000
20	DINAS SOSIAL	SPP GU September	40.000.000
21	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Desember	8.446.000
22	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Desember	45.024.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	NILAI
23	DINAS SOSIAL	SPP GU Bulan Desember	31.360.000
24	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Individu, Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	40.000.000
25	DINAS SOSIAL	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	40.000.000
26	DINAS SOSIAL	Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.750.000
27	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengadaan Bantuan Bahan Pangan untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kab. Kuningan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun 2022	92.712.000
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengajuan GU-1	12.000.000
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengajuan GU Ke - 4	50.000.000
30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengajuan GU Ke - 9	15.000.000
31	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan biaya pengobatan/perawatan untuk ODGJ di yayasan rumah antara graha berdaya	21.000.000
32	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Belanja Saprass Untuk Musola-Musola Se-Kabupaten Kuningan	100.000.000
33	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Pengobatan Bulan Maret	21.000.000
34	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan Hibah Bantuan Untuk Biaya Pengobatan Keg. Kesos	42.000.000
35	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan Hibah Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya Keg. Kesos	42.000.000
36	SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran Bantuan Pengobatan ODGJ Kepada Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya	21.000.000
37	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Biaya Pengobatan dan Perawatan Keg. Kesos	21.000.000
38	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Sarana Prasarana Tahap III	150.000.000
39	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Sarana dan Prasarana Kepada Mushola Se-Kabupaten Kuningan Tahap II	250.000.000
40	SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran Bantuan Beasiswa Bagi Siswa/Siswi SD s/d SMA Se-Kabupaten Kuningan	1.000.000.000
41	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Biaya Stimulan Operasional RT, RW, dan LPM Se-Kabupaten Kuningan	294.000.000
42	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Hibah Pengobatan Nama Terlampir Bulan Oktober	21.000.000
43	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Untuk Bantuan Pengobatan An. Meri Rita, dkk	21.000.000
44	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan Hibah Kepada Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya	21.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	NILAI
45	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Bantuan Pengobatan Bulan Juli	21.000.000
46	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar belanja bantuan sosial uang yang di rencanakan kepada individu	21.000.000
47	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Ke Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya	21.000.000
48	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Ke Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya Bulan Juli	21.000.000
49	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Pengobatan Kepada Mohamad Sai Dkk	21.000.000
50	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Hibah Untuk Pengobatan ODGJ Kepada Yayasan Rumah Antara Graya Berdaya	21.000.000
51	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Hibah Bantuan Stimulan Rutilahu Tahun Anggaran 2022	900.000.000
52	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Pengobatan An. Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya Bulan Nopember	30.000.000
53	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Pengobatan Asep Saepudin DKK Bulan Nopember	21.000.000
54	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Hibah Pengobatan (Nama Terlampir)	48.000.000
55	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Hibah Bantuan Pengobatan An. Rusman DKK (Nama Terlampir)	33.000.000
56	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Pengobatan Bulan Desember (Nama Terlampir)	48.000.000
57	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bantuan Hibah Untuk Pengobatan Bulan September	21.000.000
58	SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran Hibah Kepada Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya Bulan September	21.000.000
59	SEKRETARIAT DAERAH	Pencairan Bantuan Stimulan Rutilahu Bulan Desember	440.000.000
60	SEKRETARIAT DAERAH	Dibayar Bntuan Hibah Untuk ODGJ Kepada Yayasan Rumah Antara Graha Berdaya	21.000.000
TOTAL			8.154.603.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

Lampiran 8

REKAPITULASI BELANJA MODAL PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74.605.100.207
2	DINAS KESEHATAN	5.161.515.858
3	RSUD 45	9.948.266.235
4	RSUD LINGGAJATI	5.547.334.605
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	91.200.331.437
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.837.824.467
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	515.093.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	202.447.000
9	DINAS SOSIAL	204.782.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	177.500.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	314.848.704
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.003.705.750
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	816.659.803
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	109.877.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.631.344.580
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	515.668.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	79.370.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	256.532.000
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	26.600.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	523.440.940
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	81.450.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	2.217.481.020
24	SEKRETARIAT DPRD	145.093.943
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	252.610.000
26	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	805.418.980
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.113.068.300
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	696.455.999
29	INSPEKTORAT	292.117.150
30	KECAMATAN CILIMUS	42.400.000
31	KECAMATAN CIWARU	72.492.000
32	KECAMATAN DARMA	79.985.000
33	KECAMATAN GARAWANGI	39.200.000
34	KECAMATAN JALAKSANA	25.000.000
35	KECAMATAN KADUGEDE	20.400.000
36	KECAMATAN KARANGKANCANA	4.380.000
37	KECAMATAN KRAMATMULYA	40.000.000
38	KECAMATAN KUNINGAN	174.596.100



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	NILAI
39	KECAMATAN LEBAKWANGI	11.200.000
40	KECAMATAN LURAGUNG	63.413.000
41	KECAMATAN MALEBER	30.200.000
42	KECAMATAN MANDIRANCAN	35.153.000
43	KECAMATAN PANCALANG	34.000.000
44	KECAMATAN SINDANGAGUNG	42.800.000
45	KECAMATAN CIBEUREUM	7.613.000
46	KECAMATAN CIGUGUR	239.569.800
47	KECAMATAN CILEBAK	29.772.000
48	KECAMATAN CIMAHI	24.436.800
49	KECAMATAN CINIRU	45.824.000
50	KECAMATAN CIPICUNG	69.500.000
51	KECAMATAN HANTARA	44.250.000
52	KECAMATAN JAPARA	18.853.500
53	KECAMATAN KALIMANGGIS	16.000.000
54	KECAMATAN NUSAHERANG	10.000.000
55	KECAMATAN PASAWAHAN	22.650.000
56	KECAMATAN SELAJAMBE	46.032.000
57	KECAMATAN SUBANG	28.000.000
58	KECAMATAN CIAWIGEBANG	46.000.000
59	KECAMATAN CIBINGBIN	45.068.000
60	KECAMATAN CIDAHU	47.520.000
61	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	18.728.000
62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	74.960.271
	TOTAL	229.856.933.449



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 9

REKAP BELANJA BANTUAN KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari 2022	BPJS	83.696.250
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Januari 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.556.838.500
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Mei 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.582.435.500
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Pebruari 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.599.161.000
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Singkup Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Singkup Kec. Pasawahan	90.000.000
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Kaduela Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Kaduela Kec. Pasawahan	40.000.000
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei 2022	BPJS	84.107.100
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Pebruari dan Maret 2022	BPJS	167.495.500
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Cimara Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Cimara Kec. Pasawahan	35.000.000
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Paniis Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Paniis Kec. Pasawahan	180.000.000
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Padamatang Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Padamatang Kec. Pasawahan	40.000.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Ciwiru Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Ciwiru Kec. Pasawahan	35.000.000
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Cidahu Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Cidahu Kec. Pasawahan	35.000.000
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Maret 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.582.435.500
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan	40.000.000
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Cibuntu Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Cibuntu Kec. Pasawahan	35.000.000
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa: Kepada Desa Pasawahan Kec. Pasawahan atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Pasawahan Kec. Pasawahan	35.000.000
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Non SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan April 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	14.947.606.700
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni 2022	BPJS	84.147.600
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juli 2022	BPJS	84.072.800
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa : Kepada Desa Maniskidul Kec. Jalaksana atas dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air yang digunakan oleh Perusahaan Cirebon Tahun Anggaran 2022	Kepala Desa Maniskidul Kec. Jalaksana	75.000.000
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April 2022	BPJS	84.096.800
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Agustus 2022	BPJS	84.136.000
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Juli 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.585.757.500



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	KEPERLUAN	PENERIMA	NILAI
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Agustus 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.585.757.500
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Nopember 2022	BPJS	84.348.800
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Juni 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.585.757.500
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD-KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Non SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Oktober 2022	Kepala Desa Kedungarum Kec. Kuningan	13.151.086.300
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD-KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 361 Desa bulan Nopember 2022	Kepala Desa Kedungarum Kec. Kuningan	9.589.079.500
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desember 2022	BPJS	84.311.100
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan Desember 2022	Kepala Desa Kedungarum Kec. Kuningan	9.602.759.000
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD KHUSUS) dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebanyak 361 Desa Bulan September 2022	Kepala Desa Cibinuang Kec. Kuningan	9.585.757.500
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Oktober 2022	BPJS	84.288.050
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan September 2022	BPJS	84.220.750
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyeluran Dana Desa	Kepala Desa	315.201.708.000
TOTAL				440.805.060.750



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 10

RINCIAN PENGGUNAAN SILPA DAK DAN BANPROV 2022

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
1	02.10.04.27/LS/2022	04-Aug-22	DINSOS / CV. NARATHAS	130.317.000,00	Belanja Bansos
2	02.10.04.42/LS/2022	05-Aug-22	DISHUB / CV. NURI MEGA PERKASA	182.210.000,00	Belanja Barjas
3	02.10.04.43/LS/2022	05-Aug-22	DISHUB / PT. CULA MEGA ALBAROKAH	991.089.800,00	Belanja Barjas
4	02.10.04.24/LS/2022	05-Aug-22	BPBD / PT. SANGKAN PARK	80.000.000,00	Belanja Barjas
5	02.10.04.19/LS/2022	10-Aug-22	INSPEKTORAT / CV. SINAR FAJAR	142.117.150,00	Belanja Modal
6	02.10.04.49/LS/2022	11-Aug-22	DINKES / BPJS KESEHATAN	336.544.000,00	Belanja Barjas
7	02.10.04.183/LS/2022	11-Aug-22	DPKPP / CV. FORTUNA ABADI	45.021.450,00	Belanja Barjas
8	02.10.04.23/LS/2022	11-Aug-22	DISDUKCAPIL / PT. JASUINDO TIGA PERKASA	195.110.000,00	Belanja Barjas
9	02.10.04.138/LS/2022	11-Aug-22	DISDIKBUD / CV. TRISAKTI	174.458.950,00	Penyertaan Modal
10	02.10.04.76/LS/2022	11-Aug-22	BPKAD / CV. LANGKUY	159.662.400,00	Belanja Barjas
11	02.10.04.139/LS/2022	12-Aug-22	DISDIKBUD / CV. JALA YATRA	182.108.350,00	Belanja Modal
12	02.10.04.140/LS/2022	12-Aug-22	DISDIKBUD / CV. JALA YATRA	180.071.550,00	Belanja Modal
13	02.10.04.51/LS/2022	12-Aug-22	DPMD / CV. SINAR FAJAR	1.187.557.875,00	Belanja Barjas
14	02.10.04.192/LS/2022	15-Aug-22	DPKPP / KJJP KAMPANUS DAN REKAN	83.793.900,00	Belanja Barjas
15	02.10.04.50/LS/2022	15-Aug-22	DKPP / CV. ZIGMA IT CITY	169.548.204,00	Belanja Modal
16	02.10.04.77/LS/2022	16-Aug-22	DPUTR / PT. HAAKASTON	388.500.000,00	Belanja Modal
17	02.10.04.53/LS/2022	23-Aug-22	DPMD / CV. AMBALAT	488.824.575,00	Belanja Barjas
18	02.10.04.55/LS/2022	29-Aug-22	DPMD	1.310.968.000,00	Belanja Barjas
19	02.10.04.83/LS/2022	09-Sep-22	BPKAD / PT. TEJA BERLIAN	505.000.000,00	Belanja Modal
20	02.10.04.53/LS/2022	09-Sep-22	DISKOPDAGPERIN / CV. KARYA CIPTA PERSADA	142.302.000,00	Belanja Barjas
21	02.10.04.267/LS/2022	09-Sep-22	DPKPP / CV. SHAQUILA PUTRA KENCANA	92.042.650,00	Belanja Barjas
22	02.10.04.268/LS/2022	09-Sep-22	DPKPP / CV. KUDA MAS	91.959.050,00	Belanja Barjas
23	02.10.04.290/LS/2022	19-Sep-22	DPKPP / CV. MEGA KENCANA	91.826.050,00	Belanja Barjas
24	02.10.04.287/LS/2022	19-Sep-22	DPKPP / CV. SS ARSITEKTUR	186.201.900,00	Belanja Barjas
25	02.10.04.165/LS/2022	19-Sep-22	SETDA / TOKO SUMBER WARAS	55.000.000,00	Belanja Barjas
26	02.10.04.26/LS/2022	19-Sep-22	BKPSDM / CV. EVA CATERING	84.360.000,00	Belanja Barjas
27	02.10.04.66/LS/2022	19-Sep-22	DKPP / CV. MEGA KENCANA	21.650.100,00	Belanja Barjas
28	02.10.04.289/LS/2022	19-Sep-22	DPKPP / CV. HS PUTRI	68.583.350,00	Belanja Barjas
29	02.10.04.298/LS/2022	20-Sep-22	DPKPP / CV. TRI MITRA BAHARI	168.136.350,00	Belanja Barjas
30	02.10.04.299/LS/2022	20-Sep-22	DPKPP / CV. TRI MITRA BAHARI	139.026.800,00	Belanja Barjas
31	02.10.04.140/LS/2022	23-Sep-22	DINKES / BPJS KESEHATAN	213.304.000,00	Belanja Barjas
32	02.10.04.154/LS/2022	30-Sep-22	DISDIKBUD / PAUD MISBAHUL HUDA	100.000.000,00	Belanja Hibah
33	02.10.04.197/LS/2022	30-Sep-22	DPUTR / CV. FORTUNA ABADI	187.194.650,00	Belanja Barjas
34	02.10.04.32/LS/2022	30-Sep-22	DPPKB / TELKOMSEL	74.799.994,00	Belanja Barjas
35	02.10.04.41/LS/2022	30-Sep-22	DISKANAK / CV. LEBAK MAKMUR	187.700.000,00	Belanja Barjas
36	02.10.04.315/LS/2022	30-Sep-22	DPKPP / CV. IDAR BUANA	92.117.700,00	Belanja Barjas
37	02.10.04.203/LS/2022	04-Oct-22	DPUTR / CV. YUDISTIRA	232.237.200,00	Belanja Modal
38	02.10.04.67/LS/2022	04-Oct-22	DKPP / CV. GARDA KENCANA	89.775.950,00	Belanja Barjas



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
39	02.10.04.82/LS/2022	04-Oct-22	DKPP / CV. CIPANAS MULIA	180.252.050,00	Belanja Barjas
40	02.10.04.324/LS/2022	07-Oct-22	DPKPP / CV. TOPAS GEMILANG	186.377.650,00	Belanja Barjas
41	02.10.04.46/LS/2022	11-Oct-22	DISKANAK / CV. GRINA WINANGUN	90.040.000,00	Belanja Barjas
42	02.10.04.104/LS/2022	12-Oct-22	DKPP / CV. SEMBILAN BINTANG MANDIRI	90.112.250,00	Belanja Barjas
43	02.10.04.51/LS/2022	12-Oct-22	DISKANAK / CV. KAYANA RATU HARMONI	89.960.000,00	Belanja Barjas
44	02.10.04.56/LS/2022	12-Oct-22	DISHUB / PT. PERLENGKAPAN JALAN Indonesia	189.866.050,00	Belanja Modal
45	02.10.04.57/LS/2022	12-Oct-22	DISHUB / CV. DECOM 2000	123.995.880,00	Belanja Modal
46	02.10.04.329/LS/2022	13-Oct-22	DPKPP / CV. TRI MITRA BAHARI	45.017.650,00	Belanja Barjas
47	02.10.04.330/LS/2022	13-Oct-22	DPKPP / CV. TOPAS GEMILANG	364.075.150,00	Belanja Barjas
48	02.10.04.277/LS/2022	14-Oct-22	DPUTR / CV. TUNAS BANGUN JAYA	227.828.050,00	Belanja Modal
49	02.10.04.278/LS/2022	14-Oct-22	DPUTR / CV. FILOVA GRAHA KONTRUKSINDO	189.550.650,00	Belanja Modal
50	02.10.04.273/LS/2022	14-Oct-22	DPUTR / CV. PANDAWA LIMA KUNINGAN	135.632.450,00	Belanja Barjas
51	02.10.04.092/LS/2022	18-Oct-22	DISPORAPAR / KONI KAB. KUNINGAN	1.598.062.500,00	Belanja Hibah
52	02.10.04.56/LS/2022	18-Oct-22	DISKANAK / CV. ANTARA PUTRA	187.700.000,00	Belanja Barjas
53	3681/LS/2022	19-Oct-22	DISHUB / PT. PLN	940.646.324,00	Belanja Barjas
54	02.10.04.110/LS/2022	19-Oct-22	RSUD LINGGAJATI / PT. PARIT PADANG	169.404.225,00	Belanja Barjas
55	02.10.04.172/LS/2022	19-Oct-22	DINKES / BPJS KESEHATAN	219.419.200,00	Belanja Barjas
56	02.10.04.60/LS/2022	20-Oct-22	DISKANAK / CV. SAN PUTRA KENCANA	93.800.000,00	Belanja Barjas
57	02.10.04.61/LS/2022	20-Oct-22	DISKANAK / CV. HS PUTRI	93.800.000,00	Belanja Barjas
58	02.10.04.62/LS/2022	20-Oct-22	DISKANAK / CV. REMYANG SARI	89.920.000,00	Belanja Barjas
59	02.10.04.63/LS/2022	20-Oct-22	DISKANAK / CV. TRANS MEGA KUNINGAN	89.920.000,00	Belanja Barjas
60	02.10.04.59/LS/2022	20-Oct-22	DISKANAK / CV. ANTARA PUTRA	187.700.000,00	Belanja Barjas
61	02.10.04.290/LS/2022	20-Oct-22	DPUTR / CV. HS PUTRI	219.411.050,00	Belanja Modal
62	02.10.04.291/LS/2022	20-Oct-22	DPUTR / CV. IDEA PRATAMA	142.070.100,00	Belanja Modal
63	02.10.04.94/LS/2022	20-Oct-22	DISPORAPAR / CV. AMRU	165.617.300,00	Belanja Barjas
64	02.10.04.95/LS/2022	20-Oct-22	DISPORAPAR / CV. SURYA BERKAH UTAMA	38.274.750,00	Belanja Barjas
65	02.10.04.96/LS/2022	20-Oct-22	DISPORAPAR / CV. SURYA BERKAH UTAMA	78.476.400,00	Belanja Barjas
66	02.10.04.110/LS/2022	20-Oct-22	DKPP / CV. GARDA KENCANA	89.670.500,00	Belanja Barjas
67	02.10.04.301/LS/2022	21-Oct-22	DPUTR / CV. ALINDA CIPTA PERKASA	430.744.200,00	Belanja Modal
68	02.10.04.111/LS/2022	21-Oct-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MILLENNIUM PHARMACONT INTERNATIONAL	129.067.838,00	Belanja Barjas
69	02.10.04.337/LS/2022	24-Oct-22	DPKPP / CV. SETIA UTAMA	84.895.800,00	Belanja Barjas
70	02.10.04.313/LS/2022	24-Oct-22	DPUTR / CV. IWAN JAYA MAKMUR	186.999.900,00	Belanja Barjas
71	02.10.04.334/LS/2022	24-Oct-22	DPKPP / CV. KUDA MAS	92.110.100,00	Belanja Barjas
72	02.10.04.335/LS/2022	24-Oct-22	DPKPP / CV. KUDA MAS	92.121.500,00	Belanja Barjas
73	02.10.04.343/LS/2022	30-Oct-22	DPKPP / CV. SHAQUILA PUTRA KENCANA	139.203.500,00	Belanja Barjas
74	02.10.04.349/LS/2022	30-Oct-22	DPUTR / CV. SHAQUILA PUTRA KENCANA	185.250.000,00	Belanja Barjas
75	3947/LS/2022	03-Nov-22	BPKAD	9.589.079.500,00	Belanja Transfer



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
76	02.10.04.117/LS/2022	08-Nov-22	RSUD LINGGAJATI/ PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	36.010.842,00	Belanja Barjas
77	02.10.04.118/LS/2022	08-Nov-22	RSUD LINGGAJATI/ PT. MERAPI UTAMA PHARMA	56.463.007,00	Belanja Barjas
78	02.10.04.74/LS/2022	09-Nov-22	DISKANAK / CV. MULIA MAKMUR ABADI	93.750.000,00	Belanja Barjas
79	02.10.04.73/LS/2022	09-Nov-22	DISKANAK / CV. MULIA MAKMUR ABADI	93.750.000,00	Belanja Barjas
80	02.10.04.75/LS/2022	09-Nov-22	DISKANAK / CV. MULIA MAKMUR ABADI	93.750.000,00	Belanja Barjas
81	02.10.04.119/LS/2022	09-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRANING	83.345.424,00	Belanja Barjas
82	02.10.04.126/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA	192.782.778,00	Belanja Barjas
83	02.10.04.127/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. GEN SEKAR MEDIKA	63.887.030,00	Belanja Barjas
84	02.10.04.128/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. GEN SEKAR MEDIKA	112.190.721,00	Belanja Barjas
85	02.10.04.121/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. TUNAS BANGUN PRAKASA	67.549.500,00	Belanja Barjas
86	02.10.04.122/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. KIMIA FARMA TRANDING	44.866.863,00	Belanja Barjas
87	02.10.04.123/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MILENIUM PHARMACONT INTERNATIONAL	218.792.698,00	Belanja Barjas
88	02.10.04.124/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. AUTO KOOL PRIMA	56.666.488,00	Belanja Barjas
89	02.10.04.125/LS/2022	10-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. ARMALA PUTRA MEDICA	49.000.743,00	Belanja Barjas
90	02.10.04.400/LS/2022	10-Nov-22	DPUTR / CV. AMRU	90.516.000,00	Belanja Modal
91	02.10.04.48/LS/2022	10-Nov-22	SEKRET DPRD / CV. ADHI PRIMA SENTOSA	193.972.000,00	Belanja Barjas
92	02.10.04.169/LS/2022	10-Nov-22	DISDIKBUD / KAMMI DAERAH KUNINGAN	50.000.000,00	Belanja Hibah
93	02.10.04.402/LS/2022	10-Nov-22	DPUTR / CV. SURYA BERKAH UTAMA	458.232.320,00	Belanja Modal
94	02.10.04.46/LS/2022	10-Nov-22	DLH / CV. BARRA PRATAMA GROUP	133.686.850,00	Belanja Modal
95	02.10.04.49/LS/2022	10-Nov-22	DPMD / BPJS KESHATAN	337.395.200,00	Belanja Barjas
96	02.10.04.404/LS/2022	10-Nov-22	DPUTR / CV. HS PUTRI	188.975.900,00	Belanja Modal
97	02.10.04.405/LS/2022	10-Nov-22	DPUTR / CV. SHAQUILA PUTRA KENCANA	137.019.450,00	Belanja Modal
98	02.10.04.406/LS/2022	10-Nov-22	DPUTR / CV. N THREE JAYA MANDIRI	90.392.500,00	Belanja Modal
99	02.10.04.415/LS/2022	11-Nov-22	DPUTR / CV. REMAJA PUTRA	183.369.000,00	Belanja Modal
100	02.10.04.416/LS/2022	11-Nov-22	DPUTR / CV. KUDA MAS	87.976.650,00	Belanja Modal
101	02.10.04.80/LS/2022	11-Nov-22	DISKANAK / CV. DIERA JAYA ABADI	92.214.000,00	Belanja Barjas
102	02.10.04.48/LS/2022	11-Nov-22	DISKOMINFO / PT. SARANA SOLUSINDO CENDEKIA	69.264.000,00	Belanja Barjas
103	02.10.04.50/LS/2022	11-Nov-22	DISKOMINFO / PT. ANESIA DIGITAL SOLUTION	98.790.000,00	Belanja Barjas
104	02.10.04.78/LS/2022	11-Nov-22	DISKANAK / CV. LEBAK MAKMUR	93.875.000,00	Belanja Barjas



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
105	02.10.04.106/LS/2022	11-Nov-22	DISPORAPAR / CV. JALAYATRA	165.575.500,00	Belanja Barjas
106	02.10.04.129/LS/2022	11-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MUARA SAKTI	6.239.426,00	Belanja Barjas
107	02.10.04.130/LS/2022	11-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MEGA TAMA ADHA UTAMA	112.702.134,00	Belanja Barjas
108	02.10.04.131/LS/2022	11-Nov-22	DPUTR / CV. AMRU	89.872.850,00	Belanja Barjas
109	02.10.04.417/LS/2022	11-Nov-22	DPUTR / CV. WIJAYA BERSAMA	367.473.300,00	Belanja Modal
110	02.10.04.133/LS/2022	14-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MEGAH ALKESINDO	11.072.250,00	Belanja Barjas
111	02.10.04.134/LS/2022	14-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. SARANA MEGAH MEDILAB SEJAHTERA	54.716.550,00	Belanja Barjas
112	02.10.04.419/LS/2022	14-Nov-22	DPUTR / JAVA KONSUL UTAMA	94.583.000,00	Belanja Barjas
113	02.10.04.420/LS/2022	14-Nov-22	DPUTR / JAVA KONSUL UTAMA	94.500.960,00	Belanja Barjas
114	02.10.04.421/LS/2022	14-Nov-22	DPUTR / CV. KUDA MAS	179.001.850,00	Belanja Barjas
115	02.10.04.422/LS/2022	14-Nov-22	DPUTR / CV. BARRA PRATAMA GROUP	180.755.550,00	Belanja Modal
116	02.10.04.423/LS/2022	14-Nov-22	DPUTR / CV. MADALLE	138.802.600,00	Belanja Modal
117	02.10.04.63/LS/2022	15-Nov-22	DISKOPDAGPERIN / CV. ANUGERAH JAYA	1.842.917.846,00	Belanja Barjas
118	02.10.04.62/LS/2022	16-Nov-22	DISHUB / PT. PLN	969.536.442,00	Belanja Barjas
119	02.10.04.451/LS/2022	17-Nov-22	DPUTR / CV. KARYA INDAH MULIA	1.117.127.700,00	Belanja Modal
120	02.10.04.89/LS/2022	17-Nov-22	DISKANAK / CV. AMBALAT	180.000.000,00	Belanja Barjas
121	02.10.04.90/LS/2022	17-Nov-22	DISKANAK / CV. AMBALAT	90.100.000,00	Belanja Barjas
122	02.10.04.136/LS/2022	17-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / CV. MYNA ASIH	158.058.450,00	Belanja Barjas
123	02.10.04.137/LS/2022	17-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. INDOPTA KARYA	26.012.250,00	Belanja Barjas
124	02.10.04.140/LS/2022	17-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MEGATAMA ADHA UTAMA	112.702.134,00	Belanja Barjas
125	02.10.04.141/LS/2022	17-Nov-22	RSUD LINGGAJATI / PT. MEGATAMA ADHA UTAMA	33.925.519,00	Belanja Barjas
126	02.10.04.101/LS/2022	17-Nov-22	BPKAD / PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK	507.400.000,00	Belanja Modal
127	02.10.04.64/LS/2022	17-Nov-22	DISKOPDAGPERIN / CV. PUTRA BAKOMINDO	94.821.000,00	Belanja Barjas
128	02.10.04.457/LS/2022	22-Nov-22	DPUTR / CV. ATHARIEZZ	86.574.450,00	Belanja Barjas
129	02.10.04.346/LS/2022	22-Nov-22	DPKPP / CV. SS ARSITEKTUR	217.588.950,00	Belanja Barjas
130	02.10.04.70/LS/2022	22-Nov-22	DISKOPDAGPRIN / CV. ANUGERAH PRATAMA	472.625.000,00	Belanja Barjas
131	02.10.04.121/LS/2022	22-Nov-22	DISPORAPAR / CV. ELANG GROUP	94.772.950,00	Belanja Barjas
132	02.10.04.41/LS/2022	22-Nov-22	BAPPENDA	144.959.000,00	Belanja Barjas
133	02.10.04.459/LS/2022	24-Nov-22	DPUTR / CV. TRESNA BAHARI	441.288.300,00	Belanja Modal
134	02.10.04.168/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN SUKA MAKMUR	100.000.000,00	Belanja Hibah
135	02.10.04.169/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN PESAR MAJU	100.000.000,00	Belanja Hibah
136	02.10.04.170/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN TUMENGGUNG	100.000.000,00	Belanja Hibah
137	02.10.04.171/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN TEGAL WETAN	100.000.000,00	Belanja Hibah
138	02.10.04.172/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN JAYANTI	100.000.000,00	Belanja Hibah
139	02.10.04.173/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN SABUK HALU II	100.000.000,00	Belanja Hibah



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
140	02.10.04.174/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN BINA KARYA II	100.000.000,00	Belanja Hibah
141	02.10.04.172/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN CIPARI 2	100.000.000,00	Belanja Hibah
142	02.10.04.174/LS/2022	25-Nov-22	DKPP / POKTAN MULYA TANI	100.000.000,00	Belanja Hibah
143	02.10.04.178/LS/2022	25-Nov-22	DISPORAPAR/ ISMANTO, S.Pd., M.Pd.	250.000.000,00	Belanja Barjas
144	02.10.04.354/LS/2022	28-Nov-22	DPKPP / CV. LIMAR PELANGI	92.312.450,00	Belanja Barjas
145	02.10.04.464/LS/2022	28-Nov-22	DPUTR / CV. SS ARSITEKTUR	271.158.500,00	Belanja Barjas
146	02.10.04.216/LS/2022	29-Nov-22	SETDA / CV. EKA LINGGA PUTRA	148.070.000,00	Belanja Barjas
147	02.10.04.109/LS/2022	30-Nov-22	BPKAD / PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK	1.883.200.000,00	Belanja Modal
148	02.10.04.74/LS/2022	30-Nov-22	DISKOPDAKPERIN / CV. SAN PUTRA KENCANA	94.594.000,00	Belanja Barjas
149	02.10.04.95/LS/2022	30-Nov-22	DISKANAK / CV. GEMPAR GEMILANG	79.250.000,00	Belanja Barjas
150	02.10.04.94/LS/2022	30-Nov-22	DISKANAK / CV. ADIKARYA PRATAMA	93.700.000,00	Belanja Barjas
151	02.10.04.469/LS/2022	30-Nov-22	DPUTR / CV. SHAQUILA PUTRA KENCANA	90.211.050,00	Belanja Barjas
152	02.10.04.93/LS/2022	30-Nov-22	DISKANAK / CV. MEGA KENCANA	131.390.000,00	Belanja Barjas
153	02.10.04.92/LS/2022	30-Nov-22	DPMD / CV. MULYA JAYA MAKMUR	89.982.000,00	Belanja Barjas
154	02.10.04.93/LS/2022	30-Nov-22	DPMD / CV. ADIKARYA PRATAMA	44.721.900,00	Belanja Barjas
155	02.10.04.472/LS/2022	01-Dec-22	DPUTR	407.707.140,00	Belanja Pegawai
156	02.10.04.04/LS/2022	01-Dec-22	BPKAD / PAM TIRTA KAMUNING	3.000.000.000,00	Penyertaan Modal
157	02.10.04.471/LS/2022	01-Dec-22	DPUTR / CV. AMRU	470.698.800,00	Belanja Modal
158	02.10.04.113/LS/2022	02-Dec-22	BPKAD / ADD	9.602.759.000,00	Belanja Transfer
159	02.10.04.127/LS/2022	02-Dec-22	DISPORAPAR / CV. KUDA MAS	81.040.700,00	Belanja Barjas
160	02.10.04.68/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / UD. KIKI RISMANAN	98.100.000,00	Belanja Subsidi
161	02.10.04.69/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / CV. ERINA MANDIRI	80.200.000,00	Belanja Subsidi
162	02.10.04.70/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / CV. ERINA MANDIRI	265.620.000,00	Belanja Subsidi
163	02.10.04.71/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / PT. MAJAPUTRA MUSTIKA	270.300.000,00	Belanja Subsidi
164	02.10.04.72/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / PT. PUSPITA PUTRA	269.700.000,00	Belanja Subsidi
165	02.10.04.73/LS/2022	02-Dec-22	DISHUB / CV. PUTRA ERINA SEJAHTERA	322.080.000,00	Belanja Subsidi
166	02.10.04.223/LS/2022	02-Dec-22	SETDA	593.425.500,00	Belanja Pegawai
167	02.10.04.28/LS/2022	02-Dec-22	BAPPEDA	186.664.470,00	Belanja Pegawai
168	02.10.04.45/LS/2022	02-Dec-22	BAPPENDA / PT. JAYAMANDIRI GEMASEJATI	459.544.880,00	Belanja Modal
169	02.10.04.473/LS/2022	02-Dec-22	DPUTR / CV. PRIMA KARYA	268.448.150,00	Belanja Modal
170	02.10.04.474/LS/2022	02-Dec-22	DPUTR / CV. MUSTARI KARYA	235.839.600,00	Belanja Modal
171	02.10.04.475/LS/2022	02-Dec-22	DPUTR / CIGULA TIRTA BERKAH	250.000.000,00	Belanja Barjas
172	02.10.04.98/LS/2022	02-Dec-22	DISKANAK / CV. EKA LINGGA PUTRA	181.892.000,00	Belanja Barjas
173	02.10.04.99/LS/2022	02-Dec-22	DISKANAK / CV. N THREE JAYA MANDIRI	93.625.000,00	Belanja Barjas
174	02.10.04.56/LS/2022	05-Dec-22	KESBANGPOL	89.959.268,00	Belanja Pegawai
175	02.10.04.35/LS/2022	06-Dec-22	DPMPSTP	131.534.650,00	Belanja Pegawai
176	02.10.04.77/LS/2022	06-Dec-22	DISHUB / CV.KUDA MAS	149.036.000,00	Belanja Barjas
177	02.10.04.186/LS/2022	06-Dec-22	DKPP	506.540.500,00	Belanja Pegawai
178	02.10.04.187/LS/2022	06-Dec-22	DKPP / CV. IWAN JAYA MAKMUR	307.468.339,00	Belanja Barjas



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
179	02.10.04.78/LS/2022	08-Dec-22	DISHUB / PT. CULA MEGA BAROKAH	236.610.819,00	Belanja Barjas
180	02.10.04.478/LS/2022	08-Dec-22	DPUTR / CV. TRI MUSTIKA	184.736.050,00	Belanja Modal
181	02.10.04.479/LS/2022	08-Dec-22	DPUTR / CV. AMRU	184.468.150,00	Belanja Modal
182	02.10.04.480/LS/2022	08-Dec-22	DPUTR / CV. ADIEN FARM	91.404.250,00	Belanja Modal
183	02.10.04.360/LS/2022	08-Dec-22	DPKPP / CV. AMRU	92.179.450,00	Belanja Barjas
184	02.10.04.115/LS/2022	08-Dec-22	BPKAD / CV. TENJO LAUT	74.907.500,00	Belanja Barjas
185	02.10.04.116/LS/2022	08-Dec-22	BPKAD / CV. CIPTA INTI MEDIA	73.379.000,00	Belanja Barjas
186	02.10.04.102/LS/2022	08-Dec-22	DISKANAK / CV. MULYA JAYA MANDIRI	180.200.000,00	Belanja Barjas
187	02.10.04.37/LS/2022	12-Dec-22	DKAP	94.900.000,00	Belanja Pegawai
188	02.10.04.48/LS/2022	14-Dec-22	BAPPENDA / PT. JAYAMANDIRI GEMASEJATI	1.985.170.000,00	Belanja Barjas
189	02.10.04.482/LS/2022	14-Dec-22	DPUTR / CV. TUNAS BANGUN JAYA	273.749.150,00	Belanja Modal
190	02.10.04.192/LS/2022	14-Dec-22	DKPP / CV. BERKAH FAJAR UTAMA	89.910.000,00	Belanja Barjas
191	02.10.04.79/LS/2022	15-Dec-22	DISHUB / PT.PLN	963.882.027,00	Belanja Barjas
192	02.10.04.486/LS/2022	15-Dec-22	DPUTR / CV. TENJO LAUT	188.770.700,00	Belanja Modal
193	02.10.04.485/LS/2022	15-Dec-22	DPUTR / CV. TENJO LAUT	48.895.000,00	Belanja Modal
194	02.10.04.487/LS/2022	15-Dec-22	DPUTR / CV. HS PUTRI	949.109.850,00	Belanja Modal
195	02.10.04.486/LS/2022	15-Dec-22	DPUTR / CV. SAQUILA PUTRA KENCANA	265.636.150,00	Belanja Modal
196	02.10.04.56/LS/2022	20-Dec-22	DISKOMINFO / PT. HIPERNET INDODATA	150.000.000,00	Belanja Barjas
197	02.10.04.57/LS/2022	20-Dec-22	DISKOMINFO / PT. INTERNET KELUARGA INDONESIA	34.452.000,00	Belanja Barjas
198	02.10.04.58/LS/2022	20-Dec-22	DISKOMINFO / PT. INTERNET KELUARGA INDONESIA	49.417.500,00	Belanja Barjas
199	02.10.04.490/LS/2022	20-Dec-22	DPUTR / CV. KUDA MAS	131.730.800,00	Belanja Modal
200	02.10.04.80/LS/2022	20-Dec-22	DISKOPDAGPERIN / CV. BAGINDA UTAMA	94.687.000,00	Belanja Barjas
201	02.10.04.81/LS/2022	20-Dec-22	DISKOPDAGPERIN / CV. BAGINDA UTAMA	182.095.000,00	Belanja Barjas
202	02.10.04.377/LS/2022	20-Dec-22	DPKPP / CV. JEMBAR JAYA UTAMA	186.447.000,00	Belanja Barjas
203	02.10.04.380/LS/2022	22-Dec-22	DPKPP / CV. KIAN JAYA PRATAMA	92.294.400,00	Belanja Barjas
204	02.10.04.389/LS/2022	26-Dec-22	DPKPP / HJ.AI DIANA	1.351.914.000,00	Belanja Modal
205	02.10.04.390/LS/2022	26-Dec-22	DPKPP / RAHMAN SANTOSO	63.683.000,00	Belanja Modal
206	02.10.04.391/LS/2022	26-Dec-22	DPKPP / DONI NURISMAN DKK	13.465.591.000,00	Belanja Modal
207	02.10.04.187/LS/2022	27-Dec-22	DISDIKBUD / CV.MEGA KENCANA	182.004.800,00	Belanja Modal
208	02.10.04.163/LS/2022	27-Dec-22	RSUD LINGGAJATI / PT.MEGATAMA ADHA UTAMA	112.702.134,00	Belanja Barjas
209	02.10.04.164/LS/2022	27-Dec-22	RSUD LINGGAJATI / PT.MEGATAMA ADHA UTAMA	112.702.134,00	Belanja Barjas
210	02.10.04.165/LS/2022	27-Dec-22	RSUD LINGGAJATI / PT.MEGATAMA ADHA UTAMA	33.952.522,00	Belanja Barjas
211	02.10.04.526/LS/2022	27-Dec-22	DPUTR / PT.DHIKA ARCHITAMA	120.000.000,00	Belanja Barjas
212	5079/LS/2022	29-Dec-22	DPUTR / CV. FORTUNA ABADI	185.801.000,00	Belanja Barjas
213	5092/LS/2022	29-Dec-22	DPUTR / CV. MANDE JAYA	188.847.650,00	Belanja Barjas
214	5093/LS/2022	29-Dec-22	DPUTR / CV. CIPTA MANDIRI	185.661.350,00	Belanja Barjas



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	NO SP2D	TANGGAL SP2D	PENERIMA	JUMLAH SP2D	KETERANGAN
215	02.10.04.34/LS/2022	30-Dec-22	DISDUKCAPIL / PT. TRIKESINDO MANDIRI SENTOSA	604.975.500,00	Belanja Barjas
216	02.10.04.272/LS/2022	30-Dec-22	SETDA / RUTILAHU	440.000.000,00	Belanja Hibah
217	02.10.04.549/LS/2022	30-Dec-22	DPUTR / CV.GLORIA	182.780.950,00	Belanja Barjas
218	02.10.04.191/LS/2022	30-Dec-22	DISDIKBUD / CV.HS PUTRI	181.773.000,00	Belanja Barjas
219	02.10.04.167/LS/2022	30-Dec-22	RSUD LINGGAJATI / PT.ADVANCE MEDICARE	749.913.027,00	Belanja Modal
220	5126/LS/2022	30-Dec-22	DPUTR / CV.PRATAMA SAKTI INTERNUSA	303.906.560,00	Belanja Modal
221	5119/LS/2022	30-Dec-22	DPUTR / CV.JALAYATRA	451.044.800,00	Belanja Modal
222	02.10.04.554/LS/2022	30-Dec-22	DPUTR / CV.AMRU	183.016.550,00	Belanja Modal
223	02.10.04.555/LS/2022	30-Dec-22	DPUTR / CV.CAKRA BUANA MANDIRI	264.092.400,00	Belanja Modal
JUMLAH				86.905.552.460,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 11

REKAP KAS DI BEDAHARA JKN PER UPTD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	UPTD	KAS DI JKN
1	Ciawigebang	60.383.409
2	Cibeureum	38.945.002
3	Cibingbin	27.916.759
4	Cidahu	9.047.925
5	Cigandamekar	78.446.618
6	Cihaur	17.213.681
7	Cilebak	25.770.464
8	Cilimus	33.962.954
9	Cimahi	122.518.934
10	Ciniru	27.860.284
11	Cipicung	44.880.715
12	Ciwaru	60.200.795
13	Darma	131.662.554
14	Garawangi	91.731.665
15	Hantara	10.281.508
16	Jalaksana	26.489.593
17	Japara	15.162.331
18	Kadugede	18.899.356
19	Kalimanggis	5.801.694
20	Karangkencana	44.304.415
21	Kramatmulya	44.699.302
22	Kuningan	112.661.811
23	Lamepayung	46.995.982
24	Linggarjati	1.466.474
25	Luragung	138.438.392
26	Maleber	93.598.116
27	Mandirancan	8.768.188
28	Manggari	14.244.303
29	Mekarwangi	85.323.983
30	Nusaherang	52.433.323
31	Pancalang	8.744.394
32	Pasawahan	35.999.008
33	Selajambe	21.880.966
34	Sindangagung	116.444.621
35	Subang	5.120.750
36	Sukamulya	106.182.516
37	Windusengkahan	8.136.481
Jumlah		1.792.619.266
Kas Lainnya di FKTP Cigandamekar		62.500



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 12

REKAP PENYISIHAN PIUTANG

(Dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
A	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH NON PBB				
I	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Pajak Hotel				
	- Tahun 2014	8.915.350,00	-		8.915.350,00
	- Tahun 2015	37.852.500,00	-		37.852.500,00
	- Tahun 2016	10.620.750,00	10.620.750,00		21.241.500,00
	- Tahun 2017	2.169.000,00	-		2.169.000,00
	- Tahun 2020	229.000,00	-	39.000,00	190.000,00
	- Tahun 2021	51.307,50	31.192,50		82.500,00
	- Tahun 2022	-	175.187,50		175.187,50
	Jumlah	59.837.907,50	10.827.130,00	39.000,00	70.626.037,50
2	Pajak Restoran				-
	- Tahun 2014	14.744.004,00	-	-	14.744.004,00
	- Tahun 2015	20.075.000,00	-	-	20.075.000,00
	- Tahun 2016	26.390.193,00	26.390.193,00	-	52.780.386,00
	- Tahun 2017	472.727,50	-	-	472.727,50
	- Tahun 2018	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00
	- Tahun 2019	5.418.410,00	-	-	5.418.410,00
	- Tahun 2020	2.982.058,10		269.106,40	2.712.951,70
	- Tahun 2021	482.939,66	3.514.459,34	-	3.997.399,00
	- Tahun 2022	-	865.629,78	-	865.629,78
	Jumlah	71.600.332,26	30.770.282,12	269.106,40	102.101.507,98
3	Pajak Hiburan				-
	- Tahun 2014	8.861.970,00	-	-	8.861.970,00
	- Tahun 2015	74.401.550,00	-	-	74.401.550,00
	- Tahun 2016	26.516.745,00	26.516.745,00	-	53.033.490,00
	- Tahun 2017	9.254.800,00	-	-	9.254.800,00
	- Tahun 2019	2.150.032,50	-	-	2.150.032,50
	- Tahun 2020	940.002,50	-	-	940.002,50
	- Tahun 2021	153.803,23	1.633.547,28		1.787.350,50
	- Tahun 2022	-	253.702,40		253.702,40
	Jumlah	122.278.903,23	28.403.994,68	-	150.682.897,90
4	Pajak Reklame				-
	- Tahun 2014	18.201.194,00	-	-	18.201.194,00
	- Tahun 2015	97.739.183,00	-	2.492.100,00	95.247.083,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	- Tahun 2016	66.937.822,50	66.937.822,50	-	133.875.645,00
	- Tahun 2017	11.955.638,50	-	-	11.955.638,50
	- Tahun 2018	2.670.473,50	-	-	2.670.473,50
	- Tahun 2020	745.876,80	-	-	745.876,80
	- Tahun 2021	60.552,50	617.846,51		678.399,00
	- Tahun 2022	-	1.231.128,10		1.231.128,10
	Jumlah	198.310.740,80	68.786.797,10	2.492.100,00	264.605.437,90
5	Pajak Penerangan Jalan				-
	- Tahun 2021	10.182.580,29	-	10.182.580,29	-
	- Tahun 2022	-	12.129.951,49	-	12.129.951,49
	Jumlah	10.182.580,29	12.129.951,49	10.182.580,29	12.129.951,49
6	Pajak Parkir				-
	- Tahun 2014	3.455.000,00	-	-	3.455.000,00
	- Tahun 2015	504.000,00	-	-	504.000,00
	- Tahun 2016	3.409.050,00	3.409.050,00	-	6.818.100,00
	- Tahun 2018	160.500,00	-	-	160.500,00
	- Tahun 2019	3.053.250,00	-	-	3.053.250,00
	- Tahun 2020	547.800,00		169.800,00	378.000,00
	- Tahun 2021	53.223,00	124.797,00		178.020,00
	- Tahun 2022	-	49.563,00		49.563,00
	Jumlah	11.182.823,00	3.583.410,00	169.800,00	14.596.433,00
7	Pajak Air Bawah Tanah				-
	- Tahun 2014	549.523,00	-	-	549.523,00
	- Tahun 2015	1.084.008,00	-	-	1.084.008,00
	- Tahun 2016	962.929,00	962.929,00	-	1.925.858,00
	- Tahun 2017	616.000,00	-	-	616.000,00
	- Tahun 2018	538.998,72	1,28	-	539.000,00
	- Tahun 2021	1.527,41	-	1.527,41	-
	- Tahun 2022	-	25.881,96	-	25.881,96
	Jumlah	3.752.986,13	988.812,24	1.527,41	4.740.270,96
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				-
	- Tahun 2015	93.965.960,00	-	-	93.965.960,00
	- Tahun 2016	355.040.000,00	355.040.000,00	-	710.080.000,00
	- Tahun 2018	74.937.000,00	-	-	74.937.000,00
	- Tahun 2020	775.200,00	-	-	775.200,00
	Jumlah	524.718.160,00	355.040.000,00	-	879.758.160,00
	JUMLAH PENYISIHAN PAJAK DAERAH	1.001.864.433,20	510.530.377,62	13.154.114,10	1.499.240.696,72
			-		



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
B	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan				
a	Dinas Kesehatan				
	Piutang BPJS				-
	- Tahun 2022	-	1.541.160,13	-	1.541.160,13
	Jumlah	-	1.541.160,13	-	1.541.160,13
b	RSUD Linggajati				
	Piutang BPJS				-
	- Tahun 2022	-	4.520.893,07	-	4.520.893,07
	Jumlah	-	4.520.893,07	-	4.520.893,07
	Piutang Umum				
	- Tahun 2019	-	12.079.203,00	-	12.079.203,00
	- Tahun 2020	23.368.031,90	-	9.518.812,50	13.849.219,40
	- Tahun 2021	959.826,25	8.844.278,06		9.804.104,30
	- Tahun 2022	-	344.098,68		344.098,68
	Jumlah	24.327.858,15	21.267.579,73	9.518.812,50	36.076.625,38
	Piutang Jamkesda				
	- Tahun 2018	59.215.497,00	-	-	59.215.497,00
	- Tahun 2019	67.010.612,00	-	-	67.010.612,00
	- Tahun 2021		4.679.882,00		4.679.882,00
	- Tahun 2022	-	2.086.335,01	-	2.086.335,01
	Jumlah	126.226.109,00	6.766.217,01	-	132.992.326,01
	Piutang Jasaraharja				
	- Tahun 2020	3.245.074,70	-	-	3.245.074,70
	- Tahun 2021	872.772,28	16.582.673,32	-	17.455.445,60
	- Tahun 2022	-	325.088,47	-	325.088,47
	Jumlah	4.117.846,98	16.907.761,79	-	21.025.608,77
	JUMLAH PEYISIHAN PIUTANG RET PEL KESEHATAN (RSUD)	154.671.814,13	49.462.451,60	9.518.812,50	194.615.453,22
	JUMLAH PEYISIHAN PIUTANG RET PEL KESEHATAN (PEMDA)	28.445.705,13	42.696.234,59	9.518.812,50	61.623.127,22
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Sewa Tanah				
	- Tahun 2011	576.250,00	-	-	576.250,00
	- Tahun 2012	1.070.000,00	-	-	1.070.000,00
	- Tahun 2013	480.000,00	-	-	480.000,00
	- Tahun 2014	499.578,00	-	-	499.578,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	- Tahun 2015	18.493.895,00	-	-	18.493.895,00
	- Tahun 2016	2.578.125,00	2.578.125,00	-	5.156.250,00
	- Tahun 2017	480.000,00	-	-	480.000,00
	- Tahun 2020	2.625,00	-	2.625,00	-
	- Tahun 2021	78.806,92	-	78.806,92	-
	- Tahun 2022	-	409.167,62	-	409.167,62
	Jumlah	24.259.279,92	2.987.292,62	81.431,92	27.165.140,62
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	Tahun 2022	-	42.480,00	-	42.480,00
	Jumlah	-	42.480,00	-	42.480,00
4	Retribusi Sewa Pertokoan Siliwangi Barat				
	Tahun 2021	750.800,00	-	750.800,00	-
	Tahun 2022	-	337.500,00	-	337.500,00
	Jumlah	750.800,00	337.500,00	750.800,00	337.500,00
5	Retribusi Sewa Kendaraan (DPUTR)				
	Tahun 2022	-	56.300,00	-	56.300,00
	Jumlah	-	56.300,00	-	56.300,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	53.455.785,05	47.660.967,33	10.351.044,42	90.765.707,96
		-			
C	PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
I	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH				
	- Tahun 2013	12.051.708,00	-	-	12.051.708,00
	- Tahun 2014	80.711.629,00	-	2.530.401,00	78.181.228,00
	- Tahun 2015	32.948.196,00	-	487.980,00	32.460.216,00
	- Tahun 2016	56.352.954,00	56.352.954,00	-	112.705.908,00
	- Tahun 2017	32.182,00	-	-	32.182,00
	Jumlah	182.096.669,00	56.352.954,00	3.018.381,00	235.431.242,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	182.096.669,00	56.352.954,00	3.018.381,00	235.431.242,00
2	PIUTANG DENDA RETRIBUSI DAERAH				
	- Tahun 2013	547.606,00	-	-	547.606,00
	- Tahun 2015	2.222.418,00	-	-	2.222.418,00
	- Tahun 2016	2.016.716,00	2.016.716,00	-	4.033.432,00
	Jumlah	4.786.740,00	2.016.716,00	-	6.803.456,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG DENDA	4.786.740,00	2.016.716,00	-	6.803.456,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	RETRIBUSI DAERAH				
3	KOMPENSASI PEMANFAATAN SDA				
	a. PT. Pertamina Cirebon				
	- Tahun 2021	112.197,20		112.197,20	-
	- Tahun 2022	-	9.594,42	-	9.594,42
	Jumlah	112.197,20	9.594,42	112.197,20	9.594,42
	b. Pemerintah Kabupaten Cirebon				
	- Tahun 2021	464.910,60		464.910,60	-
	- Tahun 2022	-	6.190.069,28		6.190.069,28
	Jumlah	464.910,60	6.190.069,28	464.910,60	6.190.069,28
	c. Pemerintah Kota Cirebon				
	- Tahun 2021	6.181.405,75	-	6.181.405,75	-
	- Tahun 2022	-	1.148.656,25	-	1.148.656,25
	Jumlah	6.181.405,75	1.148.656,25	6.181.405,75	1.148.656,25
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KOMPENSASI SDA	6.758.513,55	7.348.319,95	6.758.513,55	7.348.319,95
II	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1	Piutang PT. Taspen				
	- Tahun 2020	225.291,30	-	-	225.291,30
	Jumlah	225.291,30	-	-	225.291,30
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PT.TASPEN	225.291,30	-	-	225.291,30
2	Piutang TP/ TGR				
	- Tahun 2009	10.665.200,00	-	10.665.200,00	-
	- Tahun 2010	136.100.000,00	-	136.100.000,00	-
	- Tahun 2014	7.215.625,00	-	7.215.625,00	-
	-Tahun 2017	12.250.000,00	-	12.250.000,00	-
	-Tahun 2019	180.647.234,09	-	180.647.234,09	-
1	DEDE SUTARDI, S.IP (lunas-2022)/ Tahun 2018		-		-
2	Drs. SUNARDI, MM/ Tahun 2021		4.680.000,00		4.680.000,00
3	DJUANDA / Tahun 2018		25.000.000,00		25.000.000,00
4	DUDIANA, S.IP/ Tahun 2021		3.660.000,00		3.660.000,00
5	WAWAN SUPMAR HADIWIJAYA/ Tahun 2021		611.562,50		611.562,50
6	Drs. JAJA MOHAMAD PAOJAN/ Tahun 2018		12.250.000,00		12.250.000,00
7	YAYAN JUNIANDRANI, SE., ST., M.Si/ tahun 2021		17.014.723,41		17.014.723,41



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
8	DEDI FRISTIADI, S.H./ tahun 2022		3.184,50		3.184,50
9	DUDUNG ABDUROHMAN/ tahun 2022		567.252,50		567.252,50
10	TOTO SAPTORI/ tahun 2022		97.901,00		97.901,00
11	Anugerah Jaya/ tahun 2021		1.899.999,97		1.899.999,97
12	Cahaya Fajar Utama/ Tahun 2022		85.066,73		85.066,73
13	Putri Jaya/ Tahun 2022		25.396,72		25.396,72
14	Surya Berkah Utama/ Tahun 2022		67.863,11		67.863,11
15	Dian Varista/ Tahun 2022		60.383,68		60.383,68
16	Limar Pelangi/ Tahun 2022		140.053,72		140.053,72
17	Kelompok Tani Mekar Saluyu/ Tahun 2022		95.860,71		95.860,71
18	Kelompok Tani Rahayu/ Tahun 2022		213.234,61		213.234,61
19	Kuda Mas/ Tahun 2022		55.559,00		55.559,00
20	Vidya Karya/ Tahun 2022		55.000,00		55.000,00
	Jumlah	346.878.059,09	66.583.042,16	346.878.059,09	66.583.042,16
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TP/ TGR	346.878.059,09	66.583.042,16	346.878.059,09	66.583.042,16
					-
III	RSUD 45 KUNINGAN				
1	Piutang BLUD				
	a. Piutang Pasien Umum/ Individual				
	- Tahun 2007		50.786.787,00		50.786.787,00
	- Tahun 2008		34.798.264,00		34.798.264,00
	- Tahun 2009		27.047.577,00		27.047.577,00
	- Tahun 2010		199.115.566,00		199.115.566,00
	- Tahun 2011		318.291.379,00		318.291.379,00
	- Tahun 2012		300.893.714,00		300.893.714,00
	- Tahun 2013		188.630.648,00		188.630.648,00
	- Tahun 2014		168.270.440,00		168.270.440,00
	- Tahun 2015		323.069.583,00		323.069.583,00
	- Tahun 2016		543.557.204,00		543.557.204,00
	- Tahun 2017		130.764.219,50		130.764.219,50
	- Tahun 2018		120.343.303,50		120.343.303,50
	- Tahun 2019		189.510.792,00		189.510.792,00
	- Tahun 2020	328.412.311,64	-	309.461.232,44	18.951.079,20
	- Tahun 2021	873.723,85	16.600.753,06	-	17.474.476,90
	- Tahun 2022	-	1.454.749,16	-	1.454.749,16
	Jumlah	329.286.035,49	2.613.134.979,21	309.461.232,44	2.632.959.782,26
	b. Piutang Asuransi Kesehatan Lainnya				
	- Tahun 2013	-	16.936.331,00		16.936.331,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	- Tahun 2014	-	182.523,00		182.523,00
	- Tahun 2021		448.668.832,20		448.668.832,20
	- Tahun 2022		10.815.337,28		10.815.337,28
	Jumlah	-	476.603.023,48	-	476.603.023,48
	c. Piutang Asuransi Program Pemerintah - Jamkesda				
	- Tahun 2018	-	194.115.585,50	-	194.115.585,50
	- Tahun 2019	-	122.453.683,50	-	122.453.683,50
	- Tahun 2020	-	-	-	-
	- Tahun 2021	22.519.035,88		22.519.035,88	-
	- Tahun 2022	-	7.369.594,26		7.369.594,26
	Jumlah	22.519.035,88	323.938.863,26	22.519.035,88	323.938.863,26
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD	329.286.035,49	3.089.738.002,69	309.461.232,44	3.109.562.805,73
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH	870.031.308,42	3.222.039.034,80	666.116.186,08	3.425.954.157,14
		-			
D	PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA				
I	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
2	Kurang Setor Kontribusi Pembangunan Pasar Baru				
	- Tahun 2014	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00
	Jumlah	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PEND LAINNYA	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00
II	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - BPKAD				
1	Piutang Transfer Pusat - Dana Perimbangan				
	- Tahun 2016	1.799.196.233,50	-	1.799.196.233,50	-
	- Tahun 2020	1.305.401,60	-	1.305.401,60	-
	- Tahun 2021	2.210.794,13	-	2.210.794,13	-
	Jumlah	1.802.712.429,23	-	1.802.712.429,23	-
	Piutang Transfer Daerah-Provinsi				
	- Tahun 2021	25.108.159,05	-	25.108.159,05	-
	- Tahun 2022	-	-	-	-
	Jumlah	25.108.159,05	-	25.108.159,05	-
	JUMLAH PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH LAINNYA	1.827.820.588,28	-	1.827.820.588,28	-
	JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN	2.066.863.588,28	-	1.827.820.588,28	239.043.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	JENIS PIUTANG DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	LAINNYA				
		-			
E	PENYISIHAN PIUTANG PBB				
I	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Pajak Bumi dan Bangunan				-
	- Tahun 2009	440.949.223,00		7.626.969,00	433.322.254,00
	- Tahun 2010	418.531.930,00		8.620.025,00	409.911.905,00
	- Tahun 2011	811.268.007,00		2.819.067,00	808.448.940,00
	- Tahun 2012	1.585.384.107,00		4.045.180,00	1.581.338.927,00
	- Tahun 2013	1.597.593.881,00		6.820.837,00	1.590.773.044,00
	- Tahun 2014	573.404.178,00		8.706.276,00	564.697.902,00
	- Tahun 2015	1.098.107.767,00		15.220.904,00	1.082.886.863,00
	- Tahun 2016	417.697.983,50	406.082.773,50		823.780.757,00
	- Tahun 2017	427.296.234,50		7.606.457,50	419.689.777,00
	- Tahun 2018	596.852.355,50		10.682.263,50	586.170.092,00
	- Tahun 2019	473.530.014,50		12.643.895,50	460.886.119,00
	- Tahun 2020	94.134.594,20		4.676.171,50	89.458.422,70
	- Tahun 2021	-	138.528.933,10		138.528.933,10
	- Tahun 2022	-	7.252.173,05		7.252.173,05
	Jumlah	8.534.750.275,20	551.863.879,65	89.468.046,00	8.997.146.108,85
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PBB	8.534.750.275,20	551.863.879,65	89.468.046,00	8.997.146.108,85
		-			
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	12.526.965.390,14	4.332.094.259,39	2.606.909.978,87	14.252.149.670,66



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 13

REKAP PERSEDIAAN PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		Per 4 JAN 2022			Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4) - 5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.555.500,00	8.422.845.850	8.419.801.350	4.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	19.386.054.755,86	53.129.788.542,27	51.846.210.728,38	20.669.632.569,75
3	Rumah Sakit Umum Daerah '45	5.104.175.486,00	42.436.226.673,92	41.796.281.748,92	5.744.120.411,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati	2.581.411.240,45	13.814.134.542	13.315.076.055,11	3.080.469.727,34
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.941.100,00	52.187.399.530,00	52.184.633.630,00	15.707.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.881.000,00	42.626.600.000,00	42.626.617.000,00	1.864.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	202.000,00	2.209.764.587	2.209.316.587	650.000
8	Dinas Sosial	15.325.000,00	1.839.002.750,00	1.818.948.650,00	35.379.100,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	125.000,00	3.114.310.768,00	3.114.285.768,00	150.000,00
10	Dinas Peternakan dan Perikanan	85.554.500,00	13.474.414.660,00	13.514.734.160,00	45.235.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.051.500,00	4.727.611.650,00	4.728.671.550,00	991.600,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	764.360.000,00	2.964.919.600,00	2.242.291.100,00	1.486.988.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.667.000,00	10.461.186.680,00	10.462.596.180,00	257.500,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	768.634.669,00	5.609.589.430,00	5.654.390.611,00	723.833.488,00
15	Dinas Perhubungan	24.617.100,00	4.094.654.565,00	4.084.479.665,00	34.792.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	435.000,00	1.643.080.200,00	1.643.143.200,00	372.000,00
17	Dinas Koperasi dan UKM Perindag	664.500,00	7.299.537.169,00	7.299.692.669,00	509.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.475.000,00	906.481.000,00	907.854.100,00	1.101.900,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	825.000,00	15.752.562.182,50	15.752.647.182,50	740.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.561.000,00	614.398.000,00	615.647.500,00	311.500,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.920.525,78	15.769.467.552,00	15.748.888.384,78	281.499.693,00
22	Inspektorat Kabupaten	2.164.660,00	1.620.378.300,00	1.621.743.260,00	799.700,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.814.000,00	1.752.393.700,00	1.754.978.700,00	5.229.000,00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.672.000,00	4.412.049.760	4.411.275.160	4.446.600,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.356.500,00	6.533.041.535,00	6.529.848.035,00	4.550.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.542.500,00	2.820.335.500,00	2.820.615.000,00	1.263.000,00
28	Sekretariat Daerah	82.279.024,15	13.235.865.300,00	13.219.857.707,15	98.286.617,00
30	Sekretariat DPRD	15.467.366,50	10.289.962.612,00	10.293.347.638,50	12.082.340,00
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.488.325,00	1.870.688.890,00	1.878.707.547,00	9.469.668,00
32	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	597.000,00	1.250.895.000,00	1.249.512.600,00	1.979.400,00
33	Kecamatan Ciawigebang	-	231.767.000,00	231.707.000,00	60.000,00
34	Kecamatan Cibingbin	726.000,00	275.039.300,00	275.073.800,00	691.500,00
35	Kecamatan Cidahu	107.000,00	211.088.000,00	211.135.000,00	60.000,00
36	Kecamatan Cigandamekar	577.000,00	301.997.300,00	301.864.300,00	710.000,00
37	Kecamatan Cilimus	-	277.260.000,00	277.210.000,00	50.000,00
38	Kecamatan Ciwaru	300.000,00	272.325.000,00	272.421.000,00	204.000,00
39	Kecamatan Darma	-	218.631.660,00	218.506.660,00	125.000,00
40	Kecamatan Garawangi	524.000,00	268.325.800,00	268.601.800,00	248.000,00
41	Kecamatan Jalaksana	95.000,00	314.254.848,00	314.212.848,00	137.000,00
42	Kecamatan Kadugede	-	289.756.028,00	289.501.228,00	254.800,00
43	Kecamatan Karangancana	-	226.087.700,00	224.592.700,00	1.495.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

No.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		Per 4 JAN 2022			Per 31 Des 2022
44	Kecamatan Kramatmulya	186.000,00	266.408.310,00	266.307.010,00	287.300,00
45	Kecamatan Kuningan	1.964.500,00	2.078.450.470,00	2.079.841.170,00	573.800,00
46	Kecamatan Lebakwangi	251.500,00	249.731.000,00	249.591.000,00	391.500,00
47	Kecamatan Luragung	672.000,00	253.125.636,00	252.505.686,00	1.291.950,00
48	Kecamatan Maleber	280.000,00	312.448.500,00	312.590.500,00	138.000,00
49	Kecamatan Mandirancan	357.000,00	300.642.250,00	300.769.250,00	230.000,00
50	Kecamatan Pancalang	-	244.953.776,00	244.903.776,00	50.000,00
51	Kecamatan Sindangagung	145.000,00	192.943.000,00	192.953.000,00	135.000,00
52	Kecamatan Cibeureum	130.000,00	245.362.900,00	245.350.700,00	142.200,00
53	Kecamatan Cigugur	365.000,00	1.186.669.900,00	1.186.806.900,00	228.000,00
54	Kecamatan Cilebak	-	197.363.400,00	197.112.800,00	250.600,00
55	Kecamatan Cimahi	-	191.021.962,00	188.670.962,00	2.351.000,00
56	Kecamatan Ciniru	-	202.893.400,00	201.918.400,00	975.000,00
57	Kecamatan Cipicung	533.000,00	169.607.200,00	170.018.200,00	122.000,00
58	Kecamatan Hantara	-	245.018.650,00	245.018.650,00	-
59	Kecamatan Japara	398.000,00	203.474.500,00	203.462.800,00	409.700,00
60	Kecamatan Kalimanggis	165.000,00	231.381.500,00	231.385.500,00	161.000,00
61	Kecamatan Nusaherang	220.000,00	230.910.500,00	230.910.500,00	220.000,00
62	Kecamatan Pasawahan	130.000,00	199.691.950,00	199.665.950,00	156.000,00
63	Kecamatan Selajambe	-	271.380.800,00	270.566.300,00	814.500,00
64	Kecamatan Subang	307.000,00	291.614.950,00	291.630.950,00	291.000,00
J U M L A H		29.158.251.252,75	357.535.213.718,79	354.412.899.807,05	32.280.565.164,48



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 14

REKAP ASET TANAH PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB A TANAH		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	176.438.341.400	-	-	176.438.341.400
2	DINAS KESEHATAN	11.390.542.043	-	5.184.077.883	6.206.464.160
3	BADAN RSUD' 45	14.478.896.000	5.184.077.883	-	19.662.973.883
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	144.091.280.340	-	-	144.091.280.340
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.202.427.416	26.937.905.175	-	53.140.332.591
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	47.500.000	-	-	47.500.000
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.316.492.901	-	-	6.316.492.901
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49.424.131.619	-	-	49.424.131.619
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	183.876.000	-	-	183.876.000
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	23.870.000	-	-	23.870.000
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	248.300.000	-	-	248.300.000
12	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	23.750.000	-	-	23.750.000
13	INSPEKTORAT KABUPATEN	21.426.666	-	-	21.426.666
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.086.300.000	-	-	1.086.300.000
15	SKPKD	214.059.398.521	95.743.932.317	28.000.000	309.775.330.838
16	SEKRETARIAT DAERAH	12.143.549.399	-	-	12.143.549.399
17	KECAMATAN CIAWIGEBANG	1.176.000.000	-	-	1.176.000.000
18	KECAMATAN CIWARU	255.506.323	-	-	255.506.323
19	KECAMATAN JALAKSANA	1.222.800.000	-	-	1.222.800.000
20	KECAMATAN KUNINGAN	16.198.565.592	-	-	16.198.565.592
21	KECAMATAN LURAGUNG	774.100.000	-	-	774.100.000
22	KECAMATAN PANCALANG	116.600.000	-	-	116.600.000
23	KECAMATAN CIGUGUR	3.495.253.490	-	-	3.495.253.490
24	KECAMATAN SUBANG	33.007.200	-	-	33.007.200
		679.451.914.910	127.865.915.376	5.212.077.883	802.105.752.403



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 15

REKAP ASET PERALATAN DAN MESIN PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB B PERALATAN DAN MESIN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	319.116.474.750	29.744.336.490	1.449.049.039	347.411.762.201
2	DINAS KESEHATAN	65.917.996.841	6.082.296.211	2.124.120.799	69.876.172.253
3	BADAN RSUD' 45	123.209.208.622	10.761.907.040	1.959.058.920	132.012.056.742
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI" KABUPATEN KUNINGAN	83.547.139.879	5.682.695.490	565.124.657	88.664.710.712
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12.402.569.253	1.628.729.405	881.118.350	13.150.180.308
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.384.563.829	133.000.000	50.794.500	2.466.769.329
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.728.954.706	4.149.693.000	62.219.000	7.816.428.706
8	DINAS SOSIAL	1.576.909.700	204.782.000	822.000	1.780.869.700
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.137.370.953	263.500.000	354.443.424	4.046.427.529
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.976.763.378	374.848.704	339.513.890	7.012.098.192
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.284.836.340	755.407.500	173.207.472	16.867.036.368
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.922.470.649	867.659.803	163.472.075	6.626.658.377
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.895.701.989	109.877.000	18.300.000	1.987.278.989
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	10.453.892.362	522.000.000	290.219.931	10.685.672.431
15	DINAS PERHUBUNGAN	29.877.940.773	698.314.880	154.812.202	30.421.443.451
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.858.970.154	542.166.000	68.978.000	9.332.158.154
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.302.409.865	79.370.000	41.398.000	6.340.381.865
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELY TERPADU SATU PINTU	4.728.726.260	209.218.597	80.305.005	4.857.639.853
19	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.586.169.048	24.400.000	-	2.610.569.048
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.089.071.898	477.190.940	143.603.078	3.422.659.760
21	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	3.940.753.815	317.676.000	203.101.558	4.055.328.257
22	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.474.490.688	150.000.000	28.095.000	2.596.395.688
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	3.293.814.036	252.610.000	79.755.915	3.466.668.121
24	SKPKD	4.622.775.852	1.070.494.700	507.721.800	5.185.548.752
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.856.063.501	805.418.980	534.859.089	5.126.623.393
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.985.114.296	4.104.251.300	3.039.424.100	6.049.941.496



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB B PERALATAN DAN MESIN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.215.176.267	755.580.799	105.156.730	3.865.600.336
28	SEKRETARIAT DAERAH	24.912.603.124	3.848.493.468	739.176.755	28.021.919.838
29	SEKRETARIAT DPRD	9.778.457.913	131.393.943	283.950.405	9.625.901.451
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.573.291.592	246.567.000	27.143.344	4.792.715.248
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.413.178.246	74.960.271	18.212.046	1.469.926.471
32	KECAMATAN CIAWIGEBANG	910.622.996	277.322.892	72.965.000	1.114.980.888
33	KECAMATAN CIBINGBIN	823.118.534	70.895.244	11.350.000	882.663.778
34	KECAMATAN CIDAHU	668.170.976	73.347.244	1.450.000	740.068.220
35	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	561.088.163	44.555.244	-	605.643.407
36	KECAMATAN CILIMUS	902.355.390	45.250.000	11.370.600	936.234.790
37	KECAMATAN CIWARU	624.575.790	68.319.244	18.825.000	674.070.034
38	KECAMATAN DARMA	684.055.910	300.235.000	63.000.000	921.290.910
39	KECAMATAN GARAWANGI	929.577.330	42.050.000	21.183.334	950.443.996
40	KECAMATAN JALAKSANA	773.518.950	50.827.244	46.108.950	778.237.244
41	KECAMATAN KADUGEDE	599.722.450	46.227.244	27.377.000	618.572.694
42	KECAMATAN KARANGKANCANA	628.431.290	30.207.244	-	658.638.534
43	KECAMATAN KRAMATMULYA	780.857.950	62.977.244	-	843.835.194
44	KECAMATAN KUNINGAN	3.860.637.208	197.573.344	-	4.058.210.552
45	KECAMATAN LEBAKWANGI	720.583.476	14.050.000	-	734.633.476
46	KECAMATAN LURAGUNG	769.612.930	66.263.000	30.750.000	805.125.930
47	KECAMATAN MALEBER	799.298.036	272.525.000	80.000.000	991.823.036
48	KECAMATAN MANDIRANCAN	668.182.950	38.003.000	-	706.185.950
49	KECAMATAN PANCALANG	691.729.392	59.827.244	-	751.556.636
50	KECAMATAN SINDANGAGUNG	620.078.300	65.777.244	6.000.000	679.855.544
51	KECAMATAN CIBEUREUM	589.512.950	33.440.244	2.500.000	620.453.194
52	KECAMATAN CIGUGUR	2.036.580.440	265.397.044	91.148.800	2.210.828.684
53	KECAMATAN CILEBAK	630.808.878	268.022.000	205.495.648	693.335.230
54	KECAMATAN CIMAHI	626.197.236	232.782.448	81.342.000	777.637.684
55	KECAMATAN CINIRU	498.579.450	307.051.244	90.460.317	715.170.377
56	KECAMATAN CIPICUNG	601.816.586	95.327.244	9.800.000	687.343.830
57	KECAMATAN HANTARA	625.566.450	47.100.000	-	672.666.450
58	KECAMATAN JAPARA	550.364.680	44.680.744	700.000	594.345.424
59	KECAMATAN KALIMANGGIS	555.338.290	41.827.244	-	597.165.534
60	KECAMATAN NUSAHERANG	454.395.450	35.827.244	-	490.222.694
61	KECAMATAN PASAWAHAN	671.601.098	25.500.000	24.110.000	672.991.098
62	KECAMATAN SELAJAMBE	613.174.438	281.432.000	205.495.648	689.110.790
63	KECAMATAN SUBANG	613.525.584	289.227.244	240.289.898	662.462.930
		807.147.540.130	78.862.686.896	15.828.879.278	870.181.347.748



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 16

REKAP ASET GEDUNG DAN BANGUNAN PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	819.300.111.469	54.939.347.178	22.264.641.193	851.974.817.454
2	DINAS KESEHATAN	127.798.860.203	2.063.793.309	3.737.401.117	126.125.252.396
3	BADAN RSUD' 45	15.721.123.057	3.974.209.917	-	19.695.332.974
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI" KABUPATEN KUNINGAN	34.717.962.910	-	-	34.717.962.910
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	46.706.680.718	58.659.882.549	48.597.913.667	56.768.649.600
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.836.865.950	-	-	3.836.865.950
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.895.039.200	359.504.000	340.571.700	1.913.971.500
8	DINAS SOSIAL	3.765.279.750	-	-	3.765.279.750
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.652.463.139	335.951.000	-	7.988.414.139
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.035.859.239	99.170.000	-	12.135.029.239
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	61.887.386.116	27.336.967.917	-	89.224.354.033
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.261.513.450	-	-	3.261.513.450
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.655.474.000	-	-	1.655.474.000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	9.960.677.363	-	-	9.960.677.363
15	DINAS PERHUBUNGAN	15.390.364.700	1.329.787.000	-	16.720.151.700
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.936.037.878	97.680.000	44.178.000	3.989.539.878
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	48.736.470.997	694.291.000	-	49.430.761.997
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY TERPADU SATU PINTU	6.256.399.250	187.132.000	187.132.000	6.256.399.250
19	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	20.404.444.300	474.566.350	1.447.632.000	19.431.378.650
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.153.891.000	-	-	3.153.891.000
21	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	10.262.646.701	25.000.000	-	10.287.646.701
22	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.015.925.000	149.597.000	-	2.165.522.000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.864.102.250	195.836.000	-	2.059.938.250
24	SKPKD	21.787.917.080	12.899.483.000	205.572.000	34.481.828.080
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.003.833.211	-	-	3.003.833.211
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	198.885.000	-	-	198.885.000



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.680.676.000	1.036.657.000	-	3.717.333.000
28	SEKRETARIAT DAERAH	31.846.051.300	826.859.300	-	32.672.910.600
29	SEKRETARIAT DPRD	4.808.645.100	2.286.241.000	-	7.094.886.100
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.675.098.750	95.827.000	-	1.770.925.750
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	956.725.000	-	-	956.725.000
32	KECAMATAN CIAWIGEBANG	2.683.406.000	-	-	2.683.406.000
33	KECAMATAN CIBINGBIN	1.255.458.500	196.041.000	-	1.451.499.500
34	KECAMATAN CIDAHU	530.339.000	-	-	530.339.000
35	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	1.479.596.200	-	-	1.479.596.200
36	KECAMATAN CILIMUS	2.289.936.789	454.823.785	-	2.744.760.574
37	KECAMATAN CIWARU	1.944.569.500	30.000.000	-	1.974.569.500
38	KECAMATAN DARMA	1.434.515.500	18.000.000	-	1.452.515.500
39	KECAMATAN GARAWANGI	947.394.160	-	-	947.394.160
40	KECAMATAN JALAKSANA	1.233.388.000	-	-	1.233.388.000
41	KECAMATAN KADUGEDE	1.366.139.000	-	-	1.366.139.000
42	KECAMATAN KARANGKANCANA	1.160.237.293	-	-	1.160.237.293
43	KECAMATAN KRAMATMULYA	1.478.200.000	-	-	1.478.200.000
44	KECAMATAN KUNINGAN	18.601.248.481	390.360.000	-	18.991.608.481
45	KECAMATAN LEBAKWANGI	414.554.000	-	-	414.554.000
46	KECAMATAN LURAGUNG	1.006.555.667	-	-	1.006.555.667
47	KECAMATAN MALEBER	1.442.484.453	95.784.000	-	1.538.268.453
48	KECAMATAN MANDIRANCAN	1.537.306.500	-	-	1.537.306.500
49	KECAMATAN PANCALANG	1.086.472.500	-	-	1.086.472.500
50	KECAMATAN SINDANGAGUNG	1.647.227.393	-	-	1.647.227.393
51	KECAMATAN CIBEUREUM	1.290.456.000	-	-	1.290.456.000
52	KECAMATAN CIGUGUR	6.284.002.685	-	-	6.284.002.685
53	KECAMATAN CILEBAK	2.491.469.000	-	-	2.491.469.000
54	KECAMATAN CIMAHI	961.825.000	-	-	961.825.000
55	KECAMATAN CINIRU	1.180.231.000	-	-	1.180.231.000
56	KECAMATAN CIPICUNG	879.194.500	-	-	879.194.500
57	KECAMATAN HANTARA	1.099.383.000	-	-	1.099.383.000
58	KECAMATAN JAPARA	1.003.151.000	-	-	1.003.151.000
59	KECAMATAN KALIMANGGIS	942.907.633	-	-	942.907.633
60	KECAMATAN NUSAHERANG	625.399.000	-	-	625.399.000
61	KECAMATAN PASAWAHAN	1.644.402.793	95.150.000	-	1.739.552.793
62	KECAMATAN SELAJAMBE	1.297.353.773	-	-	1.297.353.773
63	KECAMATAN SUBANG	2.290.972.323	-	-	2.290.972.323
		1.394.703.186.724	169.347.941.305	76.825.041.677	1.487.226.086.352



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 17

REKAP ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER SKPD TAHUN ANGGARAN

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB D JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	481.888.000	-	-	481.888.000
2	DINAS KESEHATAN	30.400.000	-	-	30.400.000
3	BADAN RSUD' 45	5.584.001.000	-	-	5.584.001.000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI" KABUPATEN KUNINGAN	1.815.968.121	-	-	1.815.968.121
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.081.449.542.609	115.653.045.767	8.400.890.582	2.188.701.697.793
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	394.749.000	-	-	394.749.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	98.169.000	-	-	98.169.000
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.224.595.900	-	-	3.224.595.900
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.661.349.886	3.048.240.483	195.819.000	10.513.771.369
10	DINAS PERHUBUNGAN	1.648.296.001	-	-	1.648.296.001
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELY TERPADU SATU PINTU	684.196.150	-	-	684.196.150
12	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	199.290.000	-	-	199.290.000
13	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1.806.660.290	-	-	1.806.660.290
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	26.146.000	-	-	26.146.000
15	SKPKD	122.657.000	-	-	122.657.000
16	SEKRETARIAT DAERAH	1.194.109.300	-	-	1.194.109.300
17	KECAMATAN KUNINGAN	1.358.022.000	-	-	1.358.022.000
18	KECAMATAN PANCALANG	89.307.000	-	-	89.307.000
		2.107.869.347.256	118.701.286.250	8.596.709.582	2.217.973.923.924



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 18

REKAP ASET TETAP LAINNYA PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB E ASET TETAP LAINNYA		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	66.686.935.377	7.794.658.933	5.408.418.628	69.073.175.682
2	DINAS KESEHATAN	566.818.000	-	-	566.818.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.044.172.000	-	-	3.044.172.000
4	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	684.154.000	-	-	684.154.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	388.020.500	-	-	388.020.500
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	819.086.000	-	-	819.086.000
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.700.000	-	-	2.700.000
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	500.000	-	-	500.000
9	DINAS PERHUBUNGAN	6.000.000	-	-	6.000.000
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	467.499.000	-	467.499.000
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	55.350.000	-	-	55.350.000
12	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.003.392.749	2.200.000	2.200.000	1.003.392.749
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	801.041.064	46.250.000	33.100.200	814.190.864
14	INSPEKTORAT KABUPATEN	33.408.000	-	-	33.408.000
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	21.250.000	-	-	21.250.000
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	11.317.000	11.317.000	-
17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	46.500.000	-	-	46.500.000
18	SEKRETARIAT DAERAH	184.988.773	59.620.000	59.620.000	184.988.773
19	SEKRETARIAT DPRD	1.136.195.500	13.700.000	13.700.000	1.136.195.500
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99.650.000	-	-	99.650.000
21	KECAMATAN KUNINGAN	21.518.868	-	-	21.518.868
		75.601.680.830	8.395.244.933	5.528.355.828	78.468.569.935



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Lampiran 19

REKAP PENYUSUTAN KIB. B UNTUK PERALATAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB B PERALATAN DAN MESIN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(178.399.495.602)	(64.318.406.857)	-	(242.717.902.459)
2	DINAS KESEHATAN	(53.951.545.869)	(5.262.876.106)	(1.048.617.722)	(58.165.804.253)
3	BADAN RSUD' 45	(99.954.758.121)	(10.594.479.162)	(1.731.318.900)	(108.817.918.382)
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI" KABUPATEN KUNINGAN	(63.435.707.098)	(9.056.549.934)	(462.008.161)	(72.030.248.870)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(9.462.164.244)	(1.124.357.576)	(8.970.000)	(10.577.551.820)
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	(1.917.266.710)	(225.158.120)	(43.362.500)	(2.099.062.330)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(3.406.105.642)	(3.875.069.843)	(28.200.000)	(7.252.975.484)
8	DINAS SOSIAL	(1.266.130.430)	(165.520.770)	-	(1.431.651.200)
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(3.797.911.247)	(294.502.406)	(353.779.596)	(3.738.634.057)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(6.247.583.875)	(442.642.045)	(337.613.890)	(6.352.612.030)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(11.249.674.225)	(1.485.920.859)	(163.107.472)	(12.572.487.611)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(5.203.226.760)	(621.796.930)	(84.357.075)	(5.740.666.615)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1.719.340.314)	(107.431.141)	(16.750.000)	(1.810.021.456)
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP & PA	(8.852.285.337)	(701.175.583)	(286.458.650)	(9.267.002.270)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(26.009.849.630)	(2.315.637.337)	(136.645.000)	(28.188.841.967)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(5.001.509.567)	(1.377.222.654)	(47.000.000)	(6.331.732.221)
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	(4.668.723.107)	(579.927.733)	(40.698.000)	(5.207.952.841)
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELY TERPADU SATU PINTU	(4.485.264.523)	(156.395.079)	(67.184.335)	(4.574.475.268)
19	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(2.336.226.192)	(135.112.857)	-	(2.471.339.049)
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(2.664.906.354)	(288.698.964)	(56.738.278)	(2.896.867.040)
21	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	(3.751.092.794)	(382.413.807)	(203.101.558)	(3.930.405.043)
22	INSPEKTORAT KABUPATEN	(2.034.014.918)	(188.428.370)	(26.595.000)	(2.195.848.288)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN	(3.042.652.309)	(160.587.870)	(79.255.915)	(3.123.984.264)
24	SKPKD	(3.474.915.566)	(812.879.871)	(266.452.200)	(4.021.343.237)
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(4.510.443.409)	(247.045.424)	(63.492.209)	(4.693.996.623)
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(4.030.914.998)	(550.709.960)	(43.424.100)	(4.538.200.858)
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	(2.468.548.325)	(449.853.752)	(104.456.730)	(2.813.945.348)
28	SEKRETARIAT DAERAH	(20.386.500.893)	(2.688.767.913)	(668.207.083)	(22.407.061.723)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

NO	SKPD	SALDO 1 JANUARI 2022	KIB B PERALATAN DAN MESIN		SALDO 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
29	SEKRETARIAT DPRD	(8.288.367.556)	(686.324.886)	(282.523.405)	(8.692.169.037)
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(4.152.098.986)	(232.881.167)	(23.897.283)	(4.361.082.870)
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(1.376.315.389)	(41.653.027)	(17.462.046)	(1.400.506.370)
32	KECAMATAN CIAWIGEBANG	(788.282.996)	(156.274.527)	(72.965.000)	(871.592.523)
33	KECAMATAN CIBINGBIN	(555.306.697)	(94.092.328)	(11.350.000)	(638.049.025)
34	KECAMATAN CIDAHU	(567.840.976)	(56.528.963)	(1.450.000)	(622.919.940)
35	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	(500.781.663)	(39.982.063)	-	(540.763.726)
36	KECAMATAN CILIMUS	(773.406.104)	(75.730.357)	(11.370.600)	(837.765.861)
37	KECAMATAN CIWARU	(516.048.647)	(56.697.821)	(18.605.000)	(554.141.468)
38	KECAMATAN DARMA	(576.687.552)	(89.861.965)	(63.000.000)	(603.549.517)
39	KECAMATAN GARAWANGI	(784.151.616)	(66.449.643)	(21.183.334)	(829.417.925)
40	KECAMATAN JALAKSANA	(720.606.450)	(33.592.463)	(44.868.950)	(709.329.963)
41	KECAMATAN KADUGEDE	(557.847.450)	(23.744.963)	(22.127.000)	(559.465.413)
42	KECAMATAN KARANGKANCANA	(510.566.433)	(59.192.892)	-	(569.759.325)
43	KECAMATAN KRAMATMULYA	(738.252.950)	(42.642.463)	-	(780.895.413)
44	KECAMATAN KUNINGAN	(3.031.837.940)	(387.331.267)	-	(3.419.169.207)
45	KECAMATAN LEBAKWANGI	(635.394.190)	(45.217.857)	-	(680.612.047)
46	KECAMATAN LURAGUNG	(653.850.073)	(62.470.814)	(30.750.000)	(685.570.887)
47	KECAMATAN MALEBER	(719.048.036)	(75.789.286)	(80.000.000)	(714.837.322)
48	KECAMATAN MANDIRANCAN	(608.326.521)	(33.795.243)	-	(642.121.764)
49	KECAMATAN PANCALANG	(605.806.059)	(49.401.630)	-	(655.207.689)
50	KECAMATAN SINDANGAGUNG	(520.064.014)	(60.121.035)	(6.000.000)	(574.185.049)
51	KECAMATAN CIBEUREUM	(500.088.750)	(44.638.363)	(2.500.000)	(542.227.114)
52	KECAMATAN CIGUGUR	(1.611.515.333)	(222.420.842)	(56.450.000)	(1.777.486.175)
53	KECAMATAN CILEBAK	(426.141.272)	(65.254.757)	(58.713.042)	(432.682.987)
54	KECAMATAN CIMAH	(522.657.950)	(140.628.881)	(80.000.000)	(583.286.831)
55	KECAMATAN CINIRU	(433.625.993)	(74.557.821)	(90.460.317)	(417.723.497)
56	KECAMATAN CIPICUNG	(526.041.586)	(50.694.963)	(7.550.000)	(569.186.549)
57	KECAMATAN HANTARA	(528.817.164)	(49.515.357)	-	(578.332.521)
58	KECAMATAN JAPARA	(488.284.680)	(32.335.663)	(700.000)	(519.920.343)
59	KECAMATAN KALIMANGGIS	(476.158.296)	(37.569.963)	-	(513.728.259)
60	KECAMATAN NUSAHERANG	(419.695.450)	(20.194.963)	-	(439.890.413)
61	KECAMATAN PASAWAHAN	(425.453.707)	(70.669.878)	(24.110.000)	(472.013.585)
62	KECAMATAN SELAJAMBE	(410.997.546)	(64.922.829)	(58.713.042)	(417.207.333)
63	KECAMATAN SUBANG	(434.967.978)	(62.423.535)	(93.507.292)	(403.884.221)
		(573.114.092.064)	(112.015.173.401)	(7.548.050.687)	(677.581.214.779)